

7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang jumlah penerimaan dan pengeluaran periode berjalan;
- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyajikan tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Seri E);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 10);

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2018 adalah sebagai berikut:

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

7.2.1 Ekonomi Makro

7.2.2 Kebijakan Keuangan

7.2.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

7.2.4 Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk Mengatasi Permasalahan yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

7.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

7.4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

7.4.3 Neraca

7.4.4 Laporan Operasional

7.4.5 Laporan Arus Kas

7.4.6 Laporan Perubahan Ekuitas

7.4.7 Penjelasan atas Dana-dana Non APBD Kabupaten Muara Enim

7.5 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.6 PENUTUP

7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

7.2.1 Ekonomi Makro

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah fokus pertama dari tiga fokus pada aspek kesejahteraan masyarakat. Fokus ini berusaha melihat kondisi ekonomi makro sebuah wilayah yang diukur dengan beberapa indikator, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, Indeks Gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

7.2.2 Kebijakan Keuangan

7.2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Artinya perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah , yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah
 - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak
 - b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain:
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - f. Pendapatan Lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan dari sumber PAD, sementara itu peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah terus diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2018 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan BUMD. Upaya-upaya tersebut antara lain; mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD, meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan; meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD; mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional.

1. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

Upaya intensifikasi pajak dan atau retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah seperti pelayanan perizinan satu atap.
- b. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah seperti merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui media massa, seperti pemasangan papan himbauan, spanduk, pemberian penghargaan.
- d. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah seperti melakukan uji petik terhadap objek-objek retribusi daerah.
- e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait, seperti menginventarisasi dan menertibkan objek-objek pajak dan retribusi.
- f. Optimalisasi penagihan piutang pajak dengan melaksanakan penagihan pintu ke pintu dan pelaksanaan Pekan Pelunasan PBB P2 di Kecamatan dan Desa-Desa.

2. Ektensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah

Upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. Menerbitkan peraturan daerah tentang retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.
- b. Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu disempurnakan.
- c. Pengkajian mekanisme pajak dan retribusi daerah untuk target grup baru.
- d. Mengupayakan peningkatan bagi hasil pajak melalui koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan badan usaha dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka optimalisasi upaya dan langkah tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengelola beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah

yang didasarkan kepada Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan;
 - 7) Pajak Air Tanah;
 - 8) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Retribusi Daerah, antara lain:
 - 1) Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, adalah:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c) Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelataran;
 - d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
 - f) Retribusi Penyedotan Kaku.
 - 2) Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, adalah:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
 - c) Retribusi Terminal;
 - d) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Dinas; dan
 - g) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, adalah:
 - a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c) Retribusi Izin Gangguan (HO); dan

- d) Retribusi Izin Trayek.
- 4) Retribusi Parkir di tepi jalan umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010.

7.2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kebijakan belanja daerah dan penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah dengan sasaran yang tepat dan nilai manfaat yang tinggi. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah serta mewujudkan prinsip anggaran yang transparan dan akuntabel.

Untuk itu penggunaan belanja daerah diarahkan pada pembangunan yang mempunyai dampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Pembangunan Pertanian;
- d. Penyediaan Infrastruktur Sosial Ekonomi;
- e. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; dan
- f. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Prioritas pembangunan tersebut di atas, tertuang dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan oleh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan bidang urusan pemerintahan masing-masing (urusan wajib atau urusan pilihan) sebagai berikut:

- a) Urusan Wajib:
 - 1) Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh OPD Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. M.Raba'in;
 - 3) Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Urusan Wajib Perumahan dilaksanakan oleh OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 6) Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh OPD Dinas Perhubungan;
 - 7) Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup;

- 8) Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 9) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 10) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 11) Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial;
- 12) Urusan Wajib Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh OPD Dinas Ketenagakerjaan;
- 13) Urusan Wajib Koperasi UKM dilaksanakan oleh OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 14) Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15) Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 16) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 17) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan dilaksanakan oleh OPD:
 - a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - b) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c) Sekretariat Daerah;
 - d) Sekretariat DPRD;
 - e) Inspektorat Daerah Kabupaten;
 - f) Badan Pendapatan Daerah;
 - g) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - j) Kecamatan Semende Darat Ulu;
 - k) Kecamatan Semende Darat Tengah;
 - l) Kecamatan Semende Darat Laut;
 - m) Kecamatan Tanjung Agung;
 - n) Kecamatan Lawang Kidul;
 - o) Kecamatan Muara Enim;
 - p) Kecamatan Ujan Mas;
 - q) Kecamatan Benakat;
 - r) Kecamatan Gunung Megang;
 - s) Kecamatan Rambang Dangku;

- t) Kecamatan Lubai;
 - u) Kecamatan Rambang;
 - v) Kecamatan Lembak;
 - w) Kecamatan Kelekar;
 - x) Kecamatan Gelumbang;
 - y) Kecamatan Sungai Rotan;
 - z) Kecamatan Muara Belida;
 - aa) Kecamatan Belimbing;
 - bb) Kecamatan Belida Darat;
 - cc) Kecamatan Lubai Ulu;
- 18) Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh OPDDinas Ketahanan Pangan;
 - 19) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh OPDDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 20) Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh OPDDinas Komunikasi dan Informatika;
 - 21) Urusan Wajib perpustakaan dilaksanakan oleh OPDDinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b) Urusan Pilihan:
- 1) Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dan Dinas Perkebunan;
 - 2) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh OPD Dinas Perikanan;
 - 3) Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh OPD Dinas Perdagangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk itu, penerapan prinsip-prinsip anggaran, yaitu transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektifitas anggaran harus dilakukan. Karena prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari instrumen yang akan menjamin terciptanya kondisi yang mampu menjawab berbagai tuntutan yang berkembang di masyarakat, sehingga akan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah melalui APBD yang semakin sehat dan dinamis.

Kebijakan belanja daerah pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan prasarana pendidikan, kesehatan serta prasarana pendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, langkah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;
- b. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*);

- c. Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dari masyarakat sebagai bahan kajian kebijakan untuk kepentingan masyarakat (*bottom up*);
- d. Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja; dan
- e. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4	PENDAPATAN	2.446.145.604.398,76	2.525.583.634.051,30	79.438.029.652,54	103,25
4 . 1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.400.000,00	22.662.000,00	8.262.000,00	157,38
4 . 1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	17.214.850.600,00	15.555.914.150,00	(1.658.936.450,00)	90,36
4 . 1.02 . 1.02.02	RSUD DR.H.M.Rabain	79.966.715.831,05	79.038.015.762,88	(928.700.068,17)	98,84
4 . 1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105.521.826,00	41.044.560,00	(64.477.266,00)	38,90
4 . 1.07 . 1.07.01	Dinas Perhubungan	1.229.050.000,00	1.316.244.666,00	87.194.666,00	107,09
4 . 1.08 . 1.08.01	Dinas Lingkungan Hidup	397.000.000,00	490.566.000,00	93.566.000,00	123,57
4 . 1.14 . 1.14.01	Dinas Ketenagakerjaan	573.230.000,00	748.127.600,00	174.897.600,00	130,51
4 . 1.16 . 1.16.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.102.600.000,00	17.853.883.242,00	12.751.283.242,00	349,90
4 . 1.18 . 1.18.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	894.162.000,00	899.121.000,00	4.959.000,00	100,55
4 . 1.20 . 1.20.06	Badan Pendapatan Daerah	95.418.143.034,00	69.451.066.568,62	(25.967.076.465,38)	72,79
4 . 1.20 . 1.20.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	94.337.500,00	124.962.500,00	30.625.000,00	132,46
4 . 1.20 . 1.20.08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.243.739.113.607,71	2.337.512.115.892,72	93.773.002.285,01	104,18
4 . 1.20 . 1.20.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
4 . 1.20 . 1.20.29	Kecamatan Belida Darat	0,00	10.581,00	10.581,00	0,00
4 . 1.25 . 1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000,00	1.350.222.459,08	1.100.222.459,08	540,09
4 . 2.01 . 2.01.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	170.580.000,00	199.596.700,00	29.016.700,00	117,01
4 . 2.01 . 2.01.02	Dinas Perkebunan	59.400.000,00	55.959.600,00	(3.440.400,00)	94,21
4 . 2.05 . 2.05.01	Dinas Perikanan	120.000.000,00	122.150.990,00	2.150.990,00	101,79
4 . 2.06 . 2.06.01	Dinas Perdagangan	796.500.000,00	801.968.000,00	5.468.000,00	100,69
5	BELANJA	2.638.179.245.095,82	2.434.360.114.052,89	(203.819.131.042,93)	92,27
5 . 1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	608.163.232.857,80	573.314.683.461,51	(34.848.549.396,29)	94,27
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	412.176.121.807,80	384.186.194.676,00	(27.989.927.131,80)	93,21
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	412.176.121.807,80	384.186.194.676,00	(27.989.927.131,80)	93,21
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	195.987.111.050,00	189.128.488.785,51	(6.858.622.264,49)	96,50
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.303.080.250,00	8.964.386.817,00	(338.693.433,00)	96,36
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.029.687.075,00	99.379.865.538,00	(3.649.821.537,00)	96,46
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3	Belanja Modal	83.654.343.725,00	80.784.236.430,51	(2.870.107.294,49)	96,57
5 . 1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	226.602.686.376,90	199.911.476.367,59	(26.691.210.009,31)	88,22
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	79.946.156.625,90	75.985.084.179,00	(3.961.072.446,90)	95,05
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	79.946.156.625,90	75.985.084.179,00	(3.961.072.446,90)	95,05
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2	BELANJA LANGSUNG	146.656.529.751,00	123.926.392.188,59	(22.730.137.562,41)	84,50

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5.1.02.1.02.01.2.1	Belanja Pegawai	573.720.000,00	143.949.000,00	(429.771.000,00)	25,09
5.1.02.1.02.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.876.075.051,00	66.691.867.537,50	(19.184.207.513,50)	77,66
5.1.02.1.02.01.2.3	Belanja Modal	60.206.734.700,00	57.090.575.651,09	(3.116.159.048,91)	94,82
5.1.02.1.02.02	RSUD DR.H.M.Rabain	155.559.933.707,45	146.394.961.828,00	(9.164.971.879,45)	94,11
5.1.02.1.02.02.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	35.576.117.244,50	34.814.722.510,00	(761.394.734,50)	97,86
5.1.02.1.02.02.1.1	Belanja Pegawai	35.576.117.244,50	34.814.722.510,00	(761.394.734,50)	97,86
5.1.02.1.02.02.2	BELANJA LANGSUNG	119.983.816.462,95	111.580.239.318,00	(8.403.577.144,95)	93,00
5.1.02.1.02.02.2.1	Belanja Pegawai	44.871.000,00	43.878.000,00	(993.000,00)	97,79
5.1.02.1.02.02.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.100.698.199,00	83.334.854.375,00	(2.765.843.824,00)	96,79
5.1.02.1.02.02.2.3	Belanja Modal	33.838.247.263,95	28.201.506.943,00	(5.636.740.320,95)	83,34
5.1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	377.699.089.078,60	366.349.412.968,93	(11.349.676.109,67)	97,00
5.1.03.1.03.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.317.354.078,60	5.400.826.572,00	(916.527.506,60)	85,49
5.1.03.1.03.01.1.1	Belanja Pegawai	6.317.354.078,60	5.400.826.572,00	(916.527.506,60)	85,49
5.1.03.1.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	371.381.735.000,00	360.948.586.396,93	(10.433.148.603,07)	97,19
5.1.03.1.03.01.2.1	Belanja Pegawai	480.937.000,00	197.289.000,00	(283.648.000,00)	41,02
5.1.03.1.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.021.064.000,00	29.077.061.061,00	(5.944.002.939,00)	83,03
5.1.03.1.03.01.2.3	Belanja Modal	335.879.734.000,00	331.674.236.335,93	(4.205.497.664,07)	98,75
5.1.04.1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.518.232.602,50	25.392.714.855,93	(2.125.517.746,57)	92,28
5.1.04.1.04.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.302.896.602,50	5.851.481.849,00	(451.414.753,50)	92,84
5.1.04.1.04.01.1.1	Belanja Pegawai	6.302.896.602,50	5.851.481.849,00	(451.414.753,50)	92,84
5.1.04.1.04.01.2	BELANJA LANGSUNG	21.215.336.000,00	19.541.233.006,93	(1.674.102.993,07)	92,11
5.1.04.1.04.01.2.1	Belanja Pegawai	11.916.000,00	11.571.000,00	(345.000,00)	97,10
5.1.04.1.04.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.253.370.000,00	11.826.310.681,00	(1.427.059.319,00)	89,23
5.1.04.1.04.01.2.3	Belanja Modal	7.950.050.000,00	7.703.351.325,93	(246.698.674,07)	96,90
5.1.06.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.802.059.946,85	16.378.002.989,00	(3.424.056.957,85)	82,71
5.1.06.1.06.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.881.933.196,85	3.683.295.303,00	(198.637.893,85)	94,88
5.1.06.1.06.01.1.1	Belanja Pegawai	3.881.933.196,85	3.683.295.303,00	(198.637.893,85)	94,88
5.1.06.1.06.01.2	BELANJA LANGSUNG	15.920.126.750,00	12.694.707.686,00	(3.225.419.064,00)	79,74
5.1.06.1.06.01.2.1	Belanja Pegawai	568.505.000,00	442.134.000,00	(126.371.000,00)	77,77
5.1.06.1.06.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.890.621.750,00	11.839.249.686,00	(3.051.372.064,00)	79,51
5.1.06.1.06.01.2.3	Belanja Modal	461.000.000,00	413.324.000,00	(47.676.000,00)	89,66
5.1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan	11.051.526.107,10	10.347.338.386,00	(704.187.721,10)	93,63
5.1.07.1.07.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.165.219.707,10	3.736.040.264,00	(429.179.443,10)	89,70
5.1.07.1.07.01.1.1	Belanja Pegawai	4.165.219.707,10	3.736.040.264,00	(429.179.443,10)	89,70
5.1.07.1.07.01.2	BELANJA LANGSUNG	6.886.306.400,00	6.611.298.122,00	(275.008.278,00)	96,01
5.1.07.1.07.01.2.1	Belanja Pegawai	18.540.000,00	18.422.000,00	(118.000,00)	99,36
5.1.07.1.07.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.585.365.700,00	4.399.082.672,00	(186.283.028,00)	95,94
5.1.07.1.07.01.2.3	Belanja Modal	2.282.400.700,00	2.193.793.450,00	(88.607.250,00)	96,12
5.1.08.1.08.01	Dinas Lingkungan Hidup	19.342.850.167,85	17.183.628.984,00	(2.159.221.183,85)	88,84
5.1.08.1.08.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.570.215.767,85	3.298.354.704,00	(271.861.063,85)	92,39
5.1.08.1.08.01.1.1	Belanja Pegawai	3.570.215.767,85	3.298.354.704,00	(271.861.063,85)	92,39
5.1.08.1.08.01.2	BELANJA LANGSUNG	15.772.634.400,00	13.885.274.280,00	(1.887.360.120,00)	88,03
5.1.08.1.08.01.2.1	Belanja Pegawai	31.042.000,00	29.920.000,00	(1.122.000,00)	96,39
5.1.08.1.08.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.704.076.700,00	11.880.124.880,00	(1.823.951.820,00)	86,69
5.1.08.1.08.01.2.3	Belanja Modal	2.037.515.700,00	1.975.229.400,00	(62.286.300,00)	96,94
5.1.10.1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.111.040.370,10	10.668.241.810,00	(2.442.798.560,10)	81,37

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5.1.10.1.10.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.090.267.870,10	3.434.658.729,00	(655.609.141,10)	83,97
5.1.10.1.10.01.1.1	Belanja Pegawai	4.090.267.870,10	3.434.658.729,00	(655.609.141,10)	83,97
5.1.10.1.10.01.2	BELANJA LANGSUNG	9.020.772.500,00	7.233.583.081,00	(1.787.189.419,00)	80,19
5.1.10.1.10.01.2.1	Belanja Pegawai	57.042.000,00	56.812.500,00	(229.500,00)	99,60
5.1.10.1.10.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.044.094.600,00	6.737.537.081,00	(1.306.557.519,00)	83,76
5.1.10.1.10.01.2.3	Belanja Modal	919.635.900,00	439.233.500,00	(480.402.400,00)	47,76
5.1.11.1.11.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.692.307.045,33	4.304.840.986,00	(387.466.059,33)	91,74
5.1.11.1.11.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.247.234.145,33	2.082.508.339,00	(164.725.806,33)	92,67
5.1.11.1.11.01.1.1	Belanja Pegawai	2.247.234.145,33	2.082.508.339,00	(164.725.806,33)	92,67
5.1.11.1.11.01.2	BELANJA LANGSUNG	2.445.072.900,00	2.222.332.647,00	(222.740.253,00)	90,89
5.1.11.1.11.01.2.1	Belanja Pegawai	94.815.000,00	90.913.500,00	(3.901.500,00)	95,89
5.1.11.1.11.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.093.470.800,00	1.878.032.047,00	(215.438.753,00)	89,71
5.1.11.1.11.01.2.3	Belanja Modal	256.787.100,00	253.387.100,00	(3.400.000,00)	98,68
5.1.12.1.12.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.363.239.377,25	8.419.017.171,00	(5.944.222.206,25)	58,62
5.1.12.1.12.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.927.720.327,25	4.944.584.479,00	(983.135.848,25)	83,41
5.1.12.1.12.01.1.1	Belanja Pegawai	5.927.720.327,25	4.944.584.479,00	(983.135.848,25)	83,41
5.1.12.1.12.01.2	BELANJA LANGSUNG	8.435.519.050,00	3.474.432.692,00	(4.961.086.358,00)	41,19
5.1.12.1.12.01.2.1	Belanja Pegawai	30.744.000,00	22.726.500,00	(8.017.500,00)	73,92
5.1.12.1.12.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.059.775.050,00	3.109.666.192,00	(4.950.108.858,00)	38,58
5.1.12.1.12.01.2.3	Belanja Modal	345.000.000,00	342.040.000,00	(2.960.000,00)	99,14
5.1.13.1.13.01	Dinas Sosial	13.711.257.327,75	11.358.225.550,00	(2.353.031.777,75)	82,84
5.1.13.1.13.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.662.639.827,75	3.072.094.067,00	(590.545.760,75)	83,88
5.1.13.1.13.01.1.1	Belanja Pegawai	3.662.639.827,75	3.072.094.067,00	(590.545.760,75)	83,88
5.1.13.1.13.01.2	BELANJA LANGSUNG	10.048.617.500,00	8.286.131.483,00	(1.762.486.017,00)	82,46
5.1.13.1.13.01.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
5.1.13.1.13.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.484.517.500,00	7.725.242.483,00	(1.759.275.017,00)	81,45
5.1.13.1.13.01.2.3	Belanja Modal	562.500.000,00	559.289.000,00	(3.211.000,00)	99,43
5.1.14.1.14.01	Dinas Ketenagakerjaan	8.367.004.442,80	7.699.535.266,00	(667.469.176,80)	92,02
5.1.14.1.14.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.182.210.942,80	3.958.640.210,00	(223.570.732,80)	94,65
5.1.14.1.14.01.1.1	Belanja Pegawai	4.182.210.942,80	3.958.640.210,00	(223.570.732,80)	94,65
5.1.14.1.14.01.2	BELANJA LANGSUNG	4.184.793.500,00	3.740.895.056,00	(443.898.444,00)	89,39
5.1.14.1.14.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.159.593.500,00	2.785.264.176,00	(374.329.324,00)	88,15
5.1.14.1.14.01.2.3	Belanja Modal	1.025.200.000,00	955.630.880,00	(69.569.120,00)	93,21
5.1.15.1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	7.495.084.999,60	6.537.808.220,00	(957.276.779,60)	87,23
5.1.15.1.15.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.305.164.999,60	2.808.562.026,00	(496.602.973,60)	84,97
5.1.15.1.15.01.1.1	Belanja Pegawai	3.305.164.999,60	2.808.562.026,00	(496.602.973,60)	84,97
5.1.15.1.15.01.2	BELANJA LANGSUNG	4.189.920.000,00	3.729.246.194,00	(460.673.806,00)	89,01
5.1.15.1.15.01.2.1	Belanja Pegawai	3.816.000,00	1.908.000,00	(1.908.000,00)	50,00
5.1.15.1.15.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.061.604.000,00	3.614.684.114,00	(446.919.886,00)	89,00
5.1.15.1.15.01.2.3	Belanja Modal	124.500.000,00	112.654.080,00	(11.845.920,00)	90,49
5.1.16.1.16.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.998.499.949,50	10.295.218.825,00	(1.703.281.124,50)	85,80
5.1.16.1.16.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.127.972.849,50	2.898.338.205,00	(229.634.644,50)	92,66
5.1.16.1.16.01.1.1	Belanja Pegawai	3.127.972.849,50	2.898.338.205,00	(229.634.644,50)	92,66
5.1.16.1.16.01.2	BELANJA LANGSUNG	8.870.527.100,00	7.396.880.620,00	(1.473.646.480,00)	83,39
5.1.16.1.16.01.2.1	Belanja Pegawai	29.357.000,00	0,00	(29.357.000,00)	0,00
5.1.16.1.16.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.412.297.600,00	4.033.522.920,00	(1.378.774.680,00)	74,53

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5.1.16.1.16.01.2.3	Belanja Modal	3.428.872.500,00	3.363.357.700,00	(65.514.800,00)	98,09
5.1.18.1.18.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	18.702.546.876,30	16.931.415.574,35	(1.771.131.301,95)	90,53
5.1.18.1.18.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.505.017.376,30	4.187.132.525,00	(317.884.851,30)	92,94
5.1.18.1.18.01.1.1	Belanja Pegawai	4.505.017.376,30	4.187.132.525,00	(317.884.851,30)	92,94
5.1.18.1.18.01.2	BELANJA LANGSUNG	14.197.529.500,00	12.744.283.049,35	(1.453.246.450,65)	89,76
5.1.18.1.18.01.2.1	Belanja Pegawai	7.785.000,00	7.366.500,00	(418.500,00)	94,62
5.1.18.1.18.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.129.969.500,00	10.773.506.549,35	(1.356.462.950,65)	88,82
5.1.18.1.18.01.2.3	Belanja Modal	2.059.775.000,00	1.963.410.000,00	(96.365.000,00)	95,32
5.1.19.1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.718.144.595,45	5.625.659.101,00	(1.092.485.494,45)	83,74
5.1.19.1.19.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.525.755.845,45	2.235.599.246,00	(290.156.599,45)	88,51
5.1.19.1.19.01.1.1	Belanja Pegawai	2.525.755.845,45	2.235.599.246,00	(290.156.599,45)	88,51
5.1.19.1.19.01.2	BELANJA LANGSUNG	4.192.388.750,00	3.390.059.855,00	(802.328.895,00)	80,86
5.1.19.1.19.01.2.1	Belanja Pegawai	45.450.000,00	33.300.000,00	(12.150.000,00)	73,27
5.1.19.1.19.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.002.738.750,00	3.215.079.855,00	(787.658.895,00)	80,32
5.1.19.1.19.01.2.3	Belanja Modal	144.200.000,00	141.680.000,00	(2.520.000,00)	98,25
5.1.19.1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	12.165.741.353,25	11.392.879.678,00	(772.861.675,25)	93,65
5.1.19.1.19.02.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.023.946.953,25	3.647.811.296,00	(376.135.657,25)	90,65
5.1.19.1.19.02.1.1	Belanja Pegawai	4.023.946.953,25	3.647.811.296,00	(376.135.657,25)	90,65
5.1.19.1.19.02.2	BELANJA LANGSUNG	8.141.794.400,00	7.745.068.382,00	(396.726.018,00)	95,13
5.1.19.1.19.02.2.1	Belanja Pegawai	131.000.000,00	128.787.000,00	(2.213.000,00)	98,31
5.1.19.1.19.02.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.708.094.400,00	7.315.336.382,00	(392.758.018,00)	94,90
5.1.19.1.19.02.2.3	Belanja Modal	302.700.000,00	300.945.000,00	(1.755.000,00)	99,42
5.1.19.1.19.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.229.351.141,95	11.651.100.771,00	(578.250.370,95)	95,27
5.1.19.1.19.03.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.914.387.141,95	2.667.862.374,00	(246.524.767,95)	91,54
5.1.19.1.19.03.1.1	Belanja Pegawai	2.914.387.141,95	2.667.862.374,00	(246.524.767,95)	91,54
5.1.19.1.19.03.2	BELANJA LANGSUNG	9.314.964.000,00	8.983.238.397,00	(331.725.603,00)	96,44
5.1.19.1.19.03.2.1	Belanja Pegawai	3.816.000,00	3.816.000,00	0,00	100,00
5.1.19.1.19.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.475.945.500,00	3.340.082.927,00	(135.862.573,00)	96,09
5.1.19.1.19.03.2.3	Belanja Modal	5.835.202.500,00	5.639.339.470,00	(195.863.030,00)	96,64
5.1.19.1.19.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.322.611.215,45	3.645.590.596,00	(677.020.619,45)	84,34
5.1.19.1.19.04.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.609.991.715,45	1.512.925.829,00	(97.065.886,45)	93,97
5.1.19.1.19.04.1.1	Belanja Pegawai	1.609.991.715,45	1.512.925.829,00	(97.065.886,45)	93,97
5.1.19.1.19.04.2	BELANJA LANGSUNG	2.712.619.500,00	2.132.664.767,00	(579.954.733,00)	78,62
5.1.19.1.19.04.2.1	Belanja Pegawai	219.018.000,00	206.564.000,00	(12.454.000,00)	94,31
5.1.19.1.19.04.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.465.601.500,00	1.898.400.767,00	(567.200.733,00)	77,00
5.1.19.1.19.04.2.3	Belanja Modal	28.000.000,00	27.700.000,00	(300.000,00)	98,93
5.1.20.1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.705.392.000,00	27.653.247.076,00	(1.052.144.924,00)	96,33
5.1.20.1.20.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	28.705.392.000,00	27.653.247.076,00	(1.052.144.924,00)	96,33
5.1.20.1.20.01.1.1	Belanja Pegawai	28.705.392.000,00	27.653.247.076,00	(1.052.144.924,00)	96,33
5.1.20.1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	772.437.734,40	616.851.664,00	(155.586.070,40)	79,86
5.1.20.1.20.02.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	772.437.734,40	616.851.664,00	(155.586.070,40)	79,86
5.1.20.1.20.02.1.1	Belanja Pegawai	772.437.734,40	616.851.664,00	(155.586.070,40)	79,86
5.1.20.1.20.03	Sekretariat Daerah	70.425.270.082,20	56.911.959.268,00	(13.513.310.814,20)	80,81
5.1.20.1.20.03.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.910.505.682,20	12.608.225.588,00	(3.302.280.094,20)	79,24
5.1.20.1.20.03.1.1	Belanja Pegawai	15.910.505.682,20	12.608.225.588,00	(3.302.280.094,20)	79,24
5.1.20.1.20.03.2	BELANJA LANGSUNG	54.514.764.400,00	44.303.733.680,00	(10.211.030.720,00)	81,27

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5.1.20.1.20.03.2.1	Belanja Pegawai	1.725.127.000,00	1.397.729.500,00	(327.397.500,00)	81,02
5.1.20.1.20.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.565.254.450,00	39.053.096.750,00	(4.512.157.700,00)	89,64
5.1.20.1.20.03.2.3	Belanja Modal	9.224.382.950,00	3.852.907.430,00	(5.371.475.520,00)	41,77
5.1.20.1.20.04	Sekretariat DPRD	71.751.539.291,70	68.817.321.764,00	(2.934.217.527,70)	95,91
5.1.20.1.20.04.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.938.135.291,70	3.593.264.282,00	(344.871.009,70)	91,24
5.1.20.1.20.04.1.1	Belanja Pegawai	3.938.135.291,70	3.593.264.282,00	(344.871.009,70)	91,24
5.1.20.1.20.04.2	BELANJA LANGSUNG	67.813.404.000,00	65.224.057.482,00	(2.589.346.518,00)	96,18
5.1.20.1.20.04.2.1	Belanja Pegawai	31.650.000,00	23.395.000,00	(8.255.000,00)	73,92
5.1.20.1.20.04.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.253.839.000,00	64.698.482.482,00	(2.555.356.518,00)	96,20
5.1.20.1.20.04.2.3	Belanja Modal	527.915.000,00	502.180.000,00	(25.735.000,00)	95,13
5.1.20.1.20.05	Inspektorat Daerah Kabupaten	15.683.457.377,37	13.218.017.179,00	(2.465.440.198,37)	84,28
5.1.20.1.20.05.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.287.439.677,37	7.179.239.947,00	(1.108.199.730,37)	86,63
5.1.20.1.20.05.1.1	Belanja Pegawai	8.287.439.677,37	7.179.239.947,00	(1.108.199.730,37)	86,63
5.1.20.1.20.05.2	BELANJA LANGSUNG	7.396.017.700,00	6.038.777.232,00	(1.357.240.468,00)	81,65
5.1.20.1.20.05.2.1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	0,00
5.1.20.1.20.05.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.026.817.700,00	5.712.273.732,00	(1.314.543.968,00)	81,29
5.1.20.1.20.05.2.3	Belanja Modal	340.400.000,00	326.503.500,00	(13.896.500,00)	95,92
5.1.20.1.20.06	Badan Pendapatan Daerah	23.681.606.844,90	18.056.945.441,45	(5.624.661.403,45)	76,25
5.1.20.1.20.06.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.697.779.644,90	10.353.565.030,45	(4.344.214.614,45)	70,44
5.1.20.1.20.06.1.1	Belanja Pegawai	14.697.779.644,90	10.353.565.030,45	(4.344.214.614,45)	70,44
5.1.20.1.20.06.2	BELANJA LANGSUNG	8.983.827.200,00	7.703.380.411,00	(1.280.446.789,00)	85,75
5.1.20.1.20.06.2.1	Belanja Pegawai	443.904.000,00	346.390.850,00	(97.513.150,00)	78,03
5.1.20.1.20.06.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.273.323.200,00	6.137.278.361,00	(1.136.044.839,00)	84,38
5.1.20.1.20.06.2.3	Belanja Modal	1.266.600.000,00	1.219.711.200,00	(46.888.800,00)	96,30
5.1.20.1.20.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.854.589.028,00	12.042.995.008,00	(1.811.594.020,00)	86,92
5.1.20.1.20.07.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.311.093.228,00	4.101.165.523,00	(209.927.705,00)	95,13
5.1.20.1.20.07.1.1	Belanja Pegawai	4.311.093.228,00	4.101.165.523,00	(209.927.705,00)	95,13
5.1.20.1.20.07.2	BELANJA LANGSUNG	9.543.495.800,00	7.941.829.485,00	(1.601.666.315,00)	83,22
5.1.20.1.20.07.2.1	Belanja Pegawai	497.099.000,00	481.708.000,00	(15.391.000,00)	96,90
5.1.20.1.20.07.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.914.396.800,00	7.328.169.485,00	(1.586.227.315,00)	82,21
5.1.20.1.20.07.2.3	Belanja Modal	132.000.000,00	131.952.000,00	(48.000,00)	99,96
5.1.20.1.20.08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	578.938.215.433,34	537.703.044.607,13	(41.235.170.826,21)	92,88
5.1.20.1.20.08.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	566.893.785.433,34	526.915.503.049,13	(39.978.282.384,21)	92,95
5.1.20.1.20.08.1.1	Belanja Pegawai	21.161.484.067,51	18.125.966.157,00	(3.035.517.910,51)	85,66
5.1.20.1.20.08.1.2	Belanja Bunga	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.08.1.3	Belanja Subsidi	7.130.417.545,00	4.816.417.265,00	(2.314.000.280,00)	67,55
5.1.20.1.20.08.1.4	Belanja Hibah	102.334.456.000,00	86.262.033.807,00	(16.072.422.193,00)	84,29
5.1.20.1.20.08.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.554.676.141,00	10.554.676.141,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.08.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	398.912.751.679,83	398.912.751.679,13	(0,70)	100,00
5.1.20.1.20.08.1.8	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	1.443.658.000,00	(18.556.342.000,00)	7,22
5.1.20.1.20.08.2	BELANJA LANGSUNG	12.044.430.000,00	10.787.541.558,00	(1.256.888.442,00)	89,56
5.1.20.1.20.08.2.1	Belanja Pegawai	3.076.295.000,00	2.961.062.000,00	(115.233.000,00)	96,25
5.1.20.1.20.08.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.989.382.000,00	6.874.315.598,00	(1.115.066.402,00)	86,04
5.1.20.1.20.08.2.3	Belanja Modal	978.753.000,00	952.163.960,00	(26.589.040,00)	97,28

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5.1.20.1.20.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.302.906.584,70	6.518.088.898,00	(784.817.686,70)	89,25
5.1.20.1.20.09.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.685.630.584,70	2.392.400.956,00	(293.229.628,70)	89,08
5.1.20.1.20.09.1.1	Belanja Pegawai	2.685.630.584,70	2.392.400.956,00	(293.229.628,70)	89,08
5.1.20.1.20.09.2	BELANJA LANGSUNG	4.617.276.000,00	4.125.687.942,00	(491.588.058,00)	89,35
5.1.20.1.20.09.2.1	Belanja Pegawai	3.816.000,00	3.151.500,00	(664.500,00)	82,59
5.1.20.1.20.09.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.942.085.000,00	3.471.826.442,00	(470.258.558,00)	88,07
5.1.20.1.20.09.2.3	Belanja Modal	671.375.000,00	650.710.000,00	(20.665.000,00)	96,92
5.1.20.1.20.11	Kecamatan Semende Darat Ulu	3.318.175.771,28	3.172.217.351,00	(145.958.420,28)	95,60
5.1.20.1.20.11.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.865.124.671,28	1.777.267.982,00	(87.856.689,28)	95,29
5.1.20.1.20.11.1.1	Belanja Pegawai	1.865.124.671,28	1.777.267.982,00	(87.856.689,28)	95,29
5.1.20.1.20.11.2	BELANJA LANGSUNG	1.453.051.100,00	1.394.949.369,00	(58.101.731,00)	96,00
5.1.20.1.20.11.2.1	Belanja Pegawai	5.724.000,00	5.724.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.11.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.265.027.100,00	1.207.275.369,00	(57.751.731,00)	95,43
5.1.20.1.20.11.2.3	Belanja Modal	182.300.000,00	181.950.000,00	(350.000,00)	99,81
5.1.20.1.20.12	Kecamatan Semende Darat Tengah	3.464.206.601,20	3.197.287.712,00	(266.918.889,20)	92,29
5.1.20.1.20.12.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.793.212.211,20	1.601.501.399,00	(191.710.812,20)	89,31
5.1.20.1.20.12.1.1	Belanja Pegawai	1.793.212.211,20	1.601.501.399,00	(191.710.812,20)	89,31
5.1.20.1.20.12.2	BELANJA LANGSUNG	1.670.994.390,00	1.595.786.313,00	(75.208.077,00)	95,50
5.1.20.1.20.12.2.1	Belanja Pegawai	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.12.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.669.182.390,00	1.593.974.313,00	(75.208.077,00)	95,49
5.1.20.1.20.13	Kecamatan Semende Darat Laut	3.080.044.678,83	2.908.604.618,00	(171.440.060,83)	94,43
5.1.20.1.20.13.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.631.860.178,83	1.555.459.443,00	(76.400.735,83)	95,32
5.1.20.1.20.13.1.1	Belanja Pegawai	1.631.860.178,83	1.555.459.443,00	(76.400.735,83)	95,32
5.1.20.1.20.13.2	BELANJA LANGSUNG	1.448.184.500,00	1.353.145.175,00	(95.039.325,00)	93,44
5.1.20.1.20.13.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.13.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.259.159.500,00	1.164.620.175,00	(94.539.325,00)	92,49
5.1.20.1.20.13.2.3	Belanja Modal	186.925.000,00	186.425.000,00	(500.000,00)	99,73
5.1.20.1.20.14	Kecamatan Tanjung Agung	5.800.658.343,10	5.440.943.552,00	(359.714.791,10)	93,80
5.1.20.1.20.14.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.211.505.803,10	2.059.162.606,00	(152.343.197,10)	93,11
5.1.20.1.20.14.1.1	Belanja Pegawai	2.211.505.803,10	2.059.162.606,00	(152.343.197,10)	93,11
5.1.20.1.20.14.2	BELANJA LANGSUNG	3.589.152.540,00	3.381.780.946,00	(207.371.594,00)	94,22
5.1.20.1.20.14.2.1	Belanja Pegawai	16.304.000,00	12.804.000,00	(3.500.000,00)	78,53
5.1.20.1.20.14.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.670.181.540,00	2.529.176.946,00	(141.004.594,00)	94,72
5.1.20.1.20.14.2.3	Belanja Modal	902.667.000,00	839.800.000,00	(62.867.000,00)	93,04
5.1.20.1.20.15	Kecamatan Lawang Kidul	7.567.121.038,16	6.547.198.002,00	(1.019.923.036,16)	86,52
5.1.20.1.20.15.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.521.471.988,16	3.764.315.963,00	(757.156.025,16)	83,25
5.1.20.1.20.15.1.1	Belanja Pegawai	4.521.471.988,16	3.764.315.963,00	(757.156.025,16)	83,25
5.1.20.1.20.15.2	BELANJA LANGSUNG	3.045.649.050,00	2.782.882.039,00	(262.767.011,00)	91,37
5.1.20.1.20.15.2.1	Belanja Pegawai	5.566.000,00	1.050.000,00	(4.516.000,00)	18,86
5.1.20.1.20.15.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.011.683.050,00	2.753.842.039,00	(257.841.011,00)	91,44
5.1.20.1.20.15.2.3	Belanja Modal	28.400.000,00	27.990.000,00	(410.000,00)	98,56
5.1.20.1.20.16	Kecamatan Muara Enim	11.301.565.878,51	10.354.718.408,00	(946.847.470,51)	91,62
5.1.20.1.20.16.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.657.426.428,51	5.813.972.311,00	(843.454.117,51)	87,33
5.1.20.1.20.16.1.1	Belanja Pegawai	6.657.426.428,51	5.813.972.311,00	(843.454.117,51)	87,33
5.1.20.1.20.16.2	BELANJA LANGSUNG	4.644.139.450,00	4.540.746.097,00	(103.393.353,00)	97,77
5.1.20.1.20.16.2.1	Belanja Pegawai	5.580.000,00	5.316.000,00	(264.000,00)	95,27
5.1.20.1.20.16.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.301.873.950,00	4.203.431.097,00	(98.442.853,00)	97,71

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5.1.20.1.20.16.2.3	Belanja Modal	336.685.500,00	331.999.000,00	(4.686.500,00)	98,61
5.1.20.1.20.17	Kecamatan Ujan Mas	3.238.485.059,10	2.936.424.203,00	(302.060.856,10)	90,67
5.1.20.1.20.17.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.968.080.159,10	1.703.574.952,00	(264.505.207,10)	86,56
5.1.20.1.20.17.1.1	Belanja Pegawai	1.968.080.159,10	1.703.574.952,00	(264.505.207,10)	86,56
5.1.20.1.20.17.2	BELANJA LANGSUNG	1.270.404.900,00	1.232.849.251,00	(37.555.649,00)	97,04
5.1.20.1.20.17.2.1	Belanja Pegawai	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.17.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.177.902.900,00	1.140.597.251,00	(37.305.649,00)	96,83
5.1.20.1.20.17.2.3	Belanja Modal	90.690.000,00	90.440.000,00	(250.000,00)	99,72
5.1.20.1.20.18	Kecamatan Benakat	2.883.599.644,10	2.781.131.860,00	(102.467.784,10)	96,45
5.1.20.1.20.18.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.857.786.344,10	1.793.282.234,00	(64.504.110,10)	96,53
5.1.20.1.20.18.1.1	Belanja Pegawai	1.857.786.344,10	1.793.282.234,00	(64.504.110,10)	96,53
5.1.20.1.20.18.2	BELANJA LANGSUNG	1.025.813.300,00	987.849.626,00	(37.963.674,00)	96,30
5.1.20.1.20.18.2.1	Belanja Pegawai	6.074.000,00	2.450.000,00	(3.624.000,00)	40,34
5.1.20.1.20.18.2.2	Belanja Barang dan Jasa	937.830.800,00	903.491.126,00	(34.339.674,00)	96,34
5.1.20.1.20.18.2.3	Belanja Modal	81.908.500,00	81.908.500,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.19	Kecamatan Gunung Megang	3.483.589.151,90	3.312.276.098,00	(171.313.053,90)	95,08
5.1.20.1.20.19.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.739.889.351,90	1.642.219.365,00	(97.669.986,90)	94,39
5.1.20.1.20.19.1.1	Belanja Pegawai	1.739.889.351,90	1.642.219.365,00	(97.669.986,90)	94,39
5.1.20.1.20.19.2	BELANJA LANGSUNG	1.743.699.800,00	1.670.056.733,00	(73.643.067,00)	95,78
5.1.20.1.20.19.2.1	Belanja Pegawai	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.19.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.524.879.800,00	1.452.455.833,00	(72.423.967,00)	95,25
5.1.20.1.20.19.2.3	Belanja Modal	213.000.000,00	211.780.900,00	(1.219.100,00)	99,43
5.1.20.1.20.20	Kecamatan Rambang Dangku	5.688.786.588,20	5.405.006.305,00	(283.780.283,20)	95,01
5.1.20.1.20.20.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.691.153.238,20	2.601.458.620,00	(89.694.618,20)	96,67
5.1.20.1.20.20.1.1	Belanja Pegawai	2.691.153.238,20	2.601.458.620,00	(89.694.618,20)	96,67
5.1.20.1.20.20.2	BELANJA LANGSUNG	2.997.633.350,00	2.803.547.685,00	(194.085.665,00)	93,53
5.1.20.1.20.20.2.1	Belanja Pegawai	3.624.000,00	0,00	(3.624.000,00)	0,00
5.1.20.1.20.20.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.314.609.350,00	2.131.963.454,00	(182.645.896,00)	92,11
5.1.20.1.20.20.2.3	Belanja Modal	679.400.000,00	671.584.231,00	(7.815.769,00)	98,85
5.1.20.1.20.21	Kecamatan Lubai	3.145.437.355,80	2.870.513.092,00	(274.924.263,80)	91,26
5.1.20.1.20.21.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.730.837.455,80	1.521.104.512,00	(209.732.943,80)	87,88
5.1.20.1.20.21.1.1	Belanja Pegawai	1.730.837.455,80	1.521.104.512,00	(209.732.943,80)	87,88
5.1.20.1.20.21.2	BELANJA LANGSUNG	1.414.599.900,00	1.349.408.580,00	(65.191.320,00)	95,39
5.1.20.1.20.21.2.1	Belanja Pegawai	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.21.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.260.071.900,00	1.195.410.580,00	(64.661.320,00)	94,87
5.1.20.1.20.21.2.3	Belanja Modal	151.000.000,00	150.470.000,00	(530.000,00)	99,65
5.1.20.1.20.22	Kecamatan Rambang	3.641.276.468,30	3.161.147.490,00	(480.128.978,30)	86,81
5.1.20.1.20.22.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.989.322.318,30	1.579.258.498,00	(410.063.820,30)	79,39
5.1.20.1.20.22.1.1	Belanja Pegawai	1.989.322.318,30	1.579.258.498,00	(410.063.820,30)	79,39
5.1.20.1.20.22.2	BELANJA LANGSUNG	1.651.954.150,00	1.581.888.992,00	(70.065.158,00)	95,76
5.1.20.1.20.22.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.502.479.150,00	1.433.388.992,00	(69.090.158,00)	95,40
5.1.20.1.20.22.2.3	Belanja Modal	149.475.000,00	148.500.000,00	(975.000,00)	99,35
5.1.20.1.20.23	Kecamatan Lembak	3.431.104.425,50	3.312.290.207,00	(118.814.218,50)	96,54
5.1.20.1.20.23.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.916.784.325,50	1.829.550.882,00	(87.233.443,50)	95,45
5.1.20.1.20.23.1.1	Belanja Pegawai	1.916.784.325,50	1.829.550.882,00	(87.233.443,50)	95,45
5.1.20.1.20.23.2	BELANJA LANGSUNG	1.514.320.100,00	1.482.739.325,00	(31.580.775,00)	97,91
5.1.20.1.20.23.2.1	Belanja Pegawai	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5.1.20.1.20.23.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.279.970.100,00	1.249.039.325,00	(30.930.775,00)	97,58
5.1.20.1.20.23.2.3	Belanja Modal	234.000.000,00	233.700.000,00	(300.000,00)	99,87
5.1.20.1.20.24	Kecamatan Kelekar	2.472.969.725,53	2.221.696.734,00	(251.272.991,53)	89,84
5.1.20.1.20.24.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.429.546.590,53	1.285.141.509,00	(144.405.081,53)	89,90
5.1.20.1.20.24.1.1	Belanja Pegawai	1.429.546.590,53	1.285.141.509,00	(144.405.081,53)	89,90
5.1.20.1.20.24.2	BELANJA LANGSUNG	1.043.423.135,00	936.555.225,00	(106.867.910,00)	89,76
5.1.20.1.20.24.2.1	Belanja Pegawai	2.712.000,00	0,00	(2.712.000,00)	0,00
5.1.20.1.20.24.2.2	Belanja Barang dan Jasa	970.711.135,00	867.055.225,00	(103.655.910,00)	89,32
5.1.20.1.20.24.2.3	Belanja Modal	70.000.000,00	69.500.000,00	(500.000,00)	99,29
5.1.20.1.20.25	Kecamatan Gelumbang	5.784.312.351,40	5.137.872.676,00	(646.439.675,40)	88,82
5.1.20.1.20.25.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.958.377.201,40	2.585.791.008,00	(372.586.193,40)	87,41
5.1.20.1.20.25.1.1	Belanja Pegawai	2.958.377.201,40	2.585.791.008,00	(372.586.193,40)	87,41
5.1.20.1.20.25.2	BELANJA LANGSUNG	2.825.935.150,00	2.552.081.668,00	(273.853.482,00)	90,31
5.1.20.1.20.25.2.1	Belanja Pegawai	5.662.000,00	5.659.000,00	(3.000,00)	99,95
5.1.20.1.20.25.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.607.298.150,00	2.333.747.668,00	(273.550.482,00)	89,51
5.1.20.1.20.25.2.3	Belanja Modal	212.975.000,00	212.675.000,00	(300.000,00)	99,86
5.1.20.1.20.26	Kecamatan Sungai Rotan	4.690.765.957,60	3.874.767.972,00	(815.997.985,60)	82,60
5.1.20.1.20.26.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.486.357.557,60	1.890.690.237,00	(595.667.320,60)	76,04
5.1.20.1.20.26.1.1	Belanja Pegawai	2.486.357.557,60	1.890.690.237,00	(595.667.320,60)	76,04
5.1.20.1.20.26.2	BELANJA LANGSUNG	2.204.408.400,00	1.984.077.735,00	(220.330.665,00)	90,00
5.1.20.1.20.26.2.1	Belanja Pegawai	3.624.000,00	0,00	(3.624.000,00)	0,00
5.1.20.1.20.26.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.948.484.400,00	1.732.087.735,00	(216.396.665,00)	88,89
5.1.20.1.20.26.2.3	Belanja Modal	252.300.000,00	251.990.000,00	(310.000,00)	99,88
5.1.20.1.20.27	Kecamatan Muara Belida	2.720.597.943,50	2.502.728.219,00	(217.869.724,50)	91,99
5.1.20.1.20.27.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.469.000.243,50	1.313.289.511,00	(155.710.732,50)	89,40
5.1.20.1.20.27.1.1	Belanja Pegawai	1.469.000.243,50	1.313.289.511,00	(155.710.732,50)	89,40
5.1.20.1.20.27.2	BELANJA LANGSUNG	1.251.597.700,00	1.189.438.708,00	(62.158.992,00)	95,03
5.1.20.1.20.27.2.1	Belanja Pegawai	3.624.000,00	1.812.000,00	(1.812.000,00)	50,00
5.1.20.1.20.27.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.148.773.700,00	1.089.993.708,00	(58.779.992,00)	94,88
5.1.20.1.20.27.2.3	Belanja Modal	99.200.000,00	97.633.000,00	(1.567.000,00)	98,42
5.1.20.1.20.28	Kecamatan Belimbing	3.269.440.136,85	2.927.352.613,00	(342.087.523,85)	89,54
5.1.20.1.20.28.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.834.139.936,85	1.564.226.115,00	(269.913.821,85)	85,28
5.1.20.1.20.28.1.1	Belanja Pegawai	1.834.139.936,85	1.564.226.115,00	(269.913.821,85)	85,28
5.1.20.1.20.28.2	BELANJA LANGSUNG	1.435.300.200,00	1.363.126.498,00	(72.173.702,00)	94,97
5.1.20.1.20.28.2.1	Belanja Pegawai	5.216.000,00	5.072.000,00	(144.000,00)	97,24
5.1.20.1.20.28.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.084.200,00	1.228.454.498,00	(71.629.702,00)	94,49
5.1.20.1.20.28.2.3	Belanja Modal	130.000.000,00	129.600.000,00	(400.000,00)	99,69
5.1.20.1.20.29	Kecamatan Belida Darat	3.052.967.095,17	2.873.851.272,00	(179.115.823,17)	94,13
5.1.20.1.20.29.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.650.678.095,17	1.539.886.398,00	(110.791.697,17)	93,29
5.1.20.1.20.29.1.1	Belanja Pegawai	1.650.678.095,17	1.539.886.398,00	(110.791.697,17)	93,29
5.1.20.1.20.29.2	BELANJA LANGSUNG	1.402.289.000,00	1.333.964.874,00	(68.324.126,00)	95,13
5.1.20.1.20.29.2.1	Belanja Pegawai	3.812.000,00	1.794.000,00	(2.018.000,00)	47,06
5.1.20.1.20.29.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.264.677.000,00	1.204.870.874,00	(59.806.126,00)	95,27
5.1.20.1.20.29.2.3	Belanja Modal	133.800.000,00	127.300.000,00	(6.500.000,00)	95,14
5.1.20.1.20.30	Kecamatan Lubai Ulu	2.920.509.999,00	2.585.165.948,00	(335.344.051,00)	88,52
5.1.20.1.20.30.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.392.124.799,00	1.164.629.919,00	(227.494.880,00)	83,66
5.1.20.1.20.30.1.1	Belanja Pegawai	1.392.124.799,00	1.164.629.919,00	(227.494.880,00)	83,66
5.1.20.1.20.30.2	BELANJA LANGSUNG	1.528.385.200,00	1.420.536.029,00	(107.849.171,00)	92,94

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5.1.20.1.20.30.2.1	Belanja Pegawai	5.628.000,00	2.100.000,00	(3.528.000,00)	37,31
5.1.20.1.20.30.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.368.866.400,00	1.265.336.029,00	(103.530.371,00)	92,44
5.1.20.1.20.30.2.3	Belanja Modal	153.890.800,00	153.100.000,00	(790.800,00)	99,49
5.1.21.1.21.01	Dinas Ketahanan Pangan	8.585.922.828,80	7.662.798.358,00	(923.124.470,80)	89,25
5.1.21.1.21.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.103.489.178,80	2.926.777.961,00	(176.711.217,80)	94,31
5.1.21.1.21.01.1.1	Belanja Pegawai	3.103.489.178,80	2.926.777.961,00	(176.711.217,80)	94,31
5.1.21.1.21.01.2	BELANJA LANGSUNG	5.482.433.650,00	4.736.020.397,00	(746.413.253,00)	86,39
5.1.21.1.21.01.2.1	Belanja Pegawai	288.080.000,00	203.918.500,00	(84.161.500,00)	70,79
5.1.21.1.21.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.948.153.650,00	4.292.829.147,00	(655.324.503,00)	86,76
5.1.21.1.21.01.2.3	Belanja Modal	246.200.000,00	239.272.750,00	(6.927.250,00)	97,19
5.1.22.1.22.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.488.616.525,80	22.712.627.646,00	(775.988.879,80)	96,70
5.1.22.1.22.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.118.001.025,80	3.979.211.894,00	(138.789.131,80)	96,63
5.1.22.1.22.01.1.1	Belanja Pegawai	4.118.001.025,80	3.979.211.894,00	(138.789.131,80)	96,63
5.1.22.1.22.01.2	BELANJA LANGSUNG	19.370.615.500,00	18.733.415.752,00	(637.199.748,00)	96,71
5.1.22.1.22.01.2.1	Belanja Pegawai	333.673.000,00	291.665.000,00	(42.008.000,00)	87,41
5.1.22.1.22.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.526.342.500,00	16.996.349.852,00	(529.992.648,00)	96,98
5.1.22.1.22.01.2.3	Belanja Modal	1.510.600.000,00	1.445.400.900,00	(65.199.100,00)	95,68
5.1.25.1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.786.648.255,30	9.347.809.262,00	(1.438.838.993,30)	86,66
5.1.25.1.25.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.689.444.555,30	3.102.017.688,00	(587.426.867,30)	84,08
5.1.25.1.25.01.1.1	Belanja Pegawai	3.689.444.555,30	3.102.017.688,00	(587.426.867,30)	84,08
5.1.25.1.25.01.2	BELANJA LANGSUNG	7.097.203.700,00	6.245.791.574,00	(851.412.126,00)	88,00
5.1.25.1.25.01.2.1	Belanja Pegawai	150.270.000,00	149.594.000,00	(676.000,00)	99,55
5.1.25.1.25.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.242.200,00	5.110.532.614,00	(839.709.586,00)	85,89
5.1.25.1.25.01.2.3	Belanja Modal	996.691.500,00	985.664.960,00	(11.026.540,00)	98,89
5.1.26.1.26.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.932.795.027,40	7.089.823.854,00	(842.971.173,40)	89,37
5.1.26.1.26.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.298.496.127,40	3.749.024.919,00	(549.471.208,40)	87,22
5.1.26.1.26.01.1.1	Belanja Pegawai	4.298.496.127,40	3.749.024.919,00	(549.471.208,40)	87,22
5.1.26.1.26.01.2	BELANJA LANGSUNG	3.634.298.900,00	3.340.798.935,00	(293.499.965,00)	91,92
5.1.26.1.26.01.2.1	Belanja Pegawai	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00
5.1.26.1.26.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.477.239.070,00	3.186.122.855,00	(291.116.215,00)	91,63
5.1.26.1.26.01.2.3	Belanja Modal	153.939.830,00	151.556.080,00	(2.383.750,00)	98,45
5.2.01.2.01.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	47.907.338.728,80	41.489.341.254,00	(6.417.997.474,80)	86,60
5.2.01.2.01.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.417.190.228,80	16.877.061.452,00	(540.128.776,80)	96,90
5.2.01.2.01.01.1.1	Belanja Pegawai	17.417.190.228,80	16.877.061.452,00	(540.128.776,80)	96,90
5.2.01.2.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	30.490.148.500,00	24.612.279.802,00	(5.877.868.698,00)	80,72
5.2.01.2.01.01.2.1	Belanja Pegawai	43.542.000,00	43.420.500,00	(121.500,00)	99,72
5.2.01.2.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.190.356.500,00	21.382.549.102,00	(5.807.807.398,00)	78,64
5.2.01.2.01.01.2.3	Belanja Modal	3.256.250.000,00	3.186.310.200,00	(69.939.800,00)	97,85
5.2.01.2.01.02	Dinas Perkebunan	18.118.369.218,60	15.656.657.699,00	(2.461.711.519,60)	86,41
5.2.01.2.01.02.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.495.961.418,60	7.098.802.653,00	(1.397.158.765,60)	83,56
5.2.01.2.01.02.1.1	Belanja Pegawai	8.495.961.418,60	7.098.802.653,00	(1.397.158.765,60)	83,56
5.2.01.2.01.02.2	BELANJA LANGSUNG	9.622.407.800,00	8.557.855.046,00	(1.064.552.754,00)	88,94
5.2.01.2.01.02.2.1	Belanja Pegawai	8.780.000,00	8.715.000,00	(65.000,00)	99,26
5.2.01.2.01.02.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.598.627.800,00	8.536.240.046,00	(1.062.387.754,00)	88,93
5.2.01.2.01.02.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	12.900.000,00	(2.100.000,00)	86,00
5.2.05.2.05.01	Dinas Perikanan	9.876.749.108,70	9.154.704.271,00	(722.044.837,70)	92,69

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5.2.05.2.05.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.864.638.116,70	3.740.331.460,00	(124.306.656,70)	96,78
5.2.05.2.05.01.1.1	Belanja Pegawai	3.864.638.116,70	3.740.331.460,00	(124.306.656,70)	96,78
5.2.05.2.05.01.2	BELANJA LANGSUNG	6.012.110.992,00	5.414.372.811,00	(597.738.181,00)	90,06
5.2.05.2.05.01.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
5.2.05.2.05.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.716.923.000,00	4.195.821.670,00	(521.101.330,00)	88,95
5.2.05.2.05.01.2.3	Belanja Modal	1.293.187.992,00	1.216.551.141,00	(76.636.851,00)	94,07
5.2.06.2.06.01	Dinas Perdagangan	41.795.337.273,00	38.382.933.082,00	(3.412.404.191,00)	91,84
5.2.06.2.06.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.913.595.923,00	4.778.044.540,00	(135.551.383,00)	97,24
5.2.06.2.06.01.1.1	Belanja Pegawai	4.913.595.923,00	4.778.044.540,00	(135.551.383,00)	97,24
5.2.06.2.06.01.2	BELANJA LANGSUNG	36.881.741.350,00	33.604.888.542,00	(3.276.852.808,00)	91,12
5.2.06.2.06.01.2.1	Belanja Pegawai	23.180.000,00	15.882.000,00	(7.298.000,00)	68,52
5.2.06.2.06.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.232.660.250,00	20.167.222.896,00	(2.065.437.354,00)	90,71
5.2.06.2.06.01.2.3	Belanja Modal	14.625.901.100,00	13.421.783.646,00	(1.204.117.454,00)	91,77
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.20.1.20.08.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	195.172.898.761,58	195.172.898.761,58	0,00	100,00
6.1.20.1.20.08.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	125.172.898.761,58	125.172.898.761,58	0,00	100,00
6.1.20.1.20.08.1.2	Pencairan Dana Cadangan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	100,00
6.1.20.1.20.08.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.139.258.064,52	3.139.258.064,52	0,00	100,00
6.1.20.1.20.08.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.20.1.20.08.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.20.1.20.08.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	3.139.258.064,52	3.139.258.064,52	0,00	100,00
6.1.20.1.20.08.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.20.1.20.08.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	283.257.160.695,47	283.257.160.695,47	0,00
6.1.20.1.20.08.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	283.257.160.695,47	283.257.160.695,47	0,00

7.2.4 Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk Mengatasi Permasalahan yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam penggalian potensi pendapatan daerah tahun 2018 antara lain:

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
- 2) Masih terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan perpajakan;
- 3) Masih terjadinya inkonsistensi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan transfer Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi, sehingga pagu yang dituangkan dalam Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur tidak ditransfer 100% pada tahun berjalan; dan

- 4) Belum optimalnya koordinasi instansi terkait dalam mendapatkan dana penyeimbang/kontijensi dan hibah dari Pemerintah Pusat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan secara intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak / wajib retribusi dan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sampai ke tingkat kecamatan dan desa;
- 3) Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 4) Menerbitkan surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tanggal 16 April 2018 Nomor 973/694/Bapenda-2/2018 perihal Himbauan Pembayaran Rekening Listrik ditujukan kepada Camat Muara Enim, Camat Lawang Kidul, Camat Ujan Mas, Camat Tanjung Agung dan Camat Semende;
- 5) Menerbitkan Surat Bupati Muara Enim tanggal 24 April 2018 Nomor 973/0579/X.Bapenda-III/2018 hal PBB P2 ditujukan kepada unsur musyawarah Pimpinan Daerah, OPD, Lurah, dan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim;
- 6) Menerbitkan surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tanggal 29 Juni 2018 Nomor 973/1070/Bapenda-II/2018 hal Data Objek dan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet;
- 7) Menerbitkan Surat Edaran Pj. Bupati Muara Enim tanggal 2 Juli 2018 Nomor: 973/0808/X/Bapenda-III/2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten Muara Enim dan Badan Usaha lingkup Kabupaten Muara Enim;
- 8) Menerbitkan Surat Edaran Pj. Bupati Muara Enim tanggal 7 September 2018 Nomor: 970/1096/X/Bapenda-III/2018 hal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditujukan kepada seluruh OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- 9) Menerbitkan Surat Bupati Muara Enim tanggal 28 September 2018 Nomor: 973/1153/X/Bapenda-II/2018 hal Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 Tahun 2018 ditujukan kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, Pimpinan Bank Penerima PBB P2, Kepala UPT Pendapatan dan seluruh wajib pajak PBB-P2 dalam wilayah Kabupaten Muara Enim;
- 10) Menerbitkan Surat Edaran Bupati Muara Enim tanggal 31 Oktober 2018 Nomor: 973/1302/X/Bapenda-II/2018 tentang Kepemilikan Hak Lahan dan Bangunan BUMN, BUMS dan BUMD dalam Kabupaten Muara Enim.

b. Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2018 antara lain:

- 1) Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur dalam mengelola/memanajemen kegiatan dan administrasi keuangan; dan
- 2) Masih rendahnya profesionalisme penyedia jasa pembangunan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui Peningkatan Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan program dan kegiatan serta administrasi keuangan; dan
- 2) Melakukan pembinaan kepada penyedia jasa pembangunan.

7.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

Penyajian Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari RKUD.

Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari RKUD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD mengacu kepada Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah yaitu:

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada RKUD. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan-LRA. Untuk pengembalian atas kelebihan pengakuan pendapatan-LRA, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan-LRA dalam periode berjalan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran RKUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Untuk pengembalian atas kelebihan pengakuan belanja, dilakukan dengan pembetulan pada akun belanja dalam periode berjalan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau a

kan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak dan/atau pada saat kas diterima pada RKUD. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO disajikan sesuai dengan jenis pendapatan-LO.

e. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengurangi kekayaan bersih (ekuitas), yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

f. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan

pertambahan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

1) **Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Dan Piutang dicatat sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Adapun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
- b) Kualitas Kurang Lancar prosentase penyisihan Piutang adalah 10%;
- c) Kualitas Diragukan tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 50%;
- d) Kualitas Macet tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di Neraca berdasarkan:

- a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah hak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kabupaten Muara Enim per 31 Desember 2018 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak masuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan daerah, pemerintah daerah, pihak ketiga lainnya dan Investasi Non Permanen Dana Bergulir.

Adapun *Aging Schedule* dan besarnya penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih sebagai berikut:

- a) Umur Dana Bergulir s.d. 1 tahun prosentase penyisihannya adalah 0,5%;
- b) Umur Dana Bergulir 1 s.d. 2 tahun prosentase penyisihannya adalah 10%;
- c) Umur Dana Bergulir 2 s.d. 5 tahun prosentase penyisihannya adalah 50%;
- d) Umur Dana Bergulir >5 tahun prosentase penyisihannya adalah 100%.

Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Kebijakan terhadap Penilaian Investasi Permanen di Kabupaten Muara Enim menggunakan metode ekuitas.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

3) Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dilaporkan pada Neraca per 31 Desember 2018 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu pengeluaran untuk per satuan aset tetap yang nilainya memenuhi kriteria/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	300.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	300.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Keamanan	500.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000
4.3	Instalasi	10.000.000
4.4	Jaringan	10.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	20.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	500.000
	b. Ternak	500.000
	c. Tumbuhan Pohon	500.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Masa Manfaat Aset

Kodifikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3		ASET TETAP	
1	3	1	Tanah	Tidak Disusutkan
1	3	2	Peralatan dan Mesin	
1	3	2 01	Alat – Alat Besar Darat	10

1	3	2	02	Alat – Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat – Alat Bantu	8
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	5
1	3	2	08	AlatAngkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	8
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	5
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan Pertanian	5
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	5
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit- Unit Labororium	5
1	3	2	24	Alat Peraga / Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Labororium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Labororium Fisika Nuklir / Elektronik	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Labororium Lingkungan Hidup	8
1	3	2	30	Peralatan Labororium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
1	3	3	03	Bangunan Menara	20
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	40
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen / Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	40
				Kodifikasi	Uraian
					Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	10	Rambu-Rambu	20
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	20
1	3	4	02	Jembatan	20
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	30

1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	30
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih / Baku	30
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	30
1	3	4	10	Bangunan Air	30
1	3	4	11	Instalasi Air Minum / Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	20
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	01	Buku Perpustakaan	Tidak Disusutkan
1	3	5	02	Terbitan	Tidak Disusutkan
1	3	5	03	Barang Perpustakaan	5
1	3	5	04	Barang Bercorak Kebudayaan/ Kesenian/Olahraga	5
1	3	5	05	Alat Olahraga lainnya	5
1	3	5	06	Hewan	Tidak Disusutkan
1	3	5	07	Tanaman	Tidak Disusutkan
1	3	6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

Khusus Aset tetap yang mengalami *overhaul* / renovasi / perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 4 Penambahan Masa Manfaat

Uraian Jenis Aset	Jenis Kapitalisasi	Persentase *)	Penambahan Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin / Aset Tetap Lainnya	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	12 Bulan/1 Tahun
		>25% s.d 50%	24 Bulan/2 Tahun
		>50% s.d 75%	36 Bulan/3 Tahun
		>75% s.d 100%	48 Bulan/4 Tahun
		>100%	48 Bulan/4 Tahun
Bangunan dan Gedung / Jalan dan Jembatan Lainnya	Renovasi	>0% s.d 25%	24 Bulan/2 Tahun
		>25% s.d 50%	48 Bulan/4 Tahun
		>50% s.d 75%	72 Bulan/6 Tahun
		>75% s.d 100%	96 Bulan/8 Tahun
		>100%	96 Bulan/8 Tahun

*) Penjelasan Persentase:

Persentase Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap diperoleh dari pembagian Nilai Renovasi/*Overhaul* dibagi Nilai Perolehan Aset Tetap. Hasil Persentase penambahan

disesuaikan dengan Tabel Penambahan Masa Manfaat.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Penambahan} \\ (\%) \end{array} = \frac{\text{Nilai Renovasi/Overhaul (Rp)}}{\text{Nilai Perolehan (Rp)}} \times 100\%$$

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaan merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Umur Ekonomis Aset Tak Berwujud untuk yang memiliki manfaat terbatas (*finite life*) adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	5				ASET LAINNYA	
1	5	X			Aset Tidak Berwujud (ATB)	
1	5	X	XX		Aset Tidak Berwujud	
1	5	X	XX	XX	Software	5
1	3	X	XX	XX	Kajian Teknis	8

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS), di samping yang dialihkan.

g. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar untuk jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Pendapatan Diterima dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

h. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban Kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

i. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

j. Selisih Kurs

Menurut SAP, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

7.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

7.4.1.1 PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2018 sebesar Rp2.446.145.604.398,76 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim TA 2018. Target pendapatan tersebut terealisasi sebesar Rp2.525.583.634.051,30 atau 103,25%. Komposisi pencapaian realisasi per kelompok pendapatan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6 Realisasi Pendapatan - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	227.589.318.925,71	232.468.708.584,45	102,14	226.929.233.264,54
Pendapatan Transfer	1.856.456.872.473,05	1.931.184.840.783,12	104,03	1.869.134.759.810,78
Lain-lain Pendapatan yang Sah	362.099.413.000,00	361.930.084.683,73	99,95	306.286.267.431,94
Jumlah	2.446.145.604.398,76	2.525.583.634.051,30	103,25	2.402.350.260.507,26

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 sebesar Rp2.525.583.634.051,30 atau 103,25% dari anggarannya sebesar Rp2.446.145.604.398,76 dan mengalami kenaikan sebesar Rp123.233.373.544,04 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.402.350.260.507,26.

a. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 serta realisasi TA 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pajak Daerah	95.382.083.081,00	69.037.972.075,62	72,38	62.718.676.208,53
Retribusi Daerah	10.164.678.326,00	24.515.827.175,08	241,19	10.501.181.769,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.160.828.134,66	17.160.828.134,66	100,00	8.390.341.277,82
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	104.881.729.384,05	121.754.081.199,09	116,09	145.319.034.009,19
Jumlah	227.589.318.925,71	232.468.708.584,45	102,14	226.929.233.264,54

Realisasi PAD TA 2018 sebesar Rp232.468.708.584,45 atau 102,14% dari anggarannya sebesar Rp227.589.318.925,71 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.539.475.319,91 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp226.929.233.264,54.

Dalam realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah termasuk realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola langsung oleh RSUD dr. H. M. Raba'in, dan penerimaan Dana Kapitasi untuk Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP/puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Muara Enim. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait sebagai unit penghasil. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pajak Hotel	1.225.815.688,00	1.417.001.166,00	115,60	947.926.666,00
Pajak Restoran	6.900.468.000,00	7.371.460.935,00	106,83	6.177.067.026,00
Pajak Hiburan	257.003.864,00	242.333.217,00	94,29	285.362.896,00
Pajak Reklame	738.050.000,00	753.526.602,00	102,10	755.024.242,00
Pajak Penerangan Jalan	29.962.000.000,00	32.390.419.189,00	108,10	29.389.069.025,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.500.000.000,00	12.457.231.407,00	191,65	7.251.589.067,00
Pajak Air Bawah Tanah	50.000.000,00	243.706.068,00	487,41	41.341.569,00
Pajak Sarang Burung Walet	55.000.000,00	59.412.000,00	108,02	62.708.800,00
PBB Perdesaan dan Perkotaan	11.693.745.529,00	9.346.051.075,00	79,92	9.056.378.146,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	38.000.000.000,00	4.756.830.416,62	12,52	8.752.208.771,53
Jumlah	95.382.083.081,00	69.037.972.075,62	72,38	62.718.676.208,53

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari 10 jenis Pendapatan Pajak Daerah, ada 3 (tiga) jenis pajak yang tidak mencapai target yang dianggarkan, yaitu Pajak Hiburan, PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2018 sebesar Rp69.037.972.075,62 atau 72,38% dari anggarannya sebesar Rp95.382.083.081,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.319.295.867,09 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp62.718.676.208,53. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan pajak hotel TA 2018 sebesar Rp1.417.001.166,00 atau 115,60% dari anggarannya sebesar Rp1.225.815.688,00.
- Realisasi pendapatan pajak restoran TA 2018 sebesar Rp7.371.460.935,00 atau 106,83% dari anggarannya sebesar Rp6.900.468.000,00.
- Realisasi pendapatan pajak hiburan TA 2018 sebesar Rp242.333.217,00 atau 94,29% dari anggarannya sebesar Rp257.003.864,00.
- Realisasi pendapatan pajak reklame TA 2018 sebesar Rp753.526.602,00 atau 102,10% dari anggarannya sebesar Rp738.050.000,00.
- Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2018 sebesar Rp32.390.419.189,00 atau 108,10% dari anggarannya sebesar Rp29.962.000.000,00.
- Realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2018 sebesar Rp12.457.231.407,00 atau 191,65% dari anggarannya sebesar Rp6.500.000.000,00.

- g) Realisasi pendapatan pajak air bawah tanah TA 2018 sebesar Rp243.706.068,00 atau 487,41% dari anggarannya sebesar Rp50.000.000,00.
- h) Realisasi pendapatan pajak sarang burung walet TA 2018 sebesar Rp59.412.000,00 atau 108,02% dari anggarannya sebesar Rp55.000.000,00.
- i) Realisasi pendapatan PBB P2 TA 2018 sebesar Rp9.346.051.075,00 atau 79,92% dari anggarannya sebesar Rp11.693.745.529,00.
- j) Realisasi pendapatan BPHTB TA 2018 sebesar Rp4.756.830.416,62 atau 12,52% dari anggarannya sebesar Rp38.000.000.000,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Muara Enim dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait sebagai unit penghasil. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	2.763.762.000,00	4.061.959.459,08	146,97	2.702.140.465,00
Retribusi Jasa Usaha	1.725.086.326,00	1.851.858.416,00	107,35	1.637.369.304,00
Retribusi Perizinan Tertentu	5.675.830.000,00	18.602.009.300,00	327,74	6.161.672.000,00
Jumlah	10.164.678.326,00	24.515.827.175,08	241,19	10.501.181.769,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 sebesar Rp24.515.827.175,08 atau 241,19% dari anggarannya sebesar Rp10.164.678.326,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp14.014.645.406,08 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp10.501.181.769,00. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan jenis retribusi yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Realisasi Retribusi Jasa Umum - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	383.772.000,00	464.102.000,00	120,93	310.989.000,00
Retribusi Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	217.170.000,00	108,59	193.965.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	623.400.000,00	723.371.000,00	116,04	184.100.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	796.500.000,00	801.968.000,00	100,69	998.137.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	510.090.000,00	505.126.000,00	99,03	569.521.400,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	1.350.222.459,08	540,09	445.428.065,00
Jumlah	2.763.762.000,00	4.061.959.459,08	146,97	2.702.140.465,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari enam jenis Retribusi Jasa Umum, hanya terdapat satu jenis retribusi yang tidak mencapai target, yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2018 sebesar Rp4.061.959.459,08 atau 146,97% dari anggarannya sebesar Rp2.763.762.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.359.818.994,08 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.702.140.465,00.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan jenis retribusi yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi Retribusi Jasa Usaha - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1.013.884.326,00	1.042.780.060,00	102,85	994.230.304,00
Retribusi Terminal	73.960.000,00	61.347.666,00	82,95	75.249.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa (SKB)	14.400.000,00	22.662.000,00	157,38	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	170.580.000,00	199.596.700,00	117,01	111.152.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	263.662.000,00	334.621.000,00	126,91	278.213.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	47.000.000,00	42.300.000,00	90,00	30.025.000,00
Retribusi Benih Ikan	120.000.000,00	122.150.990,00	101,79	120.600.000,00
Retribusi Sewa Bus	21.600.000,00	26.400.000,00	122,22	27.900.000,00
Jumlah	1.725.086.326,00	1.851.858.416,00	107,35	1.637.369.304,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari delapan jenis retribusi jasa usaha, terdapat dua jenis retribusi yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Terminal dan Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan kakus.

Retribusi Jasa Usaha TA 2018 sebesar Rp1.851.858.416,00 atau 107,35% dari anggarannya sebesar Rp1.725.086.326,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp214.489.112,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.637.369.304,00.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan jenis retribusi yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12 Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.100.000.000,00	17.853.881.700,00	350,08	3.024.542.800,00
Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian	2.600.000,00	0,00	0,00	2.128.974.200,00
Retribusi Pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga Kerja Asing	573.230.000,00	748.127.600,00	130,51	1.008.155.000,00
Jumlah	5.675.830.000,00	18.602.009.300,00	327,74	6.161.672.000,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari tiga jenis retribusi perizinan tertentu, terdapat satu jenis retribusi perizinan tertentu yang tidak terealisasi yaitu retribusi izin gangguan/ keramaian.

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2018 sebesar Rp18.602.009.300,00 atau 327,74% dari anggarannya sebesar Rp5.675.830.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.440.337.300,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp6.161.672.000,00.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah yang merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non-Bank dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muara Enim.

Anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2018 serta realisasi TA 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 13 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah	5.928.866.279,77	5.928.866.279,77	100,00	6.270.961.729,77
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah	11.231.961.854,89	11.231.961.854,89	100,00	2.119.379.548,05
Jumlah	17.160.828.134,66	17.160.828.134,66	100,00	8.390.341.277,82

Realisasi bagian laba dari penyertaan modal TA 2018 sebesar Rp17.160.828.134,66 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp17.160.828.134,66 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.770.486.856,84 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp8.390.341.277,82. Realisasi penerimaan tersebut seluruhnya merupakan dividen Tahun 2017 yang baru diterima pada Tahun 2018 setelah Laporan Keuangan PD/BUMD Tahun 2017 yang terkait selesai diaudit oleh akuntan publik dan telah disetujui serta disahkan dalam RUPS Perseroan pada Tahun 2018.

Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD/BUMD, Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD/BUMD

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
I	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah	
a	Bank SumselBabel	5.928.866.279,77
	Jumlah 1	5.928.866.279,77
II	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah	
a	PT Bank BRI, Tbk.	169.727.524,89
b	PT Bukit Asam, Tbk.	11.062.234.330,00
	Jumlah 2	11.231.961.854,89
	Total (Jumlah 1 + Jumlah 2)	17.160.828.134,66

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain PAD yang sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah. Anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2018 dan realisasi TA 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	24.000.000,00	930.114.450,00	3.875,48	0,00
Penerimaan Jasa Giro	1.750.000.000,00	3.709.112.879,66	211,95	3.305.961.389,40
Penerimaan Bunga Deposito	6.000.000.000,00	22.198.685.230,55	369,98	4.206.479.707,52
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	8.000.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	25.519.292,00	0,00	1.091.000,00
Pendapatan Denda Pajak	36.059.953,00	413.094.493,00	1.145,58	236.576.403,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	233.755.558,00	0,00	637.616.893,48
Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	240.000.000,00	256.915.578,00	107,05	253.305.235,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	79.966.715.831,05	79.038.015.762,88	98,84	110.864.290.168,79
Lain-lain PAD yang sah lainnya	59.400.000,00	55.959.600,00	94,21	40.321.775,00
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	16.797.553.600,00	14.892.908.355,00	88,66	14.584.548.250,00
Dana BOS	0,00	0,00	0,00	11.171.093.187,00
Jumlah	104.881.729.384,05	121.754.081.199,09	116,09	145.319.034.009,19

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2018 sebesar Rp121.754.081.199,09 atau 116,09% dari anggarannya sebesar Rp104.881.729.384,05 dan mengalami penurunan sebesar Rp23.564.952.810,10 dibandingkan dengan realisasi

TA 2017 sebesar Rp145.319.034.009,19. Selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan TA. 2018 sebesar Rp930.114.450,00 atau 3.875,48% dari yang anggarannya sebesar Rp24.000.000,00
- b) Realisasi penerimaan jasa giro TA 2018 sebesar Rp3.709.112.879,66 atau 211,95% dari anggarannya sebesar Rp1.750.000.000,00.

Nilai yang tersaji sebesar Rp3.709.112.879,66 pada penerimaan jasa giro termasuk didalamnya nilai pendapatan bunga/jasa giro atas dana kapitasi yang dikelola oleh FKTP Puskesmas pada TA 2018 sebesar Rp116.226.795,00, Rincian penerimaan bunga atas dana kapitasi per masing-masing FKTP tersaji pada **Lampiran 1**, selain itu termasuk juga pendapatan bunga/ jasa giro Dana BOS sebesar Rp53.669.784,00. Rincian penerimaan bunga atas Dana BOS tersaji pada **Lampiran 4**.

- c) Realisasi penerimaan bunga deposito TA 2018 sebesar Rp22.198.685.230,55 atau 369,98% dari anggarannya sebesar Rp6.000.000.000,00.
- d) Realisasi penerimaan dari pelunasan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) TA 2018 tidak terealisasi.

Rincian penerimaan TGR pada TA 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Penerimaan dari Pelunasan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

No.	Nama	Jenis Kasus	Nilai Kerugian (Rp)	Saldo TP/TGR Per 31 Desember 2017 (Rp)	Pelunasan selama TA 2018 (Rp)
1	MK (Sekcam Ujanmas)	Kehilangan kendaraan dinas roda dua (Motor BG 6043 DZ Tahun 2003)	9.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2	MZ (Kades Danau Tampang)	Kehilangan kendaraan dinas roda dua	12.400.000,00	5.400.000,00	0,00
3	MN (Kades Sukarami Kec. Rambang)	Kehilangan uang dana bantuan Bupati TW I dan II TA 2011	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Su (Bendahara Desa Sukarami Kec. Rambang)	Kehilangan uang dana bantuan Bupati TW I dan II TA 2011	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5	Pi (Kasubbag TU UPTD BKBPP Kec. SDL)	Kehilangan Kendaraan dinas roda dua (Motor Honda GL BG 6265 DZ)	13.700.000,00	0,00	0,00
6	Sy (Pegawai Kantor Perpustakaan Kab.M.Enim)	Kehilangan Kendaraan dinas roda dua (Motor Honda BG 6408 DZ)	10.350.000,00	3.950.000,00	0,00
7	Am (Bidan Desa Paya Angus Kec. Sungai Rotan)	Kehilangan Kendaraan dinas roda dua (Motor Honda BG 6834 DZ)	8.300.000,00	4.840.000,00	0,00
Jumlah			103.750.000,00	70.190.000,00	0,00

- e) Realisasi pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TA 2018 sebesar Rp25.519.292,00.
- f) Realisasi pendapatan denda pajak TA 2018 sebesar Rp413.094.493,00 atau 1.145,58% dari anggaran sebesar Rp36.059.953,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Realisasi Penerimaan dari Denda Pajak

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
Denda Pajak Hotel	458.412,00	1.510.332,00	329,47
Denda Pajak Restoran	12.299.420,00	48.820.722,00	396,94
Denda Pajak Hiburan	284.255,00	749.596,00	263,71
Denda Pajak Reklame	7.973.594,00	12.690.284,00	159,15
Denda Pajak Penerangan Jalan	1.005.448,00	141.354.721,00	14058,88
Denda Pajak Pengambilan bahan galian golongan C	4.826,00	175.069,00	3627,62
Denda Pajak Air Bawah Tanah	618.164,00	9.107.440,00	1473,30
Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0
Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	12.853.370,00	198.123.865,00	1.541,42
Denda Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	562.464,00	562.464,00	100,00
Jumlah	36.059.953,00	413.094.493,00	1.145,58

- g) Realisasi pendapatan dari pengembalian TA 2018 sebesar Rp233.755.558,00 yang berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp96.026.371,00, pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp16.606.500,00 dan pengembalian belanja sebesar Rp121.122.687,00.
- h) Realisasi pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan berupa penjualan rumah TA 2018 sebesar Rp256.915.578,00 atau 107,05% dari anggarannya sebesar Rp240.000.000,00. Rincian penerimaan angsuran/cicilan penjualan dari rumah pada TA 2018 tersaji pada **Lampiran 2**.
- i) Realisasi pendapatan BLUD TA 2018 sebesar Rp79.038.015.762,88 atau 98,84% dari anggarannya sebesar Rp79.966.715.831,05. Rincian realisasi pendapatan BLUD disajikan sebagai berikut:

Tabel 18 Realisasi pendapatan BLUD TA 2018

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD:	78.274.572.015,00
	• Pendapatan Rawat Jalan	13.359.318.398,00
	• Pendapatan IGD	502.921.800,00
	• Pendapatan Rawat Inap	53.622.013.569,00
	• Pendapatan Laboratorium	1.139.511.500,00
	• Pendapatan Radiologi	729.780.200,00
	• Pendapatan Ambulance/Jenazah	83.343.600,00
	• Pendapatan Bedah Sentral	1.865.988.775,00
	• Pendapatan Tindakan Pelayanan	566.544.500,00
	• Pendapatan Pelayanan Visum dan Jasa Raharja	21.449.000,00
	• Pendapatan Medical Check up	1.821.381.852,00
	• Pendapatan ECG dan USG	120.114.200,00
	• Penjualan Obat-Obatan	4.442.204.621,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
2	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Sewa Kantin • Pendapatan Sewa Mess • Pendapatan Sewa Gedung serba guna • Foto Nomorok • Pendapatan Sewa Koperasi Usaha • Pendapatan Sewa Tempat Oksigen • Pendapatan Sewa Ruang Rapat • Lab Genexpert • Administrasi Magang • Study Banding • Administrasi Pengambilan data • Pendapatan Pengolahan Sampah Medis 	282.181.674,00 30.000.000,00 34.321.000,00 17.850.000,00 34.500.000,00 3.388.000,00 48.981.174,00 11.280.000,00 6.080.500,00 82.765.000,00 1.140.000,00 4.955.000,00 6.921.000,00
3	Pendapatan Lain-Lain BLUD (jasa giro)	481.262.073,88
Jumlah		79.038.015.762,88

- j) Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda TA 2018 tidak ada realisasi.
- k) Realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah lainnya TA 2018 sebesar Rp55.959.600,00 atau 94,21% dari anggarannya sebesar Rp59.400.000,00 merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan bibit tanaman Dinas Perkebunan.
- l) Realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP/puskesmas TA 2018 sebesar Rp14.892.908.355,00 atau 88,66% dari anggarannya sebesar Rp16.797.553.600,00. Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2018 dikelola langsung oleh puskesmas-puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Rincian pendapatan kapitasi JKN per masing-masing FKTP tersaji pada **Lampiran 1**.
- m) Pendapatan Dana BOS TA 2018 dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rekening Pendapatan Hibah.

b. Pendapatan Transfer

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2018 serta realisasi TA 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 19 Realisasi Pendapatan Transfer - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.750.905.326.237,00	1.792.510.139.858,00	102,38	1.749.209.635.325,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Provinsi	105.551.546.236,05	138.674.700.925,12	131,38	119.925.124.485,78
Jumlah	1.856.456.872.473,05	1.931.184.840.783,12	104,03	1.869.134.759.810,78

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2018 sebesar Rp1.931.184.840.783,12 atau 104,03% dari anggarannya sebesar Rp1.856.456.872.473,05 dan mengalami kenaikan sebesar Rp62.050.080.972,34 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.869.134.759.810,78.

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Anggaran dan realisasi transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 20 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Berupa Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	472.933.862.629,00	470.035.153.625,00	99,39	427.807.488.786,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	373.610.134.608,00	425.449.223.197,00	113,88	405.687.098.246,00
Dana Alokasi Umum	661.337.068.000,00	661.337.068.000,00	100,00	661.337.068.000,00
Dana Alokasi Khusus	243.024.261.000,00	235.688.695.036,00	96,98	254.377.980.293,00
Jumlah	1.750.905.326.237,00	1.792.510.139.858,00	102,38	1.749.209.635.325,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari empat jenis pendapatan transfer pemerintah pusat hanya dua jenis pendapatan transfer, yaitu Dana Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum yang mencapai target yang dianggarkan.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2018 sebesar Rp1.792.510.139.858,00 atau 102,38% dari anggarannya sebesar Rp1.750.905.326.237,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp43.300.504.533,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.749.209.635.325,00. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak dari PBB	441.133.227.357,00	434.103.806.474,00	98,41	400.616.768.949,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi	31.734.881.272,00	35.931.347.151,00	113,22	27.190.617.727,00
Bagi Hasil Dari Bea Cukai Hasil Tembakau	65.754.000,00	0,00	0,00	102.110,00
Jumlah	472.933.862.629,00	470.035.153.625,00	99,39	427.807.488.786,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2018 sebesar Rp470.035.153.625,00 atau 99,39% dari anggarannya sebesar Rp472.933.862.629,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp42.227.664.839,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp427.807.488.786,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari PBB sebesar Rp434.103.806.474,00 terdiri dari Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan sebesar Rp419.232.756.380,00, Bagi Hasil PBB Sektor Perkebunan sebesar Rp7.652.870.486,00, Bagi Hasil PBB Sektor Perhutanan sebesar Rp3.982.921.748,00 dan Bagi Hasil PBB Bagi Rata sebesar Rp3.235.257.860,00.

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 22 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	0,00	0,00	123.100,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1.933.653.012,00	1.565.914.971,00	80,98	1.014.481.026,00
Bagi Hasil dari dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00	349.239.272,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap/Land Rent	3.740.805.750,00	4.081.383.958,00	109,10	8.885.604.992,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksploitasi/Royalti	251.093.597.516,00	291.973.413.216,00	116,28	268.211.876.497,00
Penerimaan Pungutan hasil Perikanan	707.270.250,00	701.234.591,00	99,15	525.572.127,00
Penerimaan dari Pertambangan Minyak Bumi	41.529.160.483,00	18.413.015.321,00	44,34	17.644.724.063,00
Penerimaan dari Pertambangan Gas Bumi	74.391.375.750,00	108.501.891.548,00	145,85	108.835.117.509,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	214.271.847,00	212.369.592,00	99,11	220.359.660,00
Jumlah	373.610.134.608,00	425.449.223.197,00	113,88	405.687.098.246,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2018 sebesar Rp425.449.223.197,00 atau 113,88% dari anggarannya sebesar Rp373.610.134.608,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp19.762.124.951,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp405.687.098.246,00.

Tabel di atas menggambarkan bahwa hanya tiga jenis Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam saja yang melebihi target yang dianggarkan, yaitu Bagi Hasil dari Dana Iuran Tetap, Bagi Hasil dari Iuran Eksploitasi/ Royalti dan Penerimaan dari Pertambangan Gas Bumi.

c) Dana Alokasi Umum

Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 23 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Dana Alokasi Umum	661.337.068.000,00	661.337.068.000,00	100,00	661.337.068.000,00
Jumlah	661.337.068.000,00	661.337.068.000,00	100,00	661.337.068.000,00

d) Dana Alokasi Khusus

Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 24 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Reguler	43.785.430.000,00	42.713.449.156,00	97,55	51.243.870.200,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	152.899.504.000,00	149.301.918.961,00	97,65	128.503.278.093,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan	46.339.327.000,00	43.673.326.919,00	94,25	74.630.832.000,00
Jumlah	243.024.261.000,00	235.688.695.036,00	96,98	254.377.980.293,00

Berdasarkan DIPA APBN, Dana Alokasi Khusus terdiri dari DAK Reguler kegiatan fisik dengan realisasi sebesar Rp42.713.449.156,00, DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp149.301.918.961,00 dan DAK Penugasan terealisasi sebesar Rp43.673.326.919,00.

DAK Reguler TA 2018 sebesar Rp42.713.449.156,00 terdiri dari:

- (1) DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp3.570.474.000,00;
- (2) DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp11.975.966.196,00;
- (3) DAK Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp19.515.342.000,00;
- (4) DAK Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp1.196.284.000,00;
- (5) DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp2.068.000.000,00;
- (6) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.023.882.960,00;
- (7) DAK Bidang Pertanian sebesar Rp1.803.500.000,00; dan
- (8) DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.560.000.000,00.

DAK Non-Fisik TA 2018 sebesar Rp149.301.918.961,00 terdiri dari:

- (1) Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp113.797.858.370,00;
- (2) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp1.410.750.000,00;
- (3) Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD sebesar Rp4.049.327.000,00;
- (4) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp6.185.000.000,00;
- (5) Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp18.073.641.725,00;
- (6) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp4.352.491.500,00; dan

(7) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp1.432.850.366,00.

Sementara itu DAK Penugasan TA 2018 sebesar Rp43.673.326.919,00 terdiri dari:

- (1) DAK Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama) sebesar Rp21.243.601.219,00;
- (2) DAK Bidang Air Minum sebesar Rp5.906.445.000,00;
- (3) DAK Bidang Pasar sebesar Rp5.761.560.000,00;
- (4) DAK Bidang Irigasi sebesar Rp9.965.075.000,00; dan
- (5) DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp796.645.700,00.

2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Tabel 25 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana BOS SD, SMP, SMA, SMK Negeri, dan Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa dana penyesuaian tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan guru pada TA 2018 direalisasikan melalui DAK Non-Fisik sehingga realisasi transfer pemerintah pusat lainnya untuk kedua jenis dana tersebut bernilai nol pada TA 2018.

Sementara itu, atas penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada TA 2018 dicatat Pada Pendapatah Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2018 berupa transfer dari Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut.

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tabel 26 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi	105.551.546.236,05	138.674.700.925,12	131,38	101.576.244.368,82

Realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi berupa bagi hasil pajak TA 2018 sebesar Rp138.674.700.925,12 atau 131,38% dari anggarannya sebesar Rp105.551.546.236,05 dan mengalami kenaikan sebesar

Rp37.098.456.556,31 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp101.576.244.368,82.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2018 merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2018 sebesar Rp101.930.294.576,54 terealisasi secara bertahap pada TA 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) SK Gubernur Nomor 184/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 15 Maret 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Januari 2018 sebesar Rp8.173.452.339,09;
- (2) SK Gubernur Nomor 252/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 16 April 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Februari 2018 sebesar Rp8.326.970.144,08;
- (3) SK Gubernur Nomor 293/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 22 Mei 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Maret 2018 sebesar Rp7.350.694.491,24;
- (4) SK Gubernur Nomor 403/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 26 Juli 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 360/KPTS/BPKAD/2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan April 2018 dan Kurang salur bulan Februari 2018, untuk bulan April 2018 sebesar Rp7.504.648.664,97 dan Kurang salur bulan Februari 2018 sebesar Rp378.769,02;
- (5) SK Gubernur Nomor 404/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 26 Juli 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Mei 2018 sebesar Rp8.724.391.851,07;
- (6) SK Gubernur Nomor 445/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juni 2018 sebesar Rp8.520.714.357,48;
- (7) SK Gubernur Nomor 499/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 7 September 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juli 2018 sebesar Rp8.320.403.564,78;
- (8) SK Gubernur Nomor 579/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Agustus 2018 sebesar Rp10.559.879.204,07;

- (9) SK Gubernur Nomor 648/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 6 November 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan September 2018 sebesar Rp4.953.363.277,82;
- (10) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2016 sebesar Rp29.495.397.912,92 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 276/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 178/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 Tanggal 6 April 2017;

Dan dana bagi hasil pajak rokok Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim TA 2018 sebesar Rp19.467.066.049,58 terealisasi secara bertahap pada TA 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) SK Gubernur Nomor 274/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 9 Mei 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kurang salur bulan Desember 2017 dan Triwulan I (Januari s.d Maret 2018) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan TA 2018, kurang salur bulan Desember 2017 sebesar Rp6.247.251.190,91 dan Triwulan I TA 2018 sebesar Rp988.344.947,79;
- (2) SK Gubernur Nomor 435/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II (bulan April s.d Juni 2018) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan TA 2018 sebesar Rp5.833.865.606,88;
- (3) SK Gubernur Nomor 654/KPTS/BPKAD/2018 tertanggal 8 November 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan TA 2018 sebesar Rp3.402.765.235,00; dan
- (4) SK Gubernur Nomor 749/KPTS/BPKAD/2017 tertanggal 28 Desember 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan TA 2018 sebesar Rp2.994.839.069,00.

b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya tidak terealisasi dan tidak dianggarkan pada TA 2018

4) Bantuan Keuangan

Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 27 Realisasi Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0,00	17.277.340.299,00	0,00	18.348.880.116,96
Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	17.277.340.299,00	0,00	18.348.880.116,96

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2018 sebesar Rp17.277.340.299,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.071.539.817,96 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp18.348.880.116,96.

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2018 serta realisasi TA 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 28 Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
I	Pendapatan Hibah				
a	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.957.739.000,00	6.840.000.000,00	68,69	5.786.000.000,00
b	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dalam negeri	22.447.500.000,00	22.489.616.535,00	100,19	20.093.579.202,00
c	Pendapatan Hibah Dana BOS	78.033.000.000,00	77.257.400.000,00	99,01	78.186.840.000,00
	Jumlah 1	110.438.239.000,00	106.587.016.535,00	96,51	104.066.419.202,00
II	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00		0,00
	Jumlah 2	0,00	0,00		0,00
III	Pendapatan Lainnya				
	Dana Insentif Daerah	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
	Dana Desa	208.161.174.000,00	208.161.174.000,00	100,00	192.539.554.000,00
	Pendapatan Lainnya	0,00	3.681.894.148,73	0,00	2.180.294.229,94
	Jumlah 3	251.661.174.000,00	255.343.068.148,73	101,46	202.219.848.229,94
	Total (Jumlah 1 s/d 3)	362.099.413.000,00	361.930.084.683,73	99,95	306.286.267.431,94

Pendapatan Hibah untuk TA 2018 terealisasi sebesar Rp106.587.016.535,00 atau 96,51% dari anggaran sebesar Rp110.438.239.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.520.597.333,00 dibandingkan realisasi TA 2017 terealisasi sebesar Rp104.066.419.202,00 yang terdiri dari:

- a) Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp6.840.000.000,00;
- b) Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp22.489.616.535,00.

Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri berupa pendapatan peran serta yang sifatnya sukarela (tanpa paksaan) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2010 tentang Peran Serta Badan Usaha, Masyarakat dan Luar Negeri untuk Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

Anggaran dan realisasi pendapatan peran serta TA 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 29 Realisasi Pendapatan Peran Serta

No.	Nama Perusahaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PT Tanjung Enim Lestari Tanggal 2 Maret 2018 Tanggal 29 Maret 2018 Tanggal 22 Juni 2018 Tanggal 11 Oktober 2018 Tanggal 26 Oktober 2018	337.500.000,00	373.023.034,00 71.166.131,00 59.999.987,00 80.574.172,00 65.851.011,00 95.431.733,00
2	PT Bukit Asam Tanjung Enim Tanggal 25 Oktober 2018 Tanggal 05 Desember 2018	21.200.000.000,00	21.200.000.000,00 10.000.000.000,00 11.200.000.000,00
3	PT Sumatera Prima Fibreboard (SPF) Tanggal 09 Januari 2018 Tanggal 09 Januari 2018 Tanggal 06 Desember 2018	390.000.000,00	186.593.501,00 87.048.250,00 62.000.170,00 37.545.081,00
4	PT Manambang Muara Enim Tanggal 21 September 2018 Tanggal 04 Oktober 2017	200.000.000,00	400.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
5	PT Bara Anugerah Sejahtera Tanggal 08 Januari 2018 Tanggal 07 Februari 2018 Tanggal 12 Maret 2018 Tanggal 12 April 2018	200.000.000,00	200.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
6	PT. Meppo-Gen Tanggal 06 Juni 2018	100.000.000,00	100.000.000,00 100.000.000,00
7	PT. PN VII Tanggal 12 Maret 2018	20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00
8	Pengusahaan Perkebunan PT Bumi Sawindo Permai tanggal 25 Oktober 2018	0,00	10.000.000,00 10.000.000,00
JUMLAH		22.447.500.000,00	22.489.616.535,00

Mekanisme penyetoran penerimaan peran serta dari Badan Usaha/Lembaga/Organisasi disetorkan langsung ke rekening umum kas daerah. Realisasi penerimaan peran serta TA 2018 sebesar Rp22.489.616.535,00 atau 100,19% dari anggaran sebesar Rp22.447.500.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.396.037.333,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp20.093.579.202,00.

- c) Hibah Dana BOS Sebesar Rp77.257.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Hibah Dana BOS Satdik Negeri SD sebesar Rp53.172.800.000,00
 - (2) Hibah Dana BOS Satdik Negeri SMP sebesar Rp24.084.600.000,00

Pendapatan Lainnya TA 2018 sebesar Rp255.343.068.148,73 atau 101,46% dari anggarannya sebesar Rp251.661.174.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp53.123.219.918,79 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp202.219.848.229,94 yang berasal dari:

- 1) Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp43.500.000.000,00.

DID merupakan dana yang diperoleh dari pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Muara Enim dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Besaran DID Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Lampiran XVII - Rincian Dana Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018 yang menyatakan bahwa DID Kabupaten Muara Enim TA 2018 sebesar Rp43.500.000.000,00.

- 2) Penerimaan Dana Desa dari APBN TA 2018 sebesar Rp208.161.174.000,00.

Besaran dana desa dari APBN yang diperoleh Kabupaten Muara Enim pada TA 2017 sesuai dengan Lampiran XVIII – Rincina Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018 yang menyatakan bahwa besaran dana desa adalah Rp208.161.174.000,00. Ikhtisar penerimaan dan penggunaan dana desa TA 2018 tersaji pada **Lampiran 3**.

- 3) Penerimaan Lain-lain sebesar Rp3.681.894.148,73.

Dalam realiasi Penerimaan Lain-Lain sebesar Rp3.681.894.148,73 sebesar Rp2.682.075.346,36 merupakan penerimaan dari pengembalian hasil temuan BPK RI yang terdiri dari:

- 1) Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp807.191.292,03;
- 2) Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.000.000,00;
- 3) Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp47.570.454,33;
- 4) Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.000.000,00;
- 5) Kelebihan BBM pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp70.214.000,00;
- 6) Kelebihan Pembayaran ATK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp17.736.000,00;
- 7) Kelebihan BBM pada Sekretariat Daerah sebesar Rp481.600,00;
- 8) Kelebihan Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.724.768.100,00; dan
- 9) Kelebihan Perjalanan Dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.113.900,00.

7.4.1.2 BELANJA

Jumlah anggaran Belanja-LRA TA 2018 sebesar Rp2.228.711.817.274,99 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim TA2018. Komposisi anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Operasi	1.627.841.605.014,04	1.466.820.194.568,30	90,11	1.363.133.841.944,90
Belanja Modal	580.870.212.260,95	556.628.833.664,46	95,83	530.346.575.503,08
Belanja Tak Terduga	20.000.000.000,00	1.443.658.000,00	7,22	3.603.298.000,00
Jumlah	2.228.711.817.274,99	2.024.892.686.232,76	90,85	1.897.083.715.447,98

Realisasi Belanja TA 2018 sebesar Rp2.024.892.686.232,76 atau 90,85% dari anggaran sebesar Rp2.228.711.817.274,99 dan mengalami kenaikan sebesar Rp127.808.970.784,78 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.897.083.715.447,98.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Rincian Belanja Operasi TA 2018 sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Pegawai	803.019.365.659,04	739.817.484.303,45	92,13	719.354.368.708,00
Belanja Barang dan Jasa	708.557.365.810,00	629.124.259.192,85	88,79	580.568.643.314,90
Belanja Bunga	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	100,00	6.450.000.000,00
Belanja Subsidi	7.130.417.545,00	4.816.417.265,00	67,55	2.742.602.740,00
Belanja Hibah	102.334.456.000,00	86.262.033.807,00	84,29	54.018.227.182,00
Jumlah	1.627.841.605.014,04	1.466.820.194.568,30	90,11	1.363.133.841.944,90

Realisasi Belanja Operasi TA 2018 sebesar Rp1.466.820.194.568,30 atau 90,11% dari anggarannya sebesar Rp1.627.841.605.014,04 dan mengalami kenaikan sebesar Rp103.686.352.623,40 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.363.133.841.944,90. Rincian Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Belanja Pegawai Langsung, sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai Tidak Langsung

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung TA 2018 serta realisasi TA 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Gaji dan Tunjangan	478.216.595.515,44	455.426.779.858,00	95,23	454.481.560.436,00
Tambahan Penghasilan PNS	297.194.112.762,00	261.482.659.859,00	87,98	254.189.664.233,00
Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.538.000.000,00	8.266.750.000,00	96,82	5.869.320.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.766.776.215,30	2.343.953.584,45	40,65	1.712.552.117,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	508.233.916,30	347.556.335,00	68,39	385.233.787,00
Jumlah	790.223.718.409,04	727.867.699.636,45	92,11	716.638.330.573,00

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung TA 2018 sebesar Rp727.867.699.636,45 atau 92,11% dari anggarannya sebesar Rp790.223.718.409,04 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.229.369.063,45 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp716.638.330.573,00. Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung dapat dirinci sebagai berikut:

(1) Gaji dan Tunjangan

Anggaran dan realisasi Gaji dan Tunjangan TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Gaji dan Tunjangan TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	348.622.912.217,00	334.759.447.031,00	96,02	343.380.615.756,00
Tunjangan Keluarga	34.262.977.902,08	32.820.813.447,00	95,79	31.510.898.262,00
Tunjangan Jabatan	12.431.580.588,56	10.991.449.500,00	88,42	10.652.325.250,00
Tunjangan Fungsional	24.715.564.650,00	23.878.836.000,00	96,61	22.943.749.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	4.362.493.584,11	4.067.700.000,00	93,24	3.830.814.000,00
Tunjangan Beras	18.674.203.179,44	17.708.862.600,00	94,83	18.521.994.360,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.817.626.366,09	732.839.534,00	40,32	686.390.452,00
Pembulatan Gaji	5.210.482,25	4.640.181,00	89,05	4.482.542,00
Iuran Asuransi Kesehatan	11.714.653.018,91	9.502.395.092,00	81,12	9.720.763.528,00
Uang Paket	86.058.000,00	84.483.000,00	98,17	85.743.000,00
Tunjangan Panitia Musyawarah	30.145.500,00	26.400.150,00	87,58	29.414.700,00
Tunjangan Komisi	55.906.200,00	54.749.100,00	97,93	55.723.500,00
Tunjangan Panitia Anggaran	34.530.300,00	34.073.550,00	98,68	31.789.800,00
Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	100,00	7.856.100,00
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	29.780.100,00	11.692.800,00	39,26	13.032.600,00
Tunjangan Perumahan	7.725.000.000,00	7.582.500.000,00	98,16	7.696.500.000,00
Uang Duka Wafat/Tewas	0,00	0,00		0,00
Uang Jasa Pengabdian	143.430.000,00	9.450.000,00	6,59	4.725.000,00
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	0,00
Tunjangan Kesehatan Kerja	55.350.000,00	44.500.000,00	80,40	12.000.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	3.503.697.327,00	3.360.571.773,00	95,92	1.584.142.586,00
Tunjangan Komunikasi Intensif	0,00	0,00	0,00	1.293.600.000,00

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Tunjangan Reses	1.984.500.000,00	1.940.400.000,00	97,78	2.415.000.000,00
Tunjangan Transportasi	7.560.000.000,00	7.410.000.000,00	98,02	0,00
Jumlah	478.216.595.515,44	455.426.779.858,00	95,23	454.481.560.436,00

(2) Tambahan Penghasilan PNS

Anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan PNS TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan PNS TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	40.899.021.152,00	32.985.842.505,00	80,65	23.577.787.337,00
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD	125.152.191.610,00	114.291.528.140,00	91,32	149.383.046.540,00
Tunjangan Kinerja	131.142.900.000,00	114.205.289.214,00	87,08	81.228.830.356,00
Jumlah	297.194.112.762,00	261.482.659.859,00	87,98	254.189.664.233,00

(3) Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Anggaran dan realisasi Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.791.000.000,00	98,15	5.269.320.000,00
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	475.750.000,00	79,29	600.000.000,00
Jumlah	8.538.000.000,00	8.266.750.000,00	96,82	5.869.320.000,00

(4) Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Biaya Pemungutan Pajak Daerah TA 2018 sebesar Rp2.343.953.584,45 atau 40,65% dari anggarannya sebesar Rp5.766.776.215,30 dan mengalami kenaikan sebesar Rp631.401.467,45 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.712.552.117,00.

(5) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2018 sebesar Rp347.556.335,00 atau 68,39% dari anggarannya sebesar

Rp508.233.916,30 dan mengalami penurunan sebesar Rp37.677.452,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp385.233.787,00.

b) Belanja Pegawai Langsung

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Uang Lembur	3.668.509.000,00	3.158.759.850,00	86,10	2.716.038.135,00
Pegawai BOS	9.127.138.250,00	8.791.024.817,00	96,32	0,00
Jumlah	12.795.647.250,00	11.949.784.667,00	93,39	2.716.038.135,00

- (1) Uang Lembur TA 2018 sebesar Rp3.158.759.850,00 atau 86,10% dari anggarannya sebesar Rp3.668.509.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp442.721.715,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.716.038.135,00.
- (2) Pegawai BOS TA 2018 sebesar Rp8.791.024.817,00 atau 96,32% dari anggarannya sebesar Rp9.127.138.250,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.791.024.817,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp0,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 serta realisasi TA 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	25.655.649.193,00	21.928.990.543,50	85,47	17.143.094.455,00
Belanja Bahan/Material	19.080.579.673,00	17.411.394.575,00	91,25	14.128.606.835,13
Belanja Jasa Kantor	158.674.147.198,00	134.300.604.649,00	84,64	94.442.232.567,00
Belanja Premi Asuransi	6.898.733.504,00	6.595.402.468,00	95,60	63.523.948.219,78
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.904.069.790,00	6.713.865.395,00	75,40	6.202.756.187,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	16.322.971.560,00	14.278.621.251,00	87,48	11.474.654.350,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.827.037.500,00	5.877.930.591,00	75,10	3.005.956.004,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.339.579.750,00	2.610.050.750,00	78,16	2.672.995.740,00
Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	128.688.800,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.307.010.000,00	1.820.550.600,00	78,91	1.304.720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	22.161.431.000,00	18.730.664.750,00	84,52	14.495.187.900,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	787.900.000,00	729.747.000,00	92,62	675.650.000,00
Belanja Pakaian Kerja	1.198.098.000,00	1.187.242.275,00	99,09	344.463.500,00
Belanja Pakaian Khusus dan	1.633.625.000,00	1.586.409.000,00	97,11	1.437.823.500,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Hari-hari tertentu				
Belanja Perjalanan Dinas	157.088.867.639,00	137.539.234.880,85	87,56	96.310.738.903,36
Belanja Pemeliharaan	9.779.840.500,00	9.233.228.939,00	94,41	8.737.048.615,00
Belanja Jasa Konsultansi	11.281.668.026,00	10.640.864.367,50	94,32	14.799.026.429,50
Belanja Barang/Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	79.364.161.000,00	74.555.711.150,00	93,94	40.718.301.171,05
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.620.000.000,00	1.198.430.000,00	73,98	1.178.264.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.730.346.000,00	2.371.504.000,00	63,57	1.874.744.600,00
Honorarium PNS	5.609.315.000,00	4.446.164.000,00	79,26	2.464.600.000,00
Honorarium Non PNS	0,00	0,00		29.360.000,00
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.899.800.000,00	1.779.100.000,00	93,65	1.835.650.000,00
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	3.839.027.625,00
Belanja Barang Dana BOS	64.605.552.475,00	62.543.083.311,00	96,81	73.620.543.798,00
Belanja Yang Bersumber Dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	23.737.043.002,00	16.757.134.752,00	70,59	13.869.858.988,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.040.000.000,00	73.525.113.145,00	99,30	89.628.794.127,08
Belanja Rambu-rambu	196.000.000,00	194.950.000,00	99,46	141.750.000,00
Belanja Barang Non Kapitalisasi	330.680.000,00	318.756.000,00	96,39	291.157.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Non PNS	225.000.000,00	0,00	0,00	249.000.000,00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Dukungan Operasional SMA, SMK, MA, SD dan SMP Negeri dan Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan atau Kurang Mampu	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Aset Tidak Berwujud	258.260.000,00	249.510.800,00	96,61	0,00
Jumlah	708.557.365.810,00	629.124.259.192,85	88,79	580.568.643.314,90

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 sebesar Rp629.124.259.192,85 atau 88,79% dari anggarannya sebesar Rp708.557.365.810,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp48.555.615.877,95 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp580.568.643.314,90. Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp21.928.990.543,50 dengan rincian:

Tabel 38 Rincian Belanja Bahan Pakai Habis

No,	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	10.450.968.581,00
2	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	16.200.000,00
3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar. Battery Kering)	2.133.030.250,00
4	Belanja Perangko. Materai Dan Benda Pos Lainnya	192.867.600,00
5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.383.790.125,00
6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.271.177.286,00
7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.750.000,00
8	Belanja Pengisian Tabung Gas	49.520.000,00
9	Belanja Pengisian Pendingin AC	31.805.000,00
10	Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	4.376.881.701,50
11	Belanja Dekorasi	17.000.000,00
Total		21.928.990.543,50

- b) Belanja Bahan/Material sebesar Rp17.411.394.575,00 dengan rincian:

Tabel 39 Rincian Belanja Bahan/Material

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan Baku Bangunan	342.821.900,00
2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	412.486.000,00
3	Belanja Bibit Ternak	109.280.000,00
4	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.293.193.432,00
5	Belanja Bahan Kimia	718.934.350,00
6	Belanja Persediaan Makanan Pokok	328.855.000,00
7	Belanja Bahan Praktek / Keterampilan / Peraga / Penolong	1.950.031.273,00
8	Belanja Bahan Material / Uji / Sampel	8.235.000,00
9	Belanja Bahan Laboratorium	525.387.000,00
10	Belanja Bahan/Alat Pakan	1.301.002.150,00
11	Belanja Bahan/Alat Pembantu	421.168.470,00
Total		17.411.394.575,00

- c) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp134.300.604.649,00 dengan rincian:

Tabel 40 Rincian Belanja Jasa Kantor

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Telepon	319.929.542,00
2	Belanja Air	1.295.793.693,00
3	Belanja Listrik	23.513.214.949,00
4	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00
5	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.038.209.500,00
6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.901.032.085,00
7	Belanja Paket/Pengiriman	19.280.150,00

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
8	Belanja Sertifikasi	126.750.000,00
9	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan	531.212.000,00
10	Belanja Jasa Laboratorium	367.055.600,00
11	Belanja Jasa Publikasi / Promosi	9.284.169.800,00
12	Belanja Jasa/Upah Tenaga Kerja Lainnya	72.827.296.565,00
13	Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahli / Instruktur	13.905.510.000,00
14	Belanja Uang Transport / Uang Saku Peserta (PNS/Non PNS)	6.066.631.965,00
15	Belanja Jasa Pertimbangan Teknis	0,00
16	Belanja Jasa Binatu/Laundry Rumah Tangga KDH/WKDH	65.891.500,00
17	Belanja Jasa Pelayanan/Dukungan Pelayanan	2.238.805.100,00
18	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	789.822.200,00
Total		134.300.604.649,00

d) Belanja Premi Asuransi sebesar Rp6.595.402.468,00 dengan rincian:

Tabel 41 Rincian Belanja Premi Asuransi

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.786.373.429,00
2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.604.087.439,00
3	Belanja Premi Asuransi Jiwa	204.941.600,00
Total		6.595.402.468,00

e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.713.865.395,00 dengan rincian:

Tabel 42 Rincian Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Service	1.132.460.375,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.573.089.387,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.446.055.041,00
4	Belanja Jasa KIR	1.135.400,00
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	358.820.967,00
6	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.392.650,00
7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	197.911.575,00
Total		6.713.865.395,00

f) Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp14.278.621.251,00 dengan rincian:

Tabel 43 Rincian Belanja Cetak dan Penggandaan

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Cetak	11.583.339.501,00
2	Belanja Penggandaan	2.695.281.750,00
Total		14.278.621.251,00

- g) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp5.877.930.591,00 dengan rincian:

Tabel 44 Rincian Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	713.487.500,00
2	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	657.850.000,00
3	Belanja Sewa Penginapan	4.506.593.091,00
Total		5.877.930.591,00

- h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp2.610.050.750,00 dengan rincian:

Tabel 45 Rincian Belanja Sewa Sarana Mobilitas

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.556.836.750,00
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	53.214.000,00
Total		2.610.050.750,00

- i) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar Rp1.820.550.600,00 dengan rincian:

Tabel 46 Rincian Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Meja Kursi	429.335.000,00
2	Belanja Sewa Komputer dan Printer	26.000.000,00
3	Belanja Sewa Generator	25.200.000,00
4	Belanja Sewa Tenda	757.465.600,00
5	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	29.450.000,00
6	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Audio/Video	452.150.000,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor Lainnya	100.950.000,00
Total		1.820.550.600,00

- j) Belanja makanan dan minuman sebesar Rp18.730.664.750,00 dengan rincian:

Tabel 47 Rincian Belanja makanan dan minuman

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.187.200.000,00
2	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.334.377.000,00
3	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan(Diklat/Bimtek/Kursus/Workshop)	3.343.013.700,00
4	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan (Sosialisasi/Seminar/Penyuluhan/Audiensi)	11.446.864.550,00
5	Belanja Makanan Dan Minuman Dokter Residen/Supervisor/Tenaga Berisiko Tinggi (RSUD)	11.050.000,00
6	Belanja Makanan Dan Minuman Gizi Balita	6.250.000,00
7	Belanja Bahan Makanan Dan Minuman RumahTangga KDH/WKDH	401.909.500,00
Total		18.730.664.750,00

- k) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp729.747.000,00 dengan rincian:

Tabel 48 Rincian Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	185.672.000,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	363.000.000,00
3	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	78.000.000,00
4	Belanja Atribut Pakaian	103.075.000,00
Total		729.747.000,00

- l) Belanja Pakaian Kerja sebesar Rp1.187.242.275,00 dengan rincian:

Tabel 49 Rincian Belanja Pakaian Kerja

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	800.274.975,00
2	Belanja Kelengkapan Pakaian Kerja	386.967.300,00
Total		1.187.242.275,00

- m) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu sebesar Rp1.586.409.000,00 dengan rincian:

Tabel 50 Rincian Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pakaian Adat Daerah	120.875.000,00
2	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00
3	Belanja Pakaian Olahraga	424.335.000,00
4	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan	1.036.199.000,00
Total		1.586.409.000,00

- n) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp137.539.234.880,85 dengan rincian:

Tabel 51 Rincian Belanja Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.267.390.237,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.612.543.992,85
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	659.300.651,00
Total		137.539.234.880,85

- o) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp9.233.228.939,00 dengan rincian:

Tabel 52 Rincian Belanja Pemeliharaan

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.558.785.600,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.229.622.600,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	444.820.739,00
Total		9.233.228.939,00

- p) Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp10.640.864.367,50 dengan rincian:

Tabel 53 Rincian Belanja Jasa konsultasi

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	735.735.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.290.048.100,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	782.313.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan/Pengembangan	1.753.672.767,50
5	Belanja Jasa Konsultansi Pelaksanaan dan Pengelolaan	79.095.500,00
Total		10.640.864.367,50

- q) Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp74.555.711.150,00 dengan rincian:

Tabel 54 Rincian Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	65.606.427.150,00
2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	8.949.284.000,00
Total		74.555.711.150,00

- r) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.1.198.430.000,00 dengan rincian:

Tabel 55 Rincian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	104.300.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.094.130.000,00
Total		1.198.430.000,00

- s) Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp2.371.504.000,00 dengan rincian:

Tabel 56 Rincian Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.287.385.000,00
2	Belanja Sosialisasi	15.100.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	277.600.000,00
4	Belanja Kontribusi	791.419.000,00
Total		2.371.504.000,00

- t) Belanja Honorarium PNS sebesar Rp4.446.164.000,00 dengan rincian:

Tabel 57 Rincian Belanja Honorarium PNS

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.204.814.000,00
2	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	55.850.000,00
3	Belanja Honorarium PNS Lainnya	185.500.000,00
Total		4.446.164.000,00

- u) Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp1.779.100.000,00 dengan rincian:

Tabel 58 Rincian Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	247.500.000,00
2	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.531.600.000,00
Total		1.779.100.000,00

- v) Belanja Barang Dana BOS sebesar Rp62.543.083.311,00.
w) Belanja yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp16.757.134.752,00 dengan rincian:

Tabel 59 Rincian Belanja Yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	8.873.806.528,00
2	Belanja Dukungan Biaya Operasional FKTP Milik Pemerintah Daerah	7.883.328.224,00
Total		16.757.134.752,00

- x) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp73.525.113.145,00.
y) Belanja Rambu-rambu berupa Belanja Pembuatan Marka Jalan dan Garis Kejut atau Parkir sebesar Rp194.950.000,00.
z) Belanja Barang Non Kapitalisasi sebesar Rp318.756.000,00 dengan rincian:

Tabel 60 Rincian Belanja Barang Non Kapitalisasi

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan dan Mesin	44.441.000,00
2	Belanja Barang Non Kapitalisasi Gedung dan Bangunan	100.435.000,00
3	Belanja Barang Non Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya	173.880.000,00
Total		318.756.000,00

- aa) Belanja Pengadaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp249.510.800,00.
bb) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non-PNS berupa Belanja Kontribusi sebesar Rp0,00.

3) Belanja Bunga

Anggaran dan realisasi Belanja Bunga TA 2018 serta realisasi TA 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Bunga	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	100,00	6.450.000.000,00

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp6.800.000.000,00 merupakan bunga atas penerusan pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation* (UWSSP) yang tercatat sebagai kewajiban jangka panjang dalam negeri sebesar Rp97.148.652.820,00.

Pembayaran bunga utang sebesar Rp6.800.000.000,00 pada TA 2018 berdasarkan surat tagihan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan rincian:

- a) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi Nomor S-362/WPB.12/KP.10/2018 tertanggal 02 April 2018 perihal Tagihan Jumlah Kewajiban Jatuh Tempo untuk Pinjaman Nomor SLA-1225/DSMI/2009 terkait bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2018 sebesar Rp3.392.615.760,47 dan denda bunga sebesar Rp1.434.088,11 jumlah Rp3.394.049.848,58; dan
- b) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi Nomor S-1365/WPB.07/KP.0403/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 perihal Tagihan Jumlah Kewajiban Jatuh Tempo untuk Pinjaman Nomor SLA-1225/DSMI/2009 terkait bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp3.877.926.466,06.

Pembayaran belanja bunga Tahun 2018 sebesar Rp6.800.000.000,00 sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBD TA 2018, sedangkan tagihan bunga sebesar Rp7.271.976.314,64 sehingga masih terdapat kurang bayar atas bunga pinjaman sebesar Rp471.976.314,64 yang akan dibayarkan bersamaan dengan bunga jatuh tempo 1 Mei 2019.

4) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk memberikan subsidi bunga kepada peserta kredit Program Gerbang Serasan. Realisasi belanja subsidi TA 2018 adalah sebesar Rp4.816.417.265,00 atau 67,55% dari anggaran sebesar Rp7.130.417.545,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.073.814.525,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.742.602.740,00.

5) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Realisasi Belanja Hibah TA 2018 sebesar Rp86.262.033.807,00 atau 84,29% dari anggaran sebesar Rp102.334.456.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp32.243.806.625,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp54.018.227.182,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 62 Realisasi Belanja Hibah TA 2018

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
I	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	
1	Hibah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1.560.000.000,00
2	Hibah Melalui Dana APBD Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	10.000.000.000,00
3	Hibah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	5.291.875.500,00
II	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	
1	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Muara Enim	7.232.425.000,00
2	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	31.912.984.845,00
3	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim	16.124.904.800,00
4	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Muara Enim	222.774.000,00
5	Komando Resort Militer 044/Garuda Dempo Komando Distrik Militer 0404/Muara Enim	1.120.300.000,00
6	Pembayaran Hibah Komando Resort Militer 044/Garuda Dempo Komando Distrik Militer 0404 / Muara Enim Tahap II Tahun Anggaran 2018.	1.116.355.000,00
7	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Muara Enim	159.037.500,00
8	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Muara Enim	26.083.000,00
9	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Muara Enim	
10	Persatuan Wredatama RI (PWRI) Kabupaten Muara Enim	32.000.000,00
11	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muara Enim	304.635.000,00
12	Pembayaran Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Muara Enim Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2018.	1.297.223.662,00
13	Pembayaran Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Muara Enim Triwulan III Tahun Anggaran 2018.	595.405.500,00
14	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muara Enim	0,00
15	Pembayaran Hibah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018.	259.100.000,00
16	Pembayaran Hibah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Muara Enim	185.195.000,00
17	Pembayaran Hibah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Muara Enim triwulan II Tahun Anggaran 2018.	171.805.000,00
18	MI Abdul Rahman Jl Raya Prabumulih- Baturaja KM 45 Karang Mulia Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim	21.360.000,00
19	MI Al Ihsaniyah Suka Dana Jl. Raya Desa Suka Dana Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim	12.360.000,00
20	MI Al Ishlaiyah Jl. H.M. Zahir No. 002 Desa Gaung Asam Kec. Lembak Kab. Muara Enim	18.120.000,00
21	MI Al Kahoiriyah Cahaya Alam Jl. Datar Pauh No. 08 Cahaya Alam Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	0,00
22	MI Almanar Jl. Raya Palembang - Prabumulih KM 50 Desa Suka Menang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim	9.000.000,00
23	MI Babul Falah Jl. Raya Desa Tanjung Bunut Kec. Lembak Kab. Muara Enim	9.600.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
24	MI Babussalam Embacang Jl. Raya Desa Melilian Dusun III Kec Gelumbang Kab. Muara Enim	7.440.000,00
25	MI Darul Hikmah Jl. Masjid At-Taqwa No.13 Muara Gula Kec. Ujanmas Kab. Muara Enim	14.280.000,00
26	MI Darul Hikmah Tanjung Medang Jl. Desa Tanjung Medang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim	8.400.000,00
27	MI Darul Punun Lubuk Mumpo Jl. Duku Desa 2 Lubuk Mumpo Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim	12.480.000,00
28	MI Darul Ulum Tanjung Agung Jl. Lingkar Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim	12.600.000,00
29	MI Darussa'adah Gumai Jl. Raya Desa Gumai Dusun I Desa Gumai Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim	17.640.000,00
30	MI Darussalam Danau Rata Jl. Harapan Desa Danau Rata Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim	21.360.000,00
31	MI Darutta'lim Suka Maju Jl. Harapan Dusun II Desa Sukamaju Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim	13.560.000,00
32	MI Daruzzaitun Jl Lingkar Desa Menanti Selatan Kec. Kelekar Kab. Muara Enim	8.640.000,00
33	MI Fajar Islam Kemang Jl Raya Desa Kemang Kec. Lembak Kab. Muara Enim	10.800.000,00
34	MI Islamiyah Pinang Banjar Jl. Lapangan Bola Kaki Desa Pinang Banjar Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim	0,00
35	MI Jam'iyah Al Muawanah Jl. Gakari Dusun IV Rantau Dedap Desa Segamit Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	0,00
36	MI Lidzil 'Uluumi Jl. Talang Sinar Padang Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kab. Muara Enim	0,00
37	MI Mambaul Hidayah Suban Baru Jl. Olah Raga Desa Suban Baru Kec. Kelekar Kab. Muara Enim	8.400.000,00
38	MI Nurul Huda Segamit Jl. Lintas Rantau Dedap Desa Segamit Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	13.320.000,00
39	MI Nurul Ikhsan Suka Rami Jl. Harapan Dusun I Desa Sukarami Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim	19.920.000,00
40	MI Nurul Islam Harapan Mulia Desa Mulia Abadi Kec. Muara Belida Kab. Muara Enim	0,00
41	MI Nurul Ulum Penandingan Jl Usang Ngiam No 2 Desa Penandingan Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim	22.560.000,00
42	MI Nurussaadah Gunung Kemala Jl. Kodra Dusun III Desa Gunung Raja Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim	8.400.000,00
43	MI Raudhatun Nasihin Siring Jl. Lintas Segamit Desa Siring Agung Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	9.600.000,00
44	MI Raudhatus Shibyan Jl. Tangga Batu Desa Gunung Agung Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim	10.560.000,00
45	MI Sirajul Huda Palak Tanah Jl. Desa Palak Tanah Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim	6.240.000,00
46	MI Tarbiyah Islamiyah Jl. AMD Manunggal IV Desa Teluk Jaya Kec. Kelekar Kab. Muara Enim	12.600.000,00
47	MI YPDT Lubuk Bata Jl. Pengawi Dusun IV Lubuk Bata Pinang Belarik Kec. Ujanmas Kab. Muara Enim	0,00
48	MI YPITR Tanjung Raja Jl Lintas Sumatera No. 01 Desa Tanjung Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim	16.440.000,00
49	MI YPITR Tegal Rejo Jl H. Rakyen Rt. 7A Tegal Rejo Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim	9.720.000,00
50	MIN 1 Muara Enim Jl. Jend. Bambang Utuyo No 32 Kel. Pasar III Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim	97.200.000,00
51	MIN 2 Muara Enim Jl. K.H. Syech Yahya Lingkungan VI Kec Muara Enim Kab. Muara Enim	29.400.000,00
52	MIN 3 Muara Enim Jl. Lintas Sumatera No. 54 Desa Tanjung Raman Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim	30.360.000,00
53	MIN 4 Muara Enim Jl Raya Desa Tambangan Kelekar Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim	33.120.000,00
54	MIN 5 Muara Enim Desa Arisan Musi Kec. Muara Belida Kab. Muara Enim	25.920.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
55	MIN 6 Muara Enim Jl. Aur Duri Desa Tenam Bungkok Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim	9.360.000,00
56	MIN 7 Muara Enim Jl. KH. Abdul Jabbar Desa Aremantai Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	0,00
57	MIN 8 Muara Enim Jl. Pangeran Sakti Desa Pajar Bulan Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim	0,00
58	MIN 9 Muara Enim Jl. Raya Bitis No. 138 Desa Bitis, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	30.720.000,00
59	MIN 10 Muara Enim Jl. AMD Manunggal IV No. 02 Desa Menanti Kec. Kelekar Kab. Muara Enim	20.640.000,00
60	SD IT Rabbani Lawang Kidul Jl. Baturaja Kel. Tanjung Enim Selatan Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim	27.240.000,00
61	SD IT Rabbani Muara Enim Jl Pemuda Pelitasari Kel. Pasar 1 Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim	43.080.000,00
62	SD IT Rabbani Ujanmas Jl. Pesantren Dusun X Desa Ujanmas Lama Kec. Ujanmas Kab. Muara Enim	11.520.000,00
63	SD IT Serasan Sekundang Jl Jenderal Sudirman No 100 Talang Jawa Kel. Pasar III Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim	14.880.000,00
64	SD IT Syajarul Qur'an Jl. Pipa Pertamina Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim	5.880.000,00
65	SD Kartika II-7 Tanjung Enim Jl. Suyitno RT. 07 b Tegal Rejo Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim	15.720.000,00
66	SD Kristen Suka Cita Jl. Kantor Pos & Giro Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim	6.840.000,00
67	SD Lematang Lestari Komplek PT. TEL Desa Banuayu Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim	77.160.000,00
68	SD Muhammadiyah 1 Tanjung Enim Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim	10.800.000,00
69	SD Muhammadiyah Karang Raja Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim	3.600.000,00
70	SD Muhammadiyah Penanggiran Jl. Mesjid Muttaqin Dusun VI Desa Penanggiran Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim	26.760.000,00
71	SD Panditanesia Ujan Mas Komplek PT. Cipta Futura Kebun Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim	22.920.000,00
72	SD Xaverius Emmanuel Tanjung Enim Jl. Gereja Lama No. 1 Tanjung Enim 31716, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim	36.120.000,00
73	SD YWKA Serdang Jl. Simpang Segayam Desa Serdang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim	29.520.000,00
74	SMP Islam YPITR Tanjung Enim Jl. H. Rakyau Rt. VIIa Tegal Rejo, Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim	14.400.000,00
75	SMP Muhammadiyah 1 Tanjung Enim Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim	71.640.000,00
76	SMP Sukacita Tanjung Enim Jl. Kantor POS Desa Lingga, Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim	900.000,00
77	SMP Xaverius Emmanuel Tanjung Enim Jl. Gereja Lama No. 1 Tanjung Enim 31716, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim	46.260.000,00
78	SMP Bina Mulya Tanjung Enim Jl. Lingga Raya No. 1 Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim	34.560.000,00
79	SMP Cendikia Unggul Jl. Lingga Raya No. 223 Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim	17.100.000,00
80	SMP PGRI Muara Enim Jl. Pramuka III, Lorong PGRI No. 76 Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim	45.270.000,00
81	SMP Thawalib Jl. Thawalib Darussalam Serasan, Kel. Air Lintang, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim	22.500.000,00
82	SMP Abdi Persada Jl. Lintas Palembang, Desa Ujanmas Baru, Kec. Ujan Mas, Kab. Muara Enim	30.420.000,00
83	SMP YP Serasan Teluk Lubuk Jl. Raya Pendopo Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing, Kab. Muara Enim	2.610.000,00
84	SMP KUD Pesari Suni Jl. PTPN VII Suni Desa Jemenang, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim	34.470.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
85	SMP Muhammadiyah 3 Gunung Raja Jl. Pertamina Desa Gunung Raja, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim	32.130.000,00
86	SMP Wana Lestari Jl. Proyek HTI, Desa Suban Jeriji, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim	40.860.000,00
87	SMP Lematang Lestari Kompleks PT. TEL, Desa Banuayu, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim	55.400.000,00
88	SMP PGRI Karang Agung Jl. Raya Prabumulih-Baturaja km. 45, Desa Karang Agung, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim	10.620.000,00
89	SMP PGRI Sugih Waras Jl. Kol. H. Barlian Desa Sumber Rahayu, Kec. Rambang, Kab. Muara Enim	36.720.000,00
90	SMP Muhammadiyah Gelumbang Jl. Raya Gelumbang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	6.120.000,00
91	SMP PGRI Alai Jl. Desa Alai - Sungai Duren, Kec. Lembak, Kab. Muara Enim	10.800.000,00
92	SMP PGRI Sialingan Desa Sialingan, Kec. Belida Darat, Kab. Muara Enim	4.500.000,00
93	SMP PGRI Menanti Jl. AMD Manunggal IV, Desa Menanti, Kec. Kelekar, Kab. Muara Enim	20.160.000,00
94	SMP Darussalamah Jl. Baturaja Prabumulih, Desa Pagar Dewa, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim	10.260.000,00
95	SMP Islam Terpadu Rabbani Jl. Proklamasi No. 80 Kelurahan Air Lintang, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim	18.900.000,00
96	SMP Panditanesia Kompleks PT. Cipta Futura Kebun Ujanmas, Perum. 103 afd.7, Kec. Ujanmas, Kab. Muara Enim	12.370.000,00
97	SMP Nurul Quran Lawang Kidul Jl. Tanjung Rt.05/Rw.12 Lingkungan Mandala, Kel. Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul	9.000.000,00
98	SMP Hidayatul Mubtadiin Desa Sigam, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	7.920.000,00
99	SMP Ilmu Al-Quran Syuhratul Islam Kelurahan Gelumbang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	5.940.000,00
100	MTs Negeri 1 Muara Enim Jl. Bambang Utoyo No. 35, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim	121.680.000,00
101	MTs Negeri 2 Muara Enim Jl. Baturaja Desa Keban Agung, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim	160.560.000,00
102	MTs Negeri 3 Muara Enim Jl. Muara Tanah Agung, Desa Pajar Bulan, Kec. Semende Darat Ulu, Kab. Muara Enim	72.450.000,00
103	MTs Babul Falah Jl. Raya Desa Tanjung Bunut, Kec. Belida Darat, Kab. Muara Enim	27.540.000,00
104	MTs Darul Istiqomah Jl. Pertamina Desa Tanjung Tiga, Kec. Belida Darat, Kab. Muara Enim	6.930.000,00
105	MTs Nurul Fajri Jl. Raya Kampung 3, Desa Tambangan Kelekar, Kec. Gelumbang	35.100.000,00
106	MTs Nurul Iman Kartamulia Jl. Sukarami No. 101 Desa Kartamulia, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	17.910.000,00
107	MTs Babussalam Melilian Jl. Embacang Melilian Dusun III Desa Melilian Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	22.950.000,00
108	MTs Al Falah Putak Desa Putak, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	46.620.000,00
109	MTs Nurul Huda Bitis Jl. Raya Bitis No. 138 Desa Bitis, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	9.000.000,00
110	MTs Al Khoiriyah Menanti Jl. Lingkar Desa No. 181 Menanti, Kec. Kelekar, Kab. Muara Enim	23.850.000,00
111	MTs Tarbiyah Islamiyah Jl. AMD Manunggal IV Desa Teluk Jaya, Kec. Kelekar, Kab. Muara Enim	8.640.000,00
112	MTs Al Ishlahiyah Jl. H.M. No. 01 Desa Gaung Asam, Kec. Belida Darat, Kab. Muara Enim	34.560.000,00
113	MTs Nurul Islam Alai Jl. PIPA Pertamina, Alai, Kec. Lembak, Kab. Muara Enim	29.520.000,00
114	MTs Ishlahul Ummah Jl. Raya Baturaja, Desa Beringin, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim	31.770.000,00
115	MTs Abdul Rahman Jl. Raya Prabumulih-Baturaja Desa Karang Mulia, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim	12.870.000,00
116	MTs Nurussa'adah Desa Arisan Musi, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim	35.460.000,00
117	MTs PP Darussa'adah Muara Enim Jl. Proklamasi No. 187 Kelurahan Air Lintang Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim	29.790.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
118	MTs Rawdhotut Taufiq Kepur Jl. Raya Palembang km 3,5 No. 108 Ujung Tanjung Desa Kepur, Kec. Muara Enim, Kab. M.Enim	36.540.000,00
119	MTs YPI Sabilul Huda Desa Kencana Mulya, Kec. Rambang, Kab. Muara Enim	53.010.000,00
120	MTs Raden Fatah Jl. Blok B Manunggal Jaya, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim	11.160.000,00
121	MTs Barokah Al-Haromain Jl. Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kab. Muara Enim	62.640.000,00
122	MTs Raudhatun Nasihin Jl. KH. Abdul Jabbar No. 03, Desa Arementai, Kec. Semende Darat Ulu, Kab. Muara Enim	39.240.000,00
123	MTs Al Khoiriyah Cahaya Alam Jl. Datar Pauh No. 08 Desa Cahaya Alam, Kec. Semende Darat Ulu, Kab. Muara Enim	25.200.000,00
124	MTs Jam'iyah Al Muawwanah Dusun Dedap Sari, Desa Segamit, Kec. Semende Darat Ulu	17.460.000,00
125	MTs Darussalam Danau Rata Jl. Harapan Desa Danau Rata, Kec. Sungai Rotan, Kab. Muara Enim	39.960.000,00
126	MTs YPDT Ujanmas Jl. KH. Mansyur No. 39 Lubuk Bata, Kec. Ujanmas, Kab. Muara Enim	8.640.000,00
127	MTs Assyari'ah Tanjung Enim Jl. Semut No. 980 Komplek Perumka (SS) Pasar Tanjung Enim	14.760.000,00
128	MTs Al-Muhajirin Cinta Kasih Komplek Masjid Al-Muhajirin, Desa Cinta Kasih, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim	9.180.000,00
129	MTs Almanar Sukamenang Desa Sukamenang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	5.580.000,00
130	MTs Al Muzakir Ujanmas, Jl. Pesantren Dusun X Desa Ujanmas Lama, Kec. Ujanmas Kab. Muara Enim	4.860.000,00
131	MTs Arri'ayah Jl. Tapus Desa Lembak, Kec. Lembak Kab. Muara Enim	7.110.000,00
III	Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	
1	KB Tunas Harapan Desa Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat Kab. Muara Enim	13.200.000,00
2	KB Pelangi Jln Raya Dusun II Ds.Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kab. Muara Enim	30.000.000,00
3	KB Tunas Baru Jl.Pertamina Desa Tanjung Tiga Kecamatan Belida Darat Kab. Muara Enim	16.200.000,00
4	KB Sehat Cemerlang Jalan Raya Desa Ibul Kecamatan Belida Darat Kab. Muara Enim	21.600.000,00
5	KB Ceria Indah Jalan Raya Dusun I Desa Babat Kecamatan Belida Darat Kab. Muara Enim	24.000.000,00
6	KB Al Amanah Jalan Talang Timur Desa Lubuk Getam Kecamatan Belida Darat Kab. Muara Enim	21.000.000,00
7	KB Berseri Jalan Kabupaten Dusun 2 Desa Lubuk Semantung Kecamatan Belida Darat Kab. Muara Enim	21.600.000,00
8	KB Harapan Cinta Jalan Pertamina Desa Sialingan Belida Darat Kab. Muara Enim	27.000.000,00
9	KB Miftahul Huda Jl Raya Dusun 1 Desa Talang Balai Kecamatan Belida Darat Kab. Muara Enim	22.200.000,00
10	Kelompok Bermain Tunas Indah Jalan Raya Desa Talang Beliung Kecamatan Belida Darat Kab. Muara Enim	15.000.000,00
11	TK Anisyah Jalan Pelita No 75 Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	46.200.000,00
12	KB Putri Melur Jalan Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	24.000.000,00
13	TPA Ananda Jl Pelita No 15 Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	12.000.000,00
14	TK Surya Mandiri Dusun IV Desa Bulang Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	22.200.000,00
15	KB Ramadhan Jalan Candi Bumi Ayu Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	13.200.000,00
16	TK Khaafizar Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	26.400.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
17	TK Alghifari Barokah Dusun V Desa Belimbing Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	22.800.000,00
18	KB Harapan Ibu Jalan Desa Darmo Kasih, Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	12.000.000,00
19	KB Tunas Harapan Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	18.600.000,00
20	Paud Al Baru Jalan Lingkar Desa Tanjung Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	15.000.000,00
21	TK Asiyfa Jalan Candi Bumi Ayu Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	15.000.000,00
22	KB Tunas Harapan Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	0,00
23	TK Anisyah Jalan Raya Pendopo No. 35 Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kab. Muara Enim	0,00
24	KB Merajo Santri Kampung 1 Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kab. Muara Enim	13.200.000,00
25	TK Istiqomah Darussalam Desa Pagar Dewa Benakat Kab. Muara Enim	29.400.000,00
26	TK Mandiri Desa Hidup Baru Dusun 1 Kecamatan Benakat Kab. Muara Enim	12.000.000,00
27	TK Kartika II-11 Karang Endah Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	46.200.000,00
28	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Gelumbang Jalan Raya Prabumulih-Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	39.000.000,00
29	TK Islam Ar Rijaal Karta Mulia Desa Karta Mulia Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	18.600.000,00
30	TK Dharma Ibu Segayam Jl. Segayam Lingkungan li Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	35.400.000,00
31	SPS Baitur Rohman Jl.Pangeran Lk.I Rt.03 Ps Pagi Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	25.200.000,00
32	KB Harapan Bunda Dusun II Rt.01 Desa Gaung Telang Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	16.800.000,00
33	SPS 250 Miftahul Jannah Ponpes Al-Manar Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	12.000.000,00
34	SPS Mardhotillah Raya Bitis Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	18.000.000,00
35	KB Assiddikin Kampung II Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	36.000.000,00
36	KB Bakti Pertiwi Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	19.200.000,00
37	KB Al-Huda Lintas Kabupatn, Dusun Iii Melilian Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	25.800.000,00
38	KB Mandiri Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	22.800.000,00
39	KB Nurul Hidayah Jalan Raya Desa Paya Bakal Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	13.200.000,00
40	KB Husnul Khotimah Masjid Assai Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	20.400.000,00
41	TPA Kasih Bunda Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	21.600.000,00
42	Kasih Bunda Jln Palembang - Prabuluh Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	46.200.000,00
43	SPS Insan Al Hikmah Jalan Palembang-Prabumulih Dusun II Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	35.400.000,00
44	KB Mutiara Kasih Jalan Raya Palembang Prabumulih Km 51 Desa Talang Taling Kode Pos 31171 Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	39.000.000,00
45	KB Harapan Ibu Jln Desa Kamp I Desa Pinang Banjar Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	16.200.000,00
46	KB Harapan Bunda Jalan, Dusun I, Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	7.800.000,00
47	Ishlahulummah Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	21.000.000,00
48	SPS Teratai Asrama Yonkav-5/Serbu Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	24.000.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
49	SPS Babussalam Dusun Satu Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	30.600.000,00
50	PAUD SPS Darussa Adah Jalan Raya Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	18.000.000,00
51	KB Cemerlang Jl. Paud Cemerlang Desa Sigam Kecamatan Gelumbang KAB. Muara Enim	13.800.000,00
52	KB Al-IkhlasDesa Karang Endah RT 005 RW 002 Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	31.200.000,00
53	KB Sayang Bunda Ds Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	15.600.000,00
54	TK Ananda Desa Jambu Dusun 1 Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	13.800.000,00
55	TK IT Syajarul Quran Jl. Pipa No. 35 Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	27.600.000,00
56	KB Ceria MuliaDesa Karta Mulia Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	12.000.000,00
57	PAUD Amanah Dusun 1 Suka Jaya Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	13.800.000,00
58	KB Mutiara Hati Dusun II Desa Pedataran Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim	24.000.000,00
59	TK Raudhatul JannahDesa Pinang Banjar , Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim	19.800.000,00
60	TK Kompas Jaya Dusun 1 Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	27.000.000,00
61	TK Karya Taruna Aisyiyah Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	16.800.000,00
62	TK Tunas Bangsa Panang Jaya Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	24.600.000,00
63	TK Dharma Wanita Gunung Megang Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	20.400.000,00
64	TK Dharma Bhakti Pajar Indah Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	30.000.000,00
65	TK Mulya Tama Desa Sidomulyo Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	12.000.000,00
66	TK Dharma Wanita Uppka Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	22.200.000,00
67	TK Bhakti Ibu Kayuara Sakti Desa Kayu Ara Sakti Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	13.800.000,00
68	KB Darul Punun Jalan Kabupaten Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	14.400.000,00
69	TK Pelita jaya Jl. Komplek Pelita Jaya Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	12.600.000,00
70	TK. Menang Caye Jln. Desa Tanjung Muning Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	14.400.000,00
71	TK Persulin Iki Jalan Buana Indah PTPN 7 Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	42.600.000,00
72	KB Kasih Ibu Jalan Kesehatan Rt 7 Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	18.600.000,00
73	KB Mutiara Bunda Dsn V Suka Menanti Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	7.200.000,00
74	TK Al-Islam Jalan Raya Palembang Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	32.400.000,00
75	TK Kemala Bunda Jalan Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang Kab. Muara Enim	18.600.000,00
76	TK Menanti Jln Amd Manunggal Iv Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kab. Muara Enim	15.000.000,00
77	KB. Al-Faqi Desa Embacang Kelakar Dusun III Kecamatan Kelekar Kab. Muara Enim	19.800.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
78	KB Hasanah Desa Embacang Kecamatan Kelekar Kab. Muara Enim	18.600.000,00
79	Arafah Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar Kab. Muara Enim	19.200.000,00
80	KB Melati Manunggal Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kab. Muara Enim	12.000.000,00
81	SPS Istiqomah Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar Kab. Muara Enim	19.200.000,00
82	KB Bunda Desa Menanti Selatan Kecamatan Kelekar Kab. Muara Enim	22.200.000,00
83	KB Al-Mutakin Desa Tanjung Medang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim	23.400.000,00
84	TK Xaverius Emmanuel Tanjung Enim Jl. Gereja Lama Kel. Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	41.400.000,00
85	TK Electrina Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	24.000.000,00
86	TK Kemala Bhayangkari 09 Tanjung Enim Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	25.800.000,00
87	TK Antrasita Tanjung Enim Lingkar Tennis No. 01-319 Talang Jawa Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	46.200.000,00
88	TK Kartika II-9 Jl. KOMPI C/Raider Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	48.000.000,00
89	TK Kartika II-35 Tanjung Enim Jl. Pasar Tanjung Enim Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	46.200.000,00
90	TK Pertiwi Tanjung Enim Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	20.400.000,00
91	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tanjung Enim Jl. Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	48.000.000,00
92	TK Islam Terpadu Latansa Jl. Merapi No. 4 Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	37.200.000,00
93	TK Idhata Tanjung Enim Kelurahan Tanjung Enim Selatan Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	24.600.000,00
94	TK An-Nahl Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	40.800.000,00
95	TK Islam Asmaul Husna Jl. Raya Air Paku Kelurahan Tanjung Enim Selatan Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	28.200.000,00
96	KB Al Fattah Komp. Masjid Jami` Bukit Asam Atas Dapur Tanjung Enim Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	19.200.000,00
97	KB Dharma Sejati JL. Batu Raja Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	42.600.000,00
98	KB Teratai Sido Mulyo 1 Talang Jawa Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	46.200.000,00
99	KB Al-Ummi Jaman RT.003A RW.001 Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	38.400.000,00
100	KB Tunas Harapan Jl Batu Raja Dusun 1 Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	21.000.000,00
101	TK Islam Terpadu Rabbani Jalan Buluran Atas No. 241 Talang Jawa Tanjung Enim Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	27.600.000,00
102	KB Aldzikra Jl Telkom Rw 5 Bukit Munggu Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	16.200.000,00
103	TK Hasan Ma Karim Jl. Pasar Baru Dusun II Bantingan Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	9.600.000,00
104	TK Al Ikhsan BTN Mandala Blok H No. 14 Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	23.400.000,00
105	PAUD KB Permata Agung Jalan Lintas Batu Raja Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	14.400.000,00
106	TK Islam Al Kautsar Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	7.800.000,00
107	TK Pelangi Jln. Kasan Mukiran No. 589 RT.09 RW.04 Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	33.600.000,00
108	KB AL-KHOIR Perumahan Bara Lestari Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim	11.400.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
109	Qurrota Ayun Desa Petanang Kecamatan Lembak Kab. Muara Enim	9.600.000,00
110	KB Raudatul Janah Desa Tapus Kecamatan Lembak Kab. Muara Enim	27.600.000,00
111	KB Permata Hati Ibu Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak Kab. Muara Enim	26.400.000,00
112	KB Kasih Ibu Desa Alai Kecamatan Lembak Kab. Muara Enim	32.400.000,00
113	KB Harapan Bangsa Desa Tanjung Baru Kecamatan Lembak Kab. Muara Enim	14.400.000,00
114	KB Bina Bangsa Desa Alai Selatan Kecamatan Lembak Kab. Muara Enim	22.800.000,00
115	KB Al Kahfi Dusun III Suka Indah Desa Lubuk Enau Kecamatan Lembak Kab. Muara Enim	0,00
116	TK Aisyiah Gardena Jalan Kemang Lembak Desa Kemang Kecamatan Lembak Kab. Muara Enim	12.600.000,00
117	TK Cindo 03 Beringin Jl. Lintas Baturaja Desa Beringin Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	15.000.000,00
118	TK Aisyiyah Sukamerindu Jl. Lintas Baturaja Desa Suka Merindu Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	30.000.000,00
119	KB Lubai Jalan Pagar Gunung Desa Beringin Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	12.000.000,00
120	KB Melati Jalan Lintas Baturaja - Prabumulih Menanti Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	8.400.000,00
121	KB Ayu Lestari Jalan Lintas Batu Raja Desa Air Asam Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	19.200.000,00
122	Paud Kasih Ibu Jl. Pagar Gunung - Ogan Ilir Desa Jiwa Baru Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	35.400.000,00
123	KB Al Fikri Jalan Prabumulih Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	24.600.000,00
124	TK Tri Bakti Desa Aur Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	30.000.000,00
125	TK IT Roudhatul Jannah Desa Kota Baru Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	25.200.000,00
126	TK Khairunnas Jalan Raya Beringin Pagar Gunung Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	18.000.000,00
127	TK Do'a Ibu Jalan Raya Propinsi Beringin - Ogan Ilir Desa Gunung Raja Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	18.600.000,00
128	KB Harapan Bunda Jalan Lintas Pagar Gunung - Ogan Ilir Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim	29.400.000,00
129	TK Permata Bunda Desa Sumber Asri Lubai Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	28.800.000,00
130	KB Tri Bakti Dusun 2 RT 08 Desa Sumber Mulia Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	24.600.000,00
131	TK IKI Tunas Bangsa Jalan Gatot Subroto Rt 12 Desa Karang Sari Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	19.200.000,00
132	TK IKI PTPN VII Unit Beringin Jl. Raya Prabumulih-Baturaja Desa Sumber Mulya Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	46.200.000,00
133	TK Handayani Dusun 1 Desa Sumber Mulya Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	38.400.000,00
134	TK Insan Cendikia Desa Prabumenang Lubai Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	29.400.000,00
135	TK Serumpun Lecah Jalan Lintas Baturaja Prabumulih Desa Lecah Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	19.200.000,00
136	TK Tunas Baru Senuling Indah Desa Sumber Mulya Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	13.800.000,00
137	TK Babul Ulum Jl. Mawar Rt.006 Rw.002 Desa Mekar Jaya Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	23.400.000,00
138	KB Cahaya Negeri Jl Baturaja Desa Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	39.600.000,00
139	TK Islam Terpadu "Kanzul Ilmi" Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	24.600.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
140	TK Abdurrahman Desa Karang Mulya Lubai Ulu Kab. Muara Enim	28.800.000,00
141	TK Generasi Bangsa Jl. H. Sulem Rt.10 Rw.03 Desa Karang Mulya Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	15.600.000,00
142	KB Tunas JayaDesa Mekar Jaya Dusun II Kecamatan Lubai Ulu Kab. Muara Enim	10.200.000,00
143	KB Anak Pengharapan Indonesia Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kab. Muara Enim	15.000.000,00
144	KB Anak Tunas Bangsa Desa Gedung Buruk Muara Belida Kab. Muara Enim	18.000.000,00
145	KB Bina IlmiDesa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Kab. Muara Enim	16.200.000,00
146	KB Sohibil IlmiDesa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kab. Muara Enim	27.000.000,00
147	KB Pelita Harapan Bangsa Desa Mulia Abadi Dusun Ulak Baru Muara Belida Kab. Muara Enim	12.000.000,00
148	KB Kasih Bunda Desa Kayu Ara Batu Muara Belida Kab. Muara Enim	21.000.000,00
149	TK YWKA Muara Enim Jl. Jend. Sudirman Pelitاسari No.8 Muara Enim Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	46.200.000,00
150	TK Play Group Arrafah Muara Enim Jl. Pelawaran Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	18.600.000,00
151	TK Kemala Bhayangkari 08 Muara Enim Jl. Smb li Muara Enim Pasar li Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	48.000.000,00
152	TK Kartika II-7 Rindam II Sriwijaya Karang Raja Jl. Lintas Sumatera Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	16.800.000,00
153	TK Bismillah Amaliah Jenderal Sudirman Gang Kompas No 21 Talang Jawa Pasar li Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	19.800.000,00
154	TK Play Group Al Azzhar Muara Enim Jl. Lintas Sumatera Muara Enim Pasar lii Keccamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	42.600.000,00
155	TK PKK Kencana Karang Raja Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	34.800.000,00
156	TK Pertiwi Muara Enim Tungkal Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	48.000.000,00
157	TK IT Rabbani Jl. Pramuka IV Gang Damai Pasar II Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	49.800.000,00
158	KB Madani Jalan HTI SDN 23 Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	12.000.000,00
159	Paud Terpadu Permana Jl.Inspektur Slamet No. 69 A Pasar II Kecamatan Kab. Muara Enim	37.800.000,00
160	TK Harapan Bunda Muara Harapan Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	23.400.000,00
161	KB Handayani Jalan Bemban Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	22.800.000,00
162	KB Terpadu Al-Ishlah Trans Unit 8 Desa Harapan Jaya Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	36.000.000,00
163	KB Bunga Tanjung Sultan Mahmud Badarudin II Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	0,00
164	TK Darul Hikmah Jln.H.T.I Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	15.600.000,00
165	KB Tunas Muda Jalan Cempaka, Blok. C Saka Jaya Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	27.000.000,00
166	TK Mutiara HatiJl. Lintas Sumatera Lorong Masjid Darusalam Dusun III Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	21.600.000,00
167	TPA Bunda IjaJln Jend Sudirman Gg Duku No 35 Talang Jawa Pasar III Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	10.800.000,00
168	TK Al Barkah Jl Lintas SumateraDesa Tanjung Serian Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	10.800.000,00
169	TK Kartika II-10 Karang Raja Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kab. Muara Enim	9.000.000,00
170	TK Pertiwi Sugih Waras Sugih Waras Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	36.000.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
171	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Pagar Agung Pagar Agung Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	26.400.000,00
172	TK Nurul Ulum Jl. Kud Panca Mulia Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	48.000.000,00
173	TK Kusuma Bangsa Desa Sumberahayu Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	32.400.000,00
174	TK Budi Luhur Desa Kencana Mulia Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	18.000.000,00
175	TK Aisyiyah 10 Baru Rambang Jl. Raya Trans Sugih Waras Baru Rambang Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	0,00
176	KB Citra Mulia Jl KalanganDesa Negeri Agung Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	19.200.000,00
177	KB Bunga Tanjung Raya Sugih WarasDesa Tanjung Raya Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	30.000.000,00
178	KB Tunas Harapan Jl Kabupaten No 01Desa Sukarami Kecamatan RAMBANG Kab. Muara Enim	19.200.000,00
179	KB Mentari, Barito Kampung V Pengadangan Ds Sugihan Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	21.600.000,00
180	TK Tunas MulyaJl. Garuda Simpang 4 Marga Mulya Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	46.200.000,00
181	TK PertiwiDesa Kencana Mulia, Kec. Rambang Kab. Muara Enim	15.000.000,00
182	PAUD Ar Rahman Desa Sugih Waras Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	18.000.000,00
183	TK Tunas BangsaDesa Air Keruh, Kec. Rambang Kab. Muara Enim	15.000.000,00
184	TK Anggrek Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	16.200.000,00
185	KB Al BarokahJalan PPKR Dusun 6 Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kab. Muara Enim	0,00
186	TK IKI PTPN VII Suni JemenangKomplek PTPN VII Suni Desa Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	36.000.000,00
187	TK Lematang Lestari Komplek PT TEL Desa Banuayu Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	48.000.000,00
188	TK Anisyah Kuripan Desa Kuripan Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	16.800.000,00
189	TK PKK Lubuk Raman Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	42.600.000,00
190	TK Serasan Abadi Muara Emburung Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	0,00
191	TK Dharma Kumara Air Talas Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	10.200.000,00
192	TK Mandiri Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	18.600.000,00
193	KB Bina Balita Komplek PTPN VII Suni Desa Jemenang Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	7.800.000,00
194	TK Kasih Bunda Jln Pertamina Desa Gemawang Kecamatan Rambang DangkuKab. Muara Enim	20.400.000,00
195	KB Bintang Kecil Jln. Pertamina Dusun 3 Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang DangkuKab. Muara Enim	25.800.000,00
196	KB Rizki Ananda Desa Air Limau Kecamatan Rambang DangkuKab. Muara Enim	18.000.000,00
197	KB Permata Hati Dusun Tiga Desa Banuayu Kecamatan Rambang DangkuKab. Muara Enim	13.800.000,00
198	KB Pelita Mutiara Desa Gunung RajaKecamatan Rambang DangkuKab. Muara Enim	34.200.000,00
199	KB Amrina Rosyadah Kabupaten Desa Batu Raja Kecamatan Rambang DangkuKab. Muara Enim	22.200.000,00
200	KB Al-MurayahJln. Kabupaten Kecamatan Rambang DangkuKab. Muara Enim	27.000.000,00
201	KB Pelangi Jalan Lintas Kabupaten Dusun V Desa Siku Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	16.800.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
202	KB Mutiara Hati Desa Kuripan BaruKecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	15.000.000,00
203	TK Tunas Bangsa Dusun 1 Desa Aur Duri Kecamatan RambangDangku Kab. Muara Enim	16.200.000,00
204	KB Al Haqqi Blok F Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	9.000.000,00
205	POS Paud Harapan Bunda Dusun 1 Desa Air Cekdam Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	13.800.000,00
206	KB Malin Pangga Desa Muara Niru Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	19.800.000,00
207	KB Bondan Indah Desa Gerinam Kecamatan Rambang Dangku Kab. Muara Enim	8.400.000,00
208	KB Play Reading Desa Suban JerijiKecamatan Rambang DangkuKab. Muara Enim	42.000.000,00
209	TK Pertiwi Tebat Agung Jl Jenderal Sudirman No 1 Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang DangkuKab. Muara Enim	21.600.000,00
210	TK Mawar Jalan Laskar Raya Desa Penyandingan Kecamatan Semende Darat LautKab. Muara Enim	18.000.000,00
211	TK Melati Lintas Lahat Kampung 1 Muara Danau Kecamatan Semende Darat LautKab. Muara Enim	10.800.000,00
212	TK Pertiwi Jl Raya Lintas Lahat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat LautKab. Muara Enim	15.000.000,00
213	TK Anggrek Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut Kab. Muara Enim	12.600.000,00
214	KB Mawar Jln.Raya Lahat No.47 Desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat LautKab. Muara Enim	9.000.000,00
215	KB Raihan Jl. Lingkar Atas Desa Karya Nyata Kecamatan Semende Darat Laut Kab. Muara Enim	12.000.000,00
216	KB Puyang Tuan Jalan Pagar Agung Desa Perapau Kecamatan Semende Darat Laut Kab. Muara Enim	7.800.000,00
217	KB Pelangi Ceria Jalan Laskar Alirudin Kampung V Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kab. Muara Enim	12.000.000,00
218	TK Mandiri Jalan Goethermal Desa Tenang Waras Kecamatan Semende Darat LautKab. Muara Enim	16.800.000,00
219	TK Cendrawasih Desa Gunung AgungKecamatan Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim	9.000.000,00
220	TK Harapan Bersama Jl. Tanjung Raya Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim	21.000.000,00
221	KB Tunas Bangsa Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kab.Muara Enim	18.600.000,00
222	TK Amaliyah Jalan Pematang Panjang Desa Kota Padang Kecamatan Semende Darat TengahKab. Muara Enim	9.000.000,00
223	TK Tunggu Tubang Jalan Ulu Enim Desa Tebing Abang Kecamatan Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim	10.800.000,00
224	TK Beringin Jaya Desa Batu Surau Kecamatan Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim	10.800.000,00
225	TK Al Ikhlas Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim	15.000.000,00
226	TK Satu Warna Desa Swarna Dwipa Kecamatan Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim	12.000.000,00
227	TK PGRI Desa Tenam Bungkuk Kecamatan Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim	9.000.000,00
228	KB Tunas Mulya Jln Bogenfiel Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	20.400.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
229	KB Harapan Bangsa Desa AremantaiKecamatan Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	15.000.000,00
230	KB Harapan Jaya Desa Pajar BulanKecamatan Semende Darat Ulu Kab.Muara Enim	22.200.000,00
231	TK Kartini Komplek SDN 13 Semende Darat Ulu Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kab.Muara Enim	18.600.000,00
232	TK PGRI Jln. Lintas Cahaya Alam, Desa Datar Lebar, Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	12.000.000,00
233	KB Marqisah Jln Ulu Enim Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	27.000.000,00
234	KB Bunda Pertiwi Jalan Raya Desa Tanjung Tiga Kecamatan Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	13.200.000,00
235	KB Teratai Dusun I Desa Danau Gerak Kecamatan Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim	15.600.000,00
236	TK Raudhatul Ulum Desa Siring Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim	10.800.000,00
237	KB Cempaka Sinar Jaya Dusun III Sinar Jaya Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim	11.400.000,00
238	PAUD Terpadu Harapan BangsaJalan Raya Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim	16.800.000,00
239	KB Ananda Raya Modong Sukarami. Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim	19.800.000,00
240	KB Tunas Bangsa Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim	21.000.000,00
241	KB Az-Zahra Jl. Harapan. Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim	26.400.000,00
242	KB Teratai Desa Kasai Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim	18.000.000,00
243	KB Cahaya Bangsa Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim	27.000.000,00
244	SPS Bhakti Pertiwi Jl. Raya Modong Sukarami. Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim	24.000.000,00
245	Gelanggang Jl.Sungai Gelanggang Desa Petar Dalam Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim	15.000.000,00
246	KB Aisyah Desa Suka Cinta kecamatan Sungai Rotan Kab Muara Enim	19.200.000,00
247	PAUD Melati Jl.Harapan Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan Kab. Muara Enim	13.200.000,00
248	KB Trans Handayani Dusun IV Desa Suka Jadi Kecamatan Sungai Rotan Kab. Muara Enim	12.000.000,00
249	KB. Az-Zahra Dusun 2 Sukadana Kecamatan Sungai Rotan Kab. Muara Enim	26.400.000,00
250	KB Al Khoiri Desa Paya Angus Kecamatan Sungai Rotan Kab. Muara Enim	22.200.000,00
251	KB Bintang Lematang Jalan Lingkar Desa Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan Kab. Muara Enim	25.200.000,00
252	Kb Asyahirah Jalan Raya Modong Sukarami Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kab. Muara Enim	24.000.000,00
253	KB Al-Azzam Jalan Abu Kerie Desa Petar Luar Kec.Sungai Rotan Kab. Muara Enim	18.000.000,00
254	KB Mutiara Lestari Dusun 2 Desa Danau Baru Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim	13.800.000,00
255	TK Asyafatul Jannah Tanjung Agung Jl. Lingkar Desa Lembak Kecamatan Tanjung AgungKab.Muara Enim	21.600.000,00
256	TK Tunas Bangsa Tanjung Bulan Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Agung Kab.Muara Enim	18.000.000,00

No.	Penerima Hibah	Realisasi 2018 (Rp)
257	TK Tunas Harapan Embawang Desa Embawang Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	0,00
258	TK Mutiara Ilmu Paduraksa Jl. Baturaja Lintas Sumatera Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	14.400.000,00
259	TK Baitul Makmur Lesung Batu Jl. Desa Lesung Batu Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	10.800.000,00
260	TK Raudhatul Jannah Pandan Enim Jl. Baturaja No. 246 Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	15.000.000,00
261	TK Nusa Indah Tanjung Agung Jl. Lintas Baturaja Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	18.000.000,00
262	TK Tunas Pandan Mulya Jl. Lintas Sumatera Desa Pandan Enim Dusun 2 No. 146 Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	18.000.000,00
263	KB Nur Afiffah Napal Carih Muara Emil Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	22.200.000,00
264	Tk Pensel Lintas Sumatera Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	33.600.000,00
265	TK Mentari Desa Lubuk Nipis Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	10.200.000,00
266	TK Adinda Jalan Air Terjun Desa Bedegung Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	14.400.000,00
267	TK Matas Jaya Lintas Batu Raja Desa Matas Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	15.600.000,00
268	KB Mutiara Putih Jalan Lintas Batu Raja Desa Suka Raja Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	15.600.000,00
269	KB Limbun Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	19.800.000,00
270	KB Kuncup Melati Jl. Baturaja Lintas Sumatera Desa Lambur Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	16.200.000,00
271	PAUD Budi Jaya Desa Lebak Budi Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	12.600.000,00
272	TK Al Barokah Jl Lintas Baturaja Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	15.000.000,00
273	TK Kasih Ibu Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Agung Kab. Muara Enim	19.200.000,00
274	TK Al-Arsy Jalan Baturaja Desa Pandan Dulang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim	9.600.000,00
275	TK Mekar Oleo Desa Muara Meo Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim	9.600.000,00
276	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Ujan Mas Desa Ujan Mas Baru Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim	42.600.000,00
277	TK Ramatuan Jl. Kemas Dusun I No. 22 Tanjung Raman Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim	19.200.000,00
278	TK Angkatan 45 Sekundang Jln. Adi Pati Dusun IX Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim	46.200.000,00
279	TK Harapan Bunda Jl Lintas Muara Enim Palembang Desa Muara Gula Baru Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim	18.000.000,00
230	TKIT Insan Rabbani Jln. Pesantren Dusun X Desa Ujanmas Lama Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim	33.000.000,00
231	KB Melati Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas Kab. Muara Enim	23.400.000,00
232	TK Sehati Desa Ujan Mas Baru Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim	0,00
TOTAL BELANJA HIBAH		86.262.033.807,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Modal Tanah	6.004.887.500,00	5.999.991.824,00	99,92	1.377.900.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.131.709.243,95	66.879.546.826,35	81,43	89.535.843.613,15
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.945.322.850,00	128.871.946.324,18	96,94	150.008.159.352,93
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	337.944.864.242,00	333.549.719.655,93	98,70	253.523.409.300,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.843.428.425,00	21.327.629.034,00	97,56	35.901.263.237,00
Jumlah	580.870.212.260,95	556.628.833.664,46	95,82	530.346.575.503,08

Realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp556.628.833.664,46 atau 95,82% dari anggarannya sebesar Rp580.870.212.260,95 dan mengalami kenaikan sebesar Rp26.264.474.061,38 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp530.346.575.503,08. yang berasal dari:

1) Belanja Modal Tanah

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 serta Realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pengadaan Tanah Pengguna Lain	4.887.500,00	4.858.750,00	99,41	0,00
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	6.000.000.000,00	5.995.133.074,00	99,92	879.800.000,00
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	498.100.000,00
Jumlah	6.004.887.500,00	5.999.991.824,00	99,92	1.377.900.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 sebesar Rp5.999.991.824,00 atau 99,92% dari anggarannya sebesar Rp6.004.887.500,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.622.091.824,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp1.377.900.000,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 65 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	5.000.000,00	4.990.000,00	99,80	333.881.625,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	50.500.000,00	50.070.000,00	99,15	1.911.244.000,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	10.754.205.700,00	5.263.371.479,00	48,94	7.552.308.200,00
Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	30.000.000,00	28.600.000,00	95,33	0,00
Pengadaan Alat Angkut Apung tak Bermotor	25.000.000,00	24.850.000,00	99,40	0,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	176.200.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	27.500.000,00	23.125.000,00	84,09	0,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	5.000.000,00	4.990.000,00	99,80	0,00
Pengadaan Alat Ukur	1.442.867.300,00	532.450.000,00	36,90	117.098.800,00
Pengadaan Alat Pengolahan	198.000.000,00	174.851.000,00	88,31	143.960.800,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	34.100.000,00	19.380.000,00	56,83	17.600.000,00
Pengadaan Alat Kantor	2.237.533.750,00	2.089.588.974,00	93,39	1.148.808.010,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.447.197.500,00	10.803.985.605,00	94,38	18.857.766.659,00
Pengadaan Komputer	13.228.231.665,00	13.022.501.229,00	98,44	4.834.381.455,00
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.634.662.650,00	2.547.955.950,00	96,71	1.116.293.575,00
Pengadaan Alat Studio	1.395.440.600,00	1.285.693.383,00	92,14	708.796.660,00
Pengadaan Alat Komunikasi	120.300.000,00	117.700.000,00	97,84	294.587.500,00
Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
Pengadaan Alat Kedokteran	28.814.583.670,00	24.728.199.264,35	85,82	47.860.713.889,15
Pengadaan Alat Kesehatan	6.156.672.588,95	3.008.773.645,00	48,87	0,00
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.837.373.270,00	1.498.525.218,00	81,56	3.403.170.492,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	27.000.000,00	26.400.000,00	97,78	892.965.448,00
Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi lingkungan	1.305.000.000,00	1.299.148.579,00	99,55	0,00
Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	45.325.000,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	355.540.550,00	324.397.500,00	91,24	99.141.500,00
Jumlah	82.131.709.243,95	66.879.546.826,35	81,43	89.535.843.613,15

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar Rp66.879.546.826,35 atau 81,43% dari anggarannya sebesar Rp82.131.709.243,95 dan mengalami penurunan sebesar Rp22.656.296.786,80 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp89.535.843.613,15.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 66 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 serta realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	128.734.132.850,00	125.210.153.324,18	97,26	146.489.796.702,93
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.942.390.000,00	1.928.308.000,00	99,28	1.322.127.650,00
Pengadaan Bangunan Bersejarah	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	860.000.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	922.000.000,00	640.800.000,00	69,50	640.100.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	785.000.000,00	538.385.000,00	68,58	646.800.000,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	361.800.000,00	354.800.000,00	98,07	49.335.000,00
Jumlah	132.945.322.850,00	128.871.946.324,18	96,94	150.008.159.352,93

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 sebesar Rp128.871.946.324,18 atau 96,94% dari anggarannya sebesar Rp132.945.322.850,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp21.136.213.028,75 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp150.008.159.352,93.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00	164.063.688.050,00
Pengadaan Jembatan	275.534.914.300,00	272.545.724.235,93	98,92	24.027.211.800,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	44.132.200.700,00	43.340.073.700,00	98,21	52.763.277.050,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan	108.800.000,00	108.500.000,00	99,72	1.651.132.800,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Penanggulangan BA				
Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Baku	7.617.875.000,00	7.295.094.000,00	95,76	0,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.964.300.000,00	2.963.100.000,00	99,96	0,00
Pengadaan Bangunan Air	1.096.937.992,00	1.023.882.960,00	93,34	207.763.500,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	198.500.000,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	800.000.000,00	770.457.000,00	96,31	1.863.169.000,00
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	3.326.700.000,00
Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	24.970.000,00
Pengadaan Jaringan Listrik	5.219.836.250,00	5.037.939.500,00	96,52	5.396.997.100,00
Pengadaan Jaringan Telepon	455.000.000,00	449.948.260,00	98,89	0,00
Jumlah	337.944.864.242,00	333.549.719.655,93	98,70	253.523.409.300,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 sebesar Rp333.549.719.655,93 atau 98,70% dari anggarannya sebesar Rp337.944.864.242,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp80.026.310.355,93 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp253.523.409.300,00.

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jembatan sebesar Rp272.545.724.235,93, terdiri dari realisasi untuk Pengadaan Jalan sebesar Rp258.363.632.235,93 dari anggaran sebesar Rp261.217.850.300,00 dan realisasi untuk Pengadaan Jembatan sebesar Rp14.182.092.000,00 dari anggaran sebesar Rp14.317.064.000,00.

Dari realisasi Belanja Modal Pengadaan Jembatan sebesar Rp272.545.724.235,93, nilai Pengadaan Jalan dan Pengadaan Jembatan yang dicatat sebagai aset masing-masing sebesar Rp250.739.679.838,53 dan Rp17.476.865.000,00 setelah dikurangi dengan nilai sisa hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp3.004.229.397,40 dan pembayaran utang TA 2017 sebesar Rp1.324.950.000,00.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 serta Realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 68 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pengadaan Buku	20.569.761.425,00	20.074.643.034,00	97,59	6.629.168.680,00
Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	42.000.000,00	40.350.000,00	96,07	35.870.000,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	40.000.000,00	36.470.000,00	91,18	0,00
Pengadaan Hewan	500.000.000,00	498.000.000,00	99,60	90.225.000,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	691.667.000,00	678.166.000,00	98,05	239.545.750,00
Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	7.729.761.872,00
Belanja BOS	0,00	0,00	0,00	21.176.691.935,00
Jumlah	21.843.428.425,00	21.327.629.034,00	97,64	35.901.263.237,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar Rp21.327.629.034,00 atau 97,64% dari anggarannya sebesar Rp21.843.428.425,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp14.573.634.203,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp35.901.263.237,00.

c. Belanja Tak Terduga

Anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 69 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	1.443.658.000,00	7,22	3.603.298.000,00

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2018 sebesar Rp1.443.658.000,00 atau 7,22% dari anggarannya sebesar Rp20.000.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp2.159.640.000,00 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp3.603.298.000,00.

Belanja Tidak Terduga diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan pembangunan fisik untuk korban bencana alam yang terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2018 sebagai berikut:

Tabel 70 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2018

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Angsuran I Pekerjaan Pembukaan Trase Jalan Desa Batu Surau Kecamatan Semende Darat Tengah oleh CV.Kayla Putri Asmari Palembang.	721.829.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Angsuran II dan III Pekerjaan Pembukaan Trase Jalan Desa Batu Surau Kecamatan Semende Darat Tengah oleh CV.Kayla Putri Asmari Palembang	721.829.000,00
	Jumlah	1.443.658.000,00

7.4.1.3 TRANSFER

Transfer TA 2018 berupa Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dan Transfer Bantuan Keuangan yang terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan

kemampuan keuangan. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Anggaran dan realisasi Transfer TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	10.554.676.141,00	10.554.676.141,00	100,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	398.912.751.679,83	398.912.751.679,13	100,00	353.445.649.342,00
Jumlah	409.467.427.820,83	409.467.427.820,13	100,00	353.445.649.342,00

Anggaran dan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 72 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.538.208.308,00	9.538.208.308,00	100,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.016.467.833,00	1.016.467.833,00	100,00	0,00
Jumlah	10.554.676.141,00	10.554.676.141,00	100,00	0,00

Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 73 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	397.395.903.451,83	397.395.903.451,13	100,00	352.387.895.614,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.516.848.228,00	1.516.848.228,00	100,00	1.057.753.728,00
Jumlah	398.912.751.679,83	398.912.751.679,13	100,00	353.445.649.342,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2017 sebesar Rp398.912.751.679,13 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp398.912.751.679,83 dan mengalami kenaikan sebesar Rp45.467.102.337,13 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp353.445.649.342,00.

a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa TA 2018 sebesar Rp397.395.903.451,13 atau 100,00% dari anggaran Rp397.395.903.451,83. Dari total realisasi tersebut sebesar Rp208.161.174.000,00 bersumber dari APBN dan sebesar Rp189.234.729.451,13 bersumber dari APBD.

b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya berupa transfer bantuan keuangan ke partai politik. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2018 sebesar Rp1.516.848.228,00 atau 100,00% dari anggaran.

Bantuan Keuangan kepada partai politik diberikan berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing partai politik dengan nilai bantuan per suara sebesar Rp413.00 per suara per bulan atau sebesar Rp4.956,00 per suara per tahun. Rincian perolehan bantuan keuangan per partai politik disajikan sebagai berikut:

Tabel 74 Rincian Perolehan Bantuan Keuangan per Partai Politik

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Nilai Bantuan per Suara perbulan	Nilai Bantuan per Suara per tahun	Jumlah Bantuan yang Diterima (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat	27.003	413.00	4.956.00	133.826.868,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	20.940	413.00	4.956.00	103.778.640,00
3	Parta Keadilan Sejahtera	21.498	413.00	4.956.00	106.544.088,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49.870	413.00	4.956.00	247.155.720,00
5	Partai Golongan Karya	40.865	413.00	4.956.00	202.526.940,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	24.791	413.00	4.956.00	122.864.196,00
7	Partai Demokrat	34.754	413.00	4.956.00	172.240.824,00
8	Partai Amanat Nasional	22.693	413.00	4.956.00	112.466.508,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	27.635	413.00	4.956.00	136.959.060,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	20.626	413.00	4.956.00	102.222.456,00
11	Partai Bulan Bintang	15.388	413.00	4.956.00	76.262.928,00
JUMLAH					1.516.848.228,00

7.4.1.4 BELANJA DAN TRANSFER

Anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 75 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Belanja	2.228.711.817.274,99	2.024.892.686.232,76	90,85	1.897.083.715.447,98
Transfer	409.467.427.820,83	409.467.427.820,13	100,00	353.445.649.342,00
Jumlah Belanja dan Transfer	2.638.179.245.095,82	2.434.360.114.052,89	92,27	2.250.529.364.789,98

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2018 sebesar Rp2.434.360.114.052,89 atau 92,27% dari anggarannya sebesar Rp2.638.179.245.095,82 dan mengalami kenaikan sebesar Rp183.830.749.262,91 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp2.250.529.364.789,98.

7.4.1.5 SURPLUS / DEFISIT

Tabel 76 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Surplus/Defisit	192.033.640.697,06	91.223.519.998,41	47,50	151.820.895.717,28

7.4.1.6 PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan

Jumlah realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2018 sebesar Rp195.172.898.761,58 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu. Perbandingan antara realisasi dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 77 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) tahun lalu	125.172.898.761,58	125.172.898.761,58	100,00	24.044.052.831,22
Pencairan Dana Cadangan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	195.172.898.761,58	195.172.898.761,58	100,00	24.044.052.831,22

b. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 78 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00		31.880.500.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00		15.907.000.000,00
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00		2.904.549.786,92
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	3.139.258.064,52	3.139.258.064,52	100,00	0,00
Jumlah	3.139.258.064,52	3.139.258.064,52	100,00	50.692.049.786,92

Pembayaran Utang Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp3.139.258.064,52 atas penerusan pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation* (UWSSP) yang tercatat sebagai kewajiban jangka panjang dalam negeri sebesar Rp97.148.652.820,00.

7.4.1.7 PEMBIAYAAN NETTO

Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 79 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
Pembiayaan Netto	192.033.640.697,06	192.033.640.697,06	100,00	(26.647.996.955,70)

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2018. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2018 sebesar Rp192.033.640.697,06 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp192.033.640.697,06 dan mengalami kenaikan sebesar Rp218.681.637.652,76 dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar (Rp26.647.996.955,70)

7.4.1.8 SILPA

Anggaran dan realisasi SiLPA TA 2018 serta realisasi TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 80 Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2018 serta Realisasi TA 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
SILPA	0,00	283.257.160.695,47	0,00	125.172.898.761,58

Jumlah realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam TA 2018 sebesar Rp283.257.160.695,47 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran Tahun 2018. SiLPA TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp158.084.261.933,89 dibandingkan SiLPA TA 2017 sebesar Rp125.172.898.761,58.

Rincian SiLPA TA 2018 sebesar Rp283.257.160.695,47 terdiri dari:

Tabel 81 Rincian SiLPA TA 2018

Uraian	Nilai
Kas di Rekening Kas Umum Daerah Bank SumselBabel Nomor Rekening 147-30-00001	245.372.471.103,96
Setara Kas diBRI Nomor Rekening 0128-01-000131-30-8	6.424.735.078,00
Setara Kas di BTN Nomor Rekening 00000601-01-30-000011-4	6.175.786,14
Setara Kas di BNI Nomor Rekening 229694352	3.671.595,00
Kas di Bendahara JKN FKTP (On Bank)	5.212.730.708,00
Kas di Bendahara JKN FKTP (On Hand)	49.939.209,00
Kas di Bendahara BLUD	23.613.649.690,37
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.291.602,00
Kas di Bendahara Dana BOS	2.569.495.923,00
JUMLAH	283.257.160.695,47

7.4.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP-SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah/dikurangi SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 82 Mutasi SILPA 2018

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	125.172.898.761,58	24.044.052.831,22
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(125.172.898.761,58)	(24.044.052.831,22)
	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	283.257.160.695,47	125.172.898.761,58
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	283.257.160.695,47	125.172.898.761,58

- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SILPA TA sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan yaitu sebesar Rp125.172.898.761,58.
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.
Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan merupakan SiLPA Tahun 2017 sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2018 setelah dikoreksi sebesar Rp125.172.898.761,58
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp283.257.160.695,47 atau naik 226,29% yaitu sebesar Rp158.084.261.933,89 dari SiLPA Tahun 2017 sebesar Rp125.172.898.761,58.
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya bernilai nol.
- e. SAL Akhir Tahun 2018 Rp283.257.160.695,47 atau naik 226,29% yaitu sebesar Rp158.084.261.933,89 dari SAL Awal (Tahun 2017) sebesar Rp125.172.898.761,58.

7.4.3 NERACA

Penjelasan pos-pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran. Daftar lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dengan rincian sebagai berikut:

7.4.3.1 ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp5.078.067.884.927,25 dan Rp4.817.775.319.177,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83 Rincian Aset Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Aset lancar	502.480.253.067,96	297.959.056.244,67
Investasi Jangka Panjang	335.238.958.881,09	349.966.974.906,05
Aset Tetap	4.172.014.394.191,91	4.017.849.811.548,96
Dana Cadangan	0,00	80.190.225.826,55
Aset Lainnya	68.334.278.786,29	71.809.250.651,56
Jumlah	5.078.067.884.927,25	4.817.775.319.177,79

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp502.480.253.067,96 dan Rp297.959.056.244,67 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 84 Daftar Aset Lancar 2018 dan 2017

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Kas dan Setara Kas	283.266.566.075,47	125.183.210.931,85
Piutang	135.142.759.486,79	143.896.844.788,15
Beban Dibayar Dimuka	969.564.810,89	823.763.025,84
Persediaan	83.101.362.694,81	28.055.237.498,83
Jumlah	502.480.253.067,96	297.959.056.244,67

1) Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp283.266.566.075,47 dan Rp125.183.210.931,85. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 85 Rincian Kas dan Setara Kas

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Kas di Kas Daerah	251.807.053.563,10	93.850.185.255,09
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.291.602,00	19.104.214,00
Kas di Bendahara Penerimaan	9.405.380,00	10.312.170,27
Kas di BLUD	23.613.649.690,37	20.838.116.520,49
Kas di Rekening JKN	5.262.669.917,00	7.009.169.519,00
Kas di Bendahara Dana Bos	2.569.495.923,00	3.456.323.253,00
Jumlah	283.266.566.075,47	125.183.210.931,85

a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas per 31 Desember 2018 dan 2017 yang ada direkening Bank SumselBabel, rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), rekening Bank Tabungan Negara (BTN) dan rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86 Rincian Kas di Kas Daerah

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Rekening Bank SumselBabel Nomor 147-30-00001	245.372.471.103,96	90.266.485.915,31
2	Rekening Bank BRI Nomor 00000128-01-000131-30-8	6.424.735.078,00	3.577.462.054,00
3	Rekening Bank BTN nomor 60101300000114	6.175.786,14	6.237.285,78
4	Rekening Bank BNI Nomor 229694352	3.671.595,00	0,00
	Jumlah	251.807.053.563,10	93.850.185.255,09

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp4.291.602,00 dan Rp19.104.214,00. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 87 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.542,00	0,00
2	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.047.700,00	0,00
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BPKAD SKPKD	140.000,00	0,00
4	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran DPPKB	20.000,00	0,00
5	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kominfo	60.000,00	0,00
6	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BPKAD	0,00	19.053.000,00
7	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran DPPPA	0,00	11.817,00

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
8	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Balitbangda	1.779,00	3.139,00
9	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Bapenda	0,00	1.548,00
10	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup	0,00	310,00
11	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kec. Lembak	0,00	34.400,00
12	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kec. Belida Darat	10.581,00	0,00
13	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kec. Benakat	10.000,00	0,00
	Jumlah	4.291.602,00	19.104.214,00

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.291.602,00 terdiri atas :

- 1) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran DPMPTSP sebesar Rp1.542,00 merupakan pendapatan jasa giro pemegang kas yang terdapat pada rekening bank;
- 2) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.047.700,00 merupakan sisa belanja LS yang telah dijadikan pengurang belanja dan sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan ke RKUD;
- 3) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BPKAD SKPKD sebesar Rp140.000,00 merupakan sisa belanja LS yang telah dijadikan pengurang belanja dan sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan ke RKUD;
- 4) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran DPPKB sebesar Rp20.000,00 merupakan sisa belanja LS yang telah dijadikan pengurang belanja dan sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan ke RKUD;
- 5) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kominfo sebesar Rp60.000,00 merupakan sisa belanja LS yang telah dijadikan pengurang belanja dan sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan ke RKUD;
- 6) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Balitbangda sebesar Rp1.779,00 merupakan pendapatan jasa giro pemegang kas yang terdapat pada rekening bank;
- 7) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kec. Belida Darat sebesar Rp10.581,00 merupakan pendapatan jasa giro pemegang kas yang terdapat pada rekening bank;
- 8) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kec. Benakat sebesar Rp10.000,00 merupakan sisa belanja GU yang telah dijadikan pengurang belanja dan sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan ke RKUD.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp9.405.380,00 dan Rp10.312.170,27. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 88 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Saldo Kas di Bend. Penerimaan Dinas Perdagangan	1.750.000,00	0,00
2	Saldo Kas di Bend. Penerimaan Dinas PU dan Penataan Ruang	500,00	0,00
3	Saldo Kas di Bend. Penerimaan Dinas Kesehatan	0,00	7.570.000,00
4	Saldo Kas di Bend. Penerimaan Dinas Perhubungan	0,00	2.722.000,00
5	Saldo Kas di Bend. Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah	80,00	20.170,27
6	Saldo Kas di Bend. Penerimaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	7.654.800,00	0,00
	Jumlah	9.405.380,00	10.312.170,27

Nilai Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.405.380,00 terdiri atas :

- 1) Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan sebesar Rp1.750.000,00 merupakan penerimaan atas Retribusi Pelayanan Pasar yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor di RKUD;
- 2) Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp500,00 merupakan penerimaan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor di RKUD;
- 3) Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp80,00 merupakan penerimaan atas Pajak Warung yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor di RKUD;
- 4) Kas Di Bendahara Penerimaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp7.654.800,00 merupakan penerimaan atas Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor di RKUD.

d) Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD RSUD dr. H. M. Raba'in per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp23.613.649.690,37 dan Rp20.838.116.520,49 pada rekening:

Tabel 89 Rincian Kas di BLUD

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Bank BRI – Rek Nomor 00000128-01-000059-30-2 (Bendahara Penerima)	624.925,00	1.145.000,00
2	Bank SumselBabel – Rek Nomor 147-30-20106 (Bendahara Penerima)	21.852.553.462,84	20.526.593.157,84
3	Bank SumselBabel – Rek Nomor 147-30-10334 (Jamsoskes)	1.438.965.575,00	10.104.404,00
4	Bank Mandiri – Rek Nomor 112-00-0000010-4 (Bendahara Penerima)	359.175,53	8.610.920,65
5	BNI Rek No 372760762	321.146.552,00	291.663.038,00
	Jumlah	23.613.649.690,37	20.838.116.520,49

e) **Kas di Rekening JKN**

Saldo Kas di Rekening JKN per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp5.262.669.917,00 dan Rp7.009.169.519,00. Rincian saldo kas per masing-masing FKTP tersaji pada **Lampiran 1**.

f) **Kas di Bendahara Dana BOS (BOS APBN dan PSG SUMSEL)**

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS terdiri atas:

Tabel 90 Rincian Kas di Bendahara Dana BOS

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
I	Dana BOS APBN, dengan rincian:		
1	SD Negeri	1.318.446.693,00	2.295.556.189,00
2	SMP Negeri	604.206.912,00	667.945.961,00
	Jumlah 1	1.922.653.605,00	2.963.502.150,00
II	Dana APBD dan PSG, dengan rincian:		
1	SD Negeri	451.841.501,00	359.399.259,00
2	SMP Negeri	195.000.817,00	133.421.844,00
	Jumlah 2	646.842.318,00	492.821.103,00
	Total (Jumlah 1 +Jumlah 2)	2.569.495.923,00	3.456.323.253,00

Rekapitulasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir BOS (BOS APBN dan PSG) tersaji pada **Lampiran 4**. Sementara itu, rincian saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir BOS (BOS APBN dan PSG) per masing-masing sekolah penerima dana tersaji pada **Lampiran 4a** sampai dengan **Lampiran 4d**.

2) **Piutang**

Piutang Pemerintah Kabupaten Muara Enim per 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya seperti yang dijelaskan berikut ini:

Tabel 91 Rincian Piutang

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Pendapatan	37.110.948.491,97	35.684.557.319,27
2	Piutang Lainnya	122.344.503.669,09	129.284.069.993,13
	Jumlah Piutang	159.455.452.161,06	164.968.627.312,40

Daftar rincian Piutang tersaji dalam **Lampiran 5**.

a) Piutang Pendapatan

Saldo Piutang per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp37.110.948.491,97 dan Rp35.684.557.319,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92 Rincian Piutang Pendapatan

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Pajak	36.436.601.613,07	34.278.426.136,07
2	Piutang Retribusi	674.346.878,90	1.406.131.183,20
	Jumlah	37.110.948.491,97	35.684.557.319,27

(1) Piutang Pajak

Tabel 93 Rincian Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	705.250,00
2	Piutang Pajak Restoran	10.906.000,00	15.008.000,00
3	Piutang Pajak Reklame	29.400.288,00	50.914.375,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	165.841.341,00	622.235.071,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	16.514.727,00	1.099.275,00
6	Piutang PBB-P2 Tahun 2014 s.d 2018	21.029.905.522,07	18.346.066.386,07
7	Piutang PBB-P2 Tahun 2009 s.d. 2013	15.181.034.935,00	15.183.796.279,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.998.800,00	58.601.500,00
	Jumlah	36.436.601.613,07	34.278.426.136,07

Adapun rincian mutasi saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Tabel 94 Daftar Mutasi Piutang Pajak Tahun 2018

Jenis Pajak	Saldo Awal Piutang Tahun 2018 (Rp)	Mutasi Piutang Tahun 2018 (Rp)		Saldo Akhir Piutang Tahun 2018 (Rp)
		Penambahan	Pembayaran	
Piutang Pajak Hotel	705.250,00	0,00	705.250,00	0,00
Piutang Pajak Restoran	15.008.000,00	0,00	4.102.000,00	10.906.000,00
Piutang Pajak Reklame	50.914.375,00	7.759.038,00	29.273.125,00	29.400.288,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	622.235.071,00	160.471.424,00	616.865.154,00	165.841.341,00

Jenis Pajak	Saldo Awal Piutang Tahun 2018 (Rp)	Mutasi Piutang Tahun 2018 (Rp)		Saldo Akhir Piutang Tahun 2018 (Rp)
		Penambahan	Pembayaran	
Piutang Pajak Air Tanah	1.099.275,00	15.442.557,00	27.105,00	16.514.727,00
Piutang PBB-P2 Tahun 2014 s.d 2018	18.346.066.386,07	3.234.300.194,00	550.461.058,00	21.029.905.522,07
Piutang PBB-P2 Tahun 2009 s.d. 2013	15.183.796.279,00	0,00	2.761.344,00	15.181.034.935,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	58.601.500,00	1.061.950,00	56.664.650,00	2.998.800,00
Jumlah	34.278.426.136,07	3.419.035.163,00	1.260.859.686,00	36.436.601.613,07

Uraian atas masing-masing Piutang Pajak sebagai berikut:

(a) Piutang Pajak Hotel

Nilai saldo awal Piutang Pajak Hotel Tahun 2018 sebesar Rp705.250,00. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp705.250,00. Sehingga saldo akhir Tahun 2018 piutang Pajak Hotel sebesar Rp0,00.

(b) Piutang Pajak Restoran

Nilai saldo awal Piutang Pajak Restoran Tahun 2018 sebesar Rp15.008.000,00. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.102.000,00 atas nama Pondok Kita (Katering) sehingga saldo akhir Tahun 2018 piutang Pajak Restoran sebesar Rp10.906.000,00.

(c) Piutang Pajak Reklame

Nilai saldo awal Piutang Pajak Reklame Tahun 2018 sebesar Rp50.914.375,00. Tahun 2018 piutang bertambah sebesar Rp7.759.038,00 atas nama CV Devis Jaya Advertising dan PT. *World Innovative Telecommunication*. Realisasi pembayaran Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2018 sebesar Rp29.273.125,00. Sehingga saldo akhir Tahun 2018 sebesar Rp29.400.288,00.

(d) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Nilai saldo awal Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018 sebesar Rp622.235.071,00. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp616.865.154,00. Tahun 2018 piutang bertambah sebesar Rp160.471.424,00 sehingga saldo akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp165.841.341,00.

(e) Piutang Pajak Air Tanah

Nilai Saldo awal Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2018 sebesar Rp1.099.275,00 terdiri dari piutang Tahun 2013 sebesar Rp257.040,00, Tahun 2014 sebesar Rp321.400,00, Tahun 2015 sebesar Rp14.884,00, Tahun 2016 sebesar Rp197.021,00 dan

Tahun 2017 sebesar Rp308.930,00. Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2018 bertambah sebesar Rp15.442.557,00,00. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp27.105,00, sehingga saldo akhir Tahun 2018 sebesar Rp16.514.727,00.

(f) Piutang PBB P2 Tahun 2014 s.d. Tahun 2018

Nilai saldo awal Piutang PBB P2 Tahun 2018 sebesar Rp18.346.066.386,07 terdiri dari piutang Tahun 2014 sebesar Rp6.417.775.659,07, Tahun 2015 sebesar Rp4.830.989.935,00, Tahun 2016 sebesar Rp3.625.766.354,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp3.471.534.438,00. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp550.461.058,00 terdiri dari pembayaran piutang Tahun 2014 sebesar Rp108.803.855,00, Tahun 2015 sebesar Rp101.181.796,00, Tahun 2016 sebesar Rp114.977.147,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp225.498.260,00. Tahun 2018 piutang bertambah sebesar Rp3.234.300.194,00 sehingga saldo akhir Piutang PBB P2 Tahun 2014 s.d 2018 sebesar Rp21.029.905.522,07.

SPPT yang diterbitkan pada Tahun 2018 sebanyak 159.536 SPPT dengan nilai sebesar Rp12.026.881.867,00, masih terdapat SPPT ganda dan tidak ada objek sebanyak 4.478 SPPT dengan nilai sebesar Rp407.185.007,00 dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Kecamatan Benakat sebanyak 188 SPPT dengan nilai sebesar Rp6.993.683,00;
- (2) Kecamatan Muara Enim sebanyak 410 SPPT dengan nilai sebesar Rp203.052.852,00;
- (3) Kecamatan Rambang sebanyak 59 SPPT dengan nilai sebesar Rp2.564.312,00;
- (4) Kecamatan Rambang Dangku sebanyak 283 SPPT dengan nilai sebesar Rp12.745.668,00;
- (5) Kecamatan Sungai Rotan sebanyak 453 SPPT dengan nilai sebesar Rp10.294.938,00;
- (6) Kecamatan Muara Belida sebanyak 271 SPPT dengan nilai sebesar Rp12.720.130,00;
- (7) Kecamatan Lubai Ulu sebanyak 191 SPPT dengan nilai sebesar Rp7.582.348,00;
- (8) Kecamatan Belida Darat sebanyak 114 SPPT dengan nilai sebesar Rp3.108.473,00;
- (9) Kecamatan Belimbing sebanyak 65 SPPT dengan nilai sebesar Rp27.593.811,00;
- (10) Kecamatan Gelumbang sebanyak 333 SPPT dengan nilai sebesar Rp24.651.316,00;
- (11) Kecamatan Gunung Megang sebanyak 653 SPPT dengan nilai sebesar Rp48.327.422,00;
- (12) Kecamatan Kelekar sebanyak 49 SPPT dengan nilai sebesar Rp1.213.076,00;

- (13) Kecamatan Lembak sebanyak 405 SPPT dengan nilai sebesar Rp12.624.295,00
- (14) Kecamatan Lubai sebanyak 767 SPPT dengan nilai sebesar Rp22.018.739,00
- (15) Kecamatan Lawang Kidul sebanyak 13 SPPT dengan nilai sebesar Rp1.223.413,00
- (16) Kecamatan Ujan Mas sebanyak 224 SPPT dengan nilai sebesar Rp10.470.531,00

(g) Piutang PBB P2 Tahun 2009 s.d 2013

Nilai saldo awal Piutang PBB P2 Tahun 2018 sebesar Rp15.183.796.279,00. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.761.344,00, sehingga saldo akhir Piutang PBB P2 Tahun 2009 s.d 2013 sebesar Rp15.181.034.935,00.

(h) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Nilai saldo awal Piutang BPHTB Tahun 2018 sebesar Rp58.601.500,00. Koreksi atas piutang BPHTB Tahun 2017 yang belum diakui sebesar Rp1.021.950 dan koreksi kurang sebesar Rp1.142.500. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp55.522.150,00. Tahun 2018 piutang bertambah sebesar Rp40.000,00, sehingga saldo akhir Piutang BPHTB sebesar Rp2.998.800,00.

Daftar rincian piutang pajak daerah tersaji dalam **Lampiran 5a**.

(2) Piutang Retribusi

Tabel 95 Rincian Piutang Retribusi

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	511.595.878,90	1.280.530.183,20
2	Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar	144.172.000,00	96.282.000,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Jasa Laboratorium DLH	18.579.000,00	29.319.000,00
	Jumlah	674.346.878,90	1.406.131.183,20

Adapun rincian mutasi saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Tabel 96 Daftar Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2018

Jenis Retribusi	Saldo Awal Piutang Tahun 2018 (Rp)	Mutasi Piutang Tahun 2018 (Rp)		Saldo Akhir Piutang Tahun 2018 (Rp)
		Penambahan	Pembayaran	
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.280.530.183,20	56,70	768.934.361,00	511.595.878,90
Retribusi Pelayanan Pasar	96.282.000,00	92.900.000,00	45.010.000,00	144.172.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium	29.319.000,00	0,00	10.740.000,00	18.579.000,00
Jumlah	1.406.131.183,20	92.900.056,70	824.684.361,00	674.346.878,90

Uraian atas masing-masing Piutang Retribusi sebagai berikut.

(a) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Nilai saldo awal Tahun 2018 sebesar Rp1.280.530.183,20. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp768.934.361,00. Tahun 2018 piutang bertambah sebesar Rp56,70, sehingga saldo akhir Piutang Tahun 2018 sebesar Rp511.595.878,90. Sejak Tahun 2016 s.d. Tahun 2017 Dinas Kominfo tidak menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) karena keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2016 yang menetapkan tarif retribusi sebesar 2% dari NJOP sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat dijadikan dasar perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi akan tetapi harus mengacu pada pasal 151, 152 dan 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi murni berdasarkan pada biaya jasa pengawasan dan pengendalian. Di Tahun 2018 Dinas Kominfo melaksanakan penetapan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi tanggal 02 Mei 2018 dan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi tanggal 03 September 2018. Rincian piutang tersaji dalam **Lampiran 5f**.

(b) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Nilai saldo awal Tahun 2018 sebesar Rp96.282.000,00 terdiri dari piutang pasar Muara Enim sebesar Rp58.882.000,00, Pasar Tanjung Enim sebesar Rp31.400.000,00 dan Pasar Desa sebesar Rp6.000.000,00. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp45.010.000,00. Tahun 2018 Piutang Retribusi Pasar bertambah sebesar Rp92.900.000,00, terdiri dari Pasar Muara Enim sebesar Rp30.180.000,00 dan Pasar Tanjung Enim

sebesar Rp62.720.000,00, sehingga saldo akhir piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp144.172.000,00. Rincian piutang tersaji dalam **Lampiran 5h**.

(c) **Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Jasa Laboratorium**

Nilai saldo awal Tahun 2018 sebesar Rp29.319.000,00 terdiri dari piutang Tahun 2014 sebesar Rp884.000,00, Tahun 2015 sebesar Rp7.295.000,00, Tahun 2016 sebesar Rp10.400.000,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp10.740.000,00. Koreksi kurang atas piutang Tahun 2017 sebesar Rp440.000,00. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.300.000,00, sehingga saldo akhir piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.579.000,00. Rincian piutang tersaji dalam **Lampiran 5j**

b) Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp122.344.503.669,00 dan Rp129.284.069.993,13.

Tabel 97 Rincian Piutang Lainnya Tahun 2018

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang KSP/USP-Koperasi	354.000.000,00	354.000.000,00
2	Piutang BLUD RS DR. H. M Raba'in	20.287.698.349,25	14.977.473.209,08
3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	290.644.698,00	258.003.921,00
4	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	3.468.548.924,28	70.190.000,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	81.323.886.287,26	77.831.000.031,13
6	Piutang Jamsoskes Provinsi Sumsel	16.524.150.504,95	33.151.435.384,15
7	Piutang Lain-lain	95.574.905,35	2.641.967.447,77
	Jumlah	122.344.503.669,09	129.284.069.993,13

Uraian atas masing-masing Piutang Lainnya sebagai berikut.

(1) Piutang KSP/USP-Koperasi

Nilai saldo awal Piutang KSP/USP-Koperasi Tahun 2018 sebesar Rp354.000.000,00. Tahun 2018 tidak ada koperasi yang melakukan pembayaran sehingga saldo Piutang per 31 Desember 2018 masih sebesar Rp354.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98 Daftar Piutang KSP/USP – Koperasi

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Koperasi Ismoyojati	165.000.000,00	165.000.000,00
2	Koperasi Usaha Tani Mandiri	90.000.000,00	90.000.000,00
3	Koperasi Anugrah	9.000.000,00	9.000.000,00
4	Koptan Karya Nyata	50.000.000,00	50.000.000,00
5	Koperasi Forkom	40.000.000,00	40.000.000,00
	Jumlah	354.000.000,00	354.000.000,00

(2) Piutang BLUD RS dr. H. M. Raba'in

Nilai saldo awal Tahun 2018 sebesar Rp14.977.473.209,08. Koreksi tambah atas piutang Tahun 2017 yang belum diakui sebesar Rp6.000.000,00. Realisasi pembayaran Piutang BLUD RS dr. H. M. Raba'in per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.033.194.471,83. Tahun 2018 piutang bertambah sebesar Rp18.337.419.612,00, sehingga saldo akhir piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.287.698.349,25. Rincian piutang BLUD per 31 Desember 2017 tersaji pada **Lampiran 5l**.

(3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp290.644.698,00 dan Rp258.003.921,00. Realisasi pembayaran Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 sebesar Rp256.915.578,00. Tambahan piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2018 sebesar Rp289.556.355,00. Bagian lancar piutang adalah piutang yang akan jatuh tempo pada Tahun 2019.

Piutang angsuran perumahan guru merupakan angsuran sewa beli rumah daerah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebanyak 22 (dua puluh) unit yang terletak di Jalan Budi Utomo dan KH. Dewantara Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Pembelian dilakukan dengan cara sewa beli selama 10 (sepuluh) tahun. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 tersaji pada **Lampiran 2**.

(4) Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp3.468.548.924,28 dan Rp70.190.000,00. Tahun 2018 piutang bertambah sebesar Rp3.398.358.924,28 atas kekurangan volume pekerjaan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2018. Tidak ada realisasi pembayaran Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sehingga saldo akhir Tahun 2018 sebesar Rp3.468.548.924,28.

(5) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Nilai saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp81.323.886.287,26 dan Rp77.831.000.031,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	16.257.357.146,62	18.889.905.465,61
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.410.015.059,88	17.919.698.568,25

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	45.837.990.305,42	40.343.805.254,48
4	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	816.157.989,61	674.778.441,54
5	Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air	565.651,76	467.900,29
6	Pajak Kendaraan Atas Air	1.800.133,97	2.344.400,96
	Jumlah	81.323.886.287,26	77.831.000.031,13

Tahun 2018 piutang bertambah sebesar Rp32.988.284.169,06 berdasarkan SK Gubernur Sumsel No.111/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumsel Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018. Realisasi penerimaan piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp29.495.397.912,92. Koreksi kurang atas piutang Tahun 2015 sebesar Rp0,01, sehingga saldo akhir Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2018 sebesar Rp81.323.886.287,26. Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2018 tersaji pada **Lampiran 5o**.

(6) Piutang Jamsoskes

Nilai saldo awal Tahun 2018 Piutang Jamsoskes sebesar Rp33.151.435.384,15. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.277.340.299,00, ditambah Piutang Jamsoskes tahun 2018 dimana ketika rekonsiliasi bulan November 2018 belum selesai diverifikasi sebesar Rp.650.055.419,80 jumlah Piutang Jamsoskes tahun 2018 sebesar Rp.16.524.150.504,95. Rincian Piutang Jamsoskes per 31 Desember 2018 tersaji pada **Lampiran 5p**.

(7) Piutang Lain-Lain

Nilai saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp95.574.905,35 dan Rp2.641.967.447,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 100 Rincian Piutang Lain-lain

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Piutang Pajak Restitusi CV Bhakti Putra	70.022.727,00	70.022.727,00
2	Piutang Lainnya (Pekerjaan yang Batal Dilaksanakan)	6.496.363,00	6.496.363,00
3	Piutang Lainnya (Kelebihan pembayaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa atas hasil pemeriksaan BPK)	19.055.815,35	2.565.448.357,77
	Jumlah	95.574.905,35	2.641.967.447,77

(a) Piutang Pajak Restitusi CV Bhakti Putra

Saldo Piutang Pajak Restitusi per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp70.022.727,00 dan Rp70.022.727,00.

Nilai saldo akhir Tahun 2018 sebesar Rp70.022.727,00 yang merupakan piutang pajak PPN DN sebesar Rp53.863.636,00 dan PPH Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp16.159.091,00 atas pekerjaan Pembangunan IPAL Komunal dalam Kota Muara Enim a.n. CV Bhakti Putra yang batal dilaksanakan pada Tahun 2014. Sampai dengan 31 Desember 2018 tidak ada realisasi penerimaan piutang.

(b) Piutang Lainnya (Pekerjaan yang Batal Dilaksanakan)

Piutang Lainnya yaitu piutang atas pekerjaan yang batal dilaksanakan pada Tahun 2016 karena adanya sengketa lahan pada Dinas PU Cipta Karya dan telah dibayar Uang Muka Kerja. Saldo awal Piutang Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp6.496.363,00. Tahun 2018 tidak ada realisasi pembayaran piutang sehingga saldo akhir piutang lainnya Tahun 2018 masih sebesar Rp6.496.363,00.

(c) Piutang Lainnya (Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa atas Hasil Pemeriksaan BPK)

Saldo awal Piutang Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp2.565.448.357,77 yaitu piutang kelebihan pembayaran Belanja Modal dan Belanja Barang atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kegiatan Tahun Anggaran 2017. Tahun 2018 piutang bertambah sebesar Rp19.055.815,35 yaitu kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp2.050.000,00, kelebihan pembayaran tunjangan pegawai sebesar Rp5.430.000,00 dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11.575.815,35. Realisasi pembayaran piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.565.448.357,77, sehingga saldo akhir piutang lainnya sebesar Rp19.055.815,35.

(8) Penyisihan Piutang

Nilai Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp24.312.692.674,27 dan Rp21.071.782.524,25. Rincian penyisihan piutang per 31 Desember 2018 dan 2017 tersaji sebagai berikut :

Tabel 101 Daftar Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
Penyisihan Piutang Pendapatan			
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	3.526,25
2	Piutang Pajak Restoran	1.090.600,00	75.040,00
3	Piutang Pajak Reklame	2.202.920,19	254.571,88
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2.172.163,62	3.308.968,87
5	Piutang Pajak Air Tanah	629.087,79	317.908,75

No.	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Per 31 Des 2017 (Rp)
6	Pajak PBB P2	22.796.594.628,81	19.024.937.582,63
7	Piutang BPHTB	296.080	293.007,50
8	Retribusi Menara Telekomunikasi	511.595.822,48	1.280.530.183,20
11	Retribusi Sewa Kios Pasar	97.722.000,00	71.774.500,00
12	Retribusi Jasa Laboratorium BLH	18.579.000,00	20.798.300,00
Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan		23.430.882.302,89	20.402.293.589,08
Penyisihan Piutang Lainnya			
1	Piutang Koperasi	354.000.000,00	354.000.000,00
2	Piutang Pajak Restitusi	35.011.363,50	35.011.363,50
3	Piutang Jamsoskes Prov SUMSEL	0,00	0,00
4	Piutang – Pek. Batal dan Hasil Pemeriksaan	3.343.460,58	649.636,30
5	Piutang Angsuran Perumahan Guru	168.224,41	53.541,41
6	Piutang BLUD RSUD Dr.H.M.Rabaín	406.500.528,28	213.979.393,96
7	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	82.786.794,61	65.795.000,00
8	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	0,00	0,00
9	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya		881.810.371,38	669.488.935,17
Jumlah		24.312.692.674,27	21.071.782.524,25

Rincian penyisihan piutang per masing-masing jenis piutang tersaji pada **Lampiran 5t** sampai dengan **Lampiran 5v**.

3) Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Muara Enim per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp969.564.810,89 dan Rp823.763.025,84. Beban dibayar Dimuka Tahun 2018 sebesar Rp969.564.810,89 terdiri dari Beban Dibayar Dimuka untuk asuransi barang milik daerah sebesar Rp958.566.016,37, asuransi jiwa sebesar Rp8.017.972,60 dan sewa rumah pada Dinas PUPR Rp2.980.821,92. Rincian terdapat pada **Lampiran 6**.

4) Persediaan

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Muara Enim per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp83.101.362.694,81 dan Rp28.055.237.498,83. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 102 Rincian Persediaan 2018 dan 2017

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	378.360.236,00	269.965.347,00
2	Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	241.341.164,00	264.823.404,00
3	Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.105.000,00	4.041.000,00
4	Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	64.100.900,00	183.989.338,00
5	Alat Kesehatan Habis Pakai	7.977.162.188,92	5.184.463.407,08
6	Bibit Ternak	190.796.500,00	162.229.350,00
7	Bahan Obat-Obatan	19.098.097.107,90	13.078.581.833,70

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
8	Bahan Kimia dan Pupuk	144.395.512,00	169.360.400,00
9	Makanan Pokok / Bahan Pangan	716.738.640,80	476.339.128,00
10	Bahan/Alat Pakan	1.300.000,00	2.673.000,00
11	Bahan Cetakan	1.140.640.450,00	806.856.150,00
12	Makanan dan Minuman Pasien	61.111.880,00	34.600.530,00
13	Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	44.751.990.145,81	6.507.288.611,05
14	Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	8.325.222.969,38	910.026.000,00
	Jumlah	83.101.362.694,81	28.055.237.498,83

Rincian Persediaan akhir per 31 Desember 2018 per jenis Persediaan per masing-masing OPD tersaji pada **Lampiran 7**.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Muara Enim per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp335.238.958.881,09 dan Rp349.966.974.906,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103 Rincian Investasi Jangka Panjang 2018

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen	335.238.958.881,09	349.966.974.906,05
Jumlah	335.238.958.881,09	349.966.974.906,05

Uraian saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

1) Investasi Non Permanen

Tabel 104 Daftar Investasi Non Permanen

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Pada TA 2018 Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak menyajikan nilai perguliran sapi dan kambing ternak pada Investasi Non Permanen lagi sebab perguliran atas sapi dan kambing tidak memenuhi kriteria sebagai investasi dana bergulir. Selanjutnya atas nilai perguliran sapi dan kambing tersebut disajikan pada akun Aset Lain-Lain di Aset Lainnya sebesar harga perolehan sapi yaitu Rp6.398.500,00 per ekor sapi.

2) Investasi Permanen

Merupakan nilai bersih penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada:

Tabel 105 Daftar Investasi Permanen

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
PDAM Lematang Enim	258.514.952.802,77	272.249.087.805,39
Bank Sumsel Babel	49.430.553.462,03	49.430.553.462,03
Bank BRI	139.125.000,00	139.125.000,00
PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk	3.473.000.000,00	3.473.000.000,00
PD SPME	1.512.861.880,08	1.460.142.681,94
PD Hotel Griya Serasan Sekundang	13.295.901.724,31	13.215.760.186,69
PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	8.872.564.011,90	9.999.305.770,00
Jumlah	335.238.958.881,09	349.966.974.906,05

Adapun uraian Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

a) PDAM Lematang Enim

Pada tahun 2018 tidak ada penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.

Komposisi penyertaan modal pada PDAM Lematang Enim per 31 Desember 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 106 Komposisi Penyertaan Modal pada PDAM Lematang Enim Per 31 Desember 2018

No.	Komposisi Modal	Nilai Per 31 Des 2018	% Penyertaan
1	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	317.641.504.267,19	65,30
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Belum Ditetapkan Statusnya	133.980.573.413,80	27,54
3	Pemerintah Pusat yang Belum Ditetapkan Statusnya	34.842.155.000,00	7,16
JUMLAH		486.464.232.680,99	100

Pada Tahun 2018, nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PDAM Lematang Enim adalah sebesar Rp317.641.504.267,19 atau 65,30% dari penyertaan modal PDAM Lematang Enim yaitu sebesar Rp486.464.232.680,99. Atas nilai penyertaan modal tersebut, pada Tahun 2018 PDAM Lematang Enim mengalami kerugian sebesar Rp21.137.393.375,49 (*unaudited*), yang dimana proporsi kerugian yang dialami Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas penyertaan modal pada PDAM Lematang Enim adalah sebesar Rp13.801.864.509,29 atau 65,30% dari nilai kerugian.

Nilai Ekuitas dalam laporan keuangan PDAM Lematang Enim per 31 Desember 2018 sebesar Rp379.965.377.649,39 sehingga nilai penyertaan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PDAM Lematang Enim per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp258.514.952.802,77

Rincian nilai Ekuitas PDAM Lematang Enim per 31 Desember 2018 pada **Lampiran 8.**

b) Bank SumselBabel

Tabel 107 Penyertaan Bank SumselBabel

Urain	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Penyertaan Modal kepada Bank Sumselbabel Terdiri atas 37.721 Lembar Saham dengan Nominal Per Lembar Rp1.000.000,00	37.721.000.000,00	37.721.000.000,00
Agio Saham	11.709.114.000,00	11.709.114.000,00
Dijadikan Modal Saham	439.462,03	439.462,03
Jumlah	49.430.553.462,03	49.430.553.462,03

c) Bank BRI

Tabel 108 Penyertaan Saham Bank BRI TA 2018 dan 2017

Urain	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Penyertaan Modal Saham kepada PT Bank BRI, Tbk Terdiri atas 159.000 Lembar Saham dengan Nominal Per Lembar Rp500,00	79.500.000,00	79.500.000,00
Agio Saham	59.625.000,00	59.625.000,00
Jumlah	139.125.000,00	139.125.000,00

d) PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk

Tabel 109 Penyertaan Saham TA 2018 dan 2017

Urain	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Penyertaan Modal Saham kepada PT BA Terdiri atas 6.946.000 Lembar Saham dengan Nominal Per Lembar Rp500,00	3.473.000.000,00	3.473.000.000,00

e) PD SPME

Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD SPME) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dengan modal dasar sebesar Rp2.000.000.000,00 yang disetor secara bertahap dari Tahun 2005 sebesar Rp1.000.000.000,00, Tahun 2007 sebesar Rp404.585.000,00, dan Tahun 2008 sebesar Rp595.415.000,00.

Dengan persentase pemilikan saham sebesar 92,93%, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim dicatat menggunakan Metode Ekuitas.

Pada Tahun 2018, nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PD SPME sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 92,93% dari total penyertaan modal pada PD SPME yaitu sebesar Rp2.152.108.000,00. Atas

nilai penyertaan modal tersebut, pada Tahun 2018 PD SPME mengalami kerugian sebesar Rp227.859.379,00 (*unaudited*), dengan nilai proporsi kerugian yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas penyertaan modal pada PD SPME adalah sebesar Rp211.754.595,03 atau 92,93% dari nilai kerugian.

Nilai Ekuitas dalam laporan keuangan PD SPME per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.090.614.040,85 sehingga nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PD SPME per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.512.861.880,08.

Rincian nilai ekuitas PD SPME per 31 Desember 2018 pada **Lampiran 8**.

f) PD Hotel Griya Serasan Sekundang

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mendirikan Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang. Dalam peraturan daerah, ditetapkan modal disetor sebesar Rp17.062.000.000,00 dan direvisi pada Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang menjadi sebesar Rp17.642.730.744,84, yang terdiri atas aset tetap dan dana. Tidak ada penambahan penyertaan modal pada Hotel Griya Serasan tahun 2018.

Pada TA 2018, nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PD Hotel Griya Serasan Sekundang sebesar Rp23.142.730.745,00 atau 95,06% dari total penyertaan modal pada PD Hotel Griya Serasan Sekundang yaitu sebesar Rp24.344.954.170,00. Tahun 2018 PD Hotel Griya Serasan Sekundang mendapatkan keuntungan sebesar Rp84.304.747,00 (*unaudited*), dengan nilai proporsi keuntungan yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas penyertaan modal pada PD Hotel Griya Serasan Sekundang adalah sebesar Rp80.141.537,61 atau 95,06% dari nilai keuntungan.

Nilai Ekuitas dalam laporan keuangan PD Hotel Griya Serasan Sekundang per 31 Desember 2018 sebesar Rp12.396.559.494,00. Sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PD Hotel Griya Serasan Sekundang per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp13.295.901.724,31. Rincian nilai Ekuitas PD Hotel Griya Serasan Sekundang per 31 Desember 2018 pada **Lampiran 8**.

g) PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gerbang Serasan

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Gerbang Serasan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim. Penyertaan modal Tahun 2013 sebesar

Rp5.000.000.000,00 dilakukan untuk proses pendirian izin prinsip kepada Bank Indonesia dan modal dasar PD BPR dan dana tersebut masih disimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagai modal disetor untuk proses pendirian, izin prinsip dan deposito sebesar Rp3.000.000.000,00 sebagai modal kerja.

Penambahan penyertaan modal pada PD BPR Gerbang Serasan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 direalisasikan pada Tahun 2016 dimana PD BPR Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim memulai operasionalnya pada bulan November 2016. Sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada PD BPR Gerbang Serasan per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.000.000.000,00.

Pada Tahun 2018, nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100% dari total penyertaan modal pada PD Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 Tahun 2018 PT Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan mengalami kerugian sebesar Rp412.930.772,35 (*unaudited*), dengan nilai proporsi kerugian yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas penyertaan modal pada PT Bank Perkreditan Gerbang Serasan adalah sebesar Rp402.859.290,10 atau 97,56% dari nilai kerugian.

Nilai ekuitas dalam laporan keuangan PD Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.662.100.739,65. Sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PT Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.872.564.011,90. Rincian nilai ekuitas PD Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan per 31 Desember 2018 pada **Lampiran 8**.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp4.172.014.394.191,91 dan Rp4.017.849.811.548,96 merupakan hasil perhitungan dari penjumlahan nilai Neraca awal ditambah dan dikurangi dengan mutasi selama Tahun 2018 serta dikurang dengan penyusutan seperti terdapat pada Tabel 110 berikut:

Tabel 110 Rincian Aset tetap 2018

No	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2018 (Rp)	Mutasi 2018		Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tanah	190.010.606.848,52	6.328.255.824,00	8.414.311.842,00	187.924.550.830,52
2	Peralatan dan Mesin	625.854.595.582,89	77.039.944.094,35	12.398.454.495,00	690.496.085.182,24
3	Gedung dan Bangunan	1.596.191.605.596,85	139.671.524.547,73	93.593.432.651,91	1.642.269.697.492,67
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.152.110.306.052,04	335.737.641.995,93	5.346.571.397,40	3.482.501.376.650,57

No	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2018 (Rp)	Mutasi 2018		Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
5	Aset Tetap Lainnya	45.879.471.674,58	21.450.998.079,00	12.513.973.971,00	54.816.495.782,58
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	14.712.104.200,00	2.875.281.000,00	2.013.077.800,00	15.574.307.400,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.606.908.878.405,92)	23.760.070.934,85	318.419.311.675,60	(1.901.568.119.146,67)
	Jumlah	4.017.849.811.548,96	606.863.716.475,86	452.699.133.832,91	4.172.014.394.191,91

1) Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp187.924.550.830,52 dan Rp190.010.606.848,52. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp187.924.550.830,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Saldo Awal	190.010.606.848,52	188.707.706.848,52
Penambahan dari belanja modal Tahun 2018	5.999.991.824,00	1.377.900.000,00
Hibah	328.264.000,00	
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(4.858.750,00)	
Penghapusan Hibah	(8.220.766.255,00)	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(188.686.837,00)	
Dihibahkan ke Kementerian Keuangan Direktorat Bea dan Cukai		(75.000.000,00)
Saldo Akhir	187.924.550.830,52	190.010.606.848,52

Penambahan Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp6.328.255.824,00 berasal dari :

- (1) Belanja Modal Tanah Tahun 2018 sebesar Rp5.999.991.824,00;
- (2) Penambahan Aset Hibah senilai Rp328.264.000,00 yaitu pada Dinas Perkebunan dan Kecamatan Belimbing dari Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan senilai Rp11.264.000,00 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 1313/PL.130/E/09/2015 dan Nomor 525/470/Bun/2015 tanggal 29 September 2015 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 1314/PL.230/E/09/2018 tanggal 29 September 2015 dan penambahan aset hibah pada BPKAD-SKPKD dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp317.000.000,00 sesuai NPHD Nomor 028/22/BPKAD/2018 dan BAST nomor 028/23/BPKAD/2018 tanggal 26 Desember 2018.

Pengurangan Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp8.414.311.842,00 terdiri dari :

- (1) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan senilai Rp4.858.750,00;
- (2) Penghapusan Aset yang dihibahkan senilai Rp8.220.766.255,00 yaitu penghapusan aset Tanah pada Sekretariat Daerah senilai Rp334.000.000,00 yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai

NPHD No. 028/12/BPKAD-5/2018 dan No. 037/HIBAH/BPKAD/2018 dan BAST No. 028/13/BPKAD-5/2018 dan No. 028/BA/BPKAD/2018 tanggal 5 September 2018. Aset Tanah Dinas Kesehatan senilai Rp6.099.000.000,00 dan aset Tanah BPKAD-SKPKD senilai Rp1.061.700.000,00 yang diserahkan kepada Kementerian Kesehatan RI sesuai BAST No. 028/02/BPKAD/2018 dan No. KN.02.07/H.I/524/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Aset Tanah Dinas Perdagangan yang dihibahkan ke Desa senilai Rp372.000.000,00 sesuai dengan NPHD Nomor 028/010/Disdag-2/2017 dan 140/294/2017/XI/2017 BAST: 43/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 3 November 2017, NPHD Nomor 028/002/Disdag-2/2017 dan 140/1078/IX/2002/2017 BAST: 35/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 27 Oktober 2017, NPHD Nomor 028/008/Disdag-2/2017 dan 140/1114/CK/II/2017 BAST: 40/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 3 November 2017 serta Aset Tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretariat Daerah senilai Rp354.066.255,00 yang diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Sesuai NPHD No. 028/071/BPKAD-5/2018 dan W.6 PB.01.01-0046/2018, BAST No.028/08/BA/BPKAD-5/2018 dan W.6.PB.01.01-0047/2018 tanggal 2 Mei 2018.

- (3) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya sebesar Rp188.686.837,00 dikarenakan Aset tersebut merupakan bagian dari Jalan Nasional/Jalan Negara, Aset Tetap Tanah sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dari APBD Kabupaten Muara Enim melalui pembebasan lahan Aset tersebut belum diserahkan ke Pemerintah Pusat, dikarenakan Pemerintah Pusat belum mau menerima sebelum ada bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan status ruas-ruas jalan sebagai Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/BMP/2016 tanggal 31 Mei 2016 dengan panjang Jalan 1.275,31 km terdiri dari 155 ruas jalan. Akan tetapi terhadap 155 ruas jalan sebagaimana tersebut diatas belum dilakukan penilaian. Pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan melakukan penilaian terhadap 155 ruas jalan berdasarkan NJOP.

Aset Tetap Tanah Sekretariat Daerah yang belum didukung dengan bukti kepemilikan sebesar Rp5.238.412.943,00 telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 165/I/2013 dan Nomor 288/300/5.1.6/03 IX/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembuatan Sertifikat Aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 sebanyak 253 persil (dari usulan pensertifikatan sebanyak 476 persil, namun dengan 117 letak tanah tersebar luas di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Muara Enim baru di-MoU-kan sebanyak 253 persil). Atas perjanjian kerja sama tersebut telah direalisasikan sebanyak 159 persil dari 253 persil, 10 persil masih dalam proses, sedangkan 84 persil belum diproses pensertifikatan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut dikarenakan 6 persil masuk kawasan hutan, 8 persil masuk kawasan PT BA, 3 persil sanggahan dari pihak lain, 1 persil masuk HPL, 1 persil telah terbit SHM dan 65 persil belum diukur. Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengusulkan kembali

pembuatan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim sebanyak 90 persil melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 593/0713/I/2014 tanggal 24 September 2014.

2) Peralatan dan Mesin

Tabel 112 Peralatan Mesin Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Peralatan dan Mesin	690.496.085.182,24	625.854.595.582,89

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp690.496.085.182,24 dan Rp625.854.595.582,89 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 113 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	2018	2017
Saldo awal	625.854.595.582,89	536.030.246.494,74
Penambahan dari Belanja Modal	64.013.604.181,35	89.535.843.613,15
Penambahan dari Belanja Modal BLUD	2.865.942.645,00	0,00
Penambahan Aset dari Belanja Modal BLUD yang masih terhutang	0,00	644.311.800,00
Hibah	1.590.000.000,00	5.260.707.582,00
Belanja JKN	2.251.297.298,00	1.215.840.643,00
Aset Dana BOS (Belanja Barang dan Jasa BOS)	1.222.179.960,00	701.177.636,00
Reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultansi	0,00	149.027.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	2.509.200.000,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	41.105.000,00	240.535.000,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.870.000,00	3.326.700.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	23.700.000,00	12.293.873.131,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya (Belanja Modal BOS)	4.944.013.010,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset KDP	0,00	370.256.000,00
Koreksi Pencatatan	83.232.000,00	150.000.000,00
Penghapusan Aset yang dilelang	(6.898.468.974,00)	0,00
Penghapusan Aset yang dihibah	(2.776.134.400,00)	0,00
Reklasifikasi ke Aset <i>Extracomptable</i>	(1.336.730.031,00)	(3.623.874.453,00)
Reklasifikasi ke Persediaan	0,00	(220.278.100,00)
Koreksi aset dari pembayaran hutang Tahun 2016 karena sudah tercatat	0,00	(21.450.223.464,00)
Koreksi aset dari pembayaran hutang Tahun 2017 karena sudah tercatat	(644.311.800,00)	0,00
Reklasifikasike Aset Gedung dan Bangunan	(383.197.700,00)	0,00
Reklasifikasike Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(155.682.340,00)	0,00
Reklasifikasike Aset Lainnya	(203.929.250,00)	(1.278.747.300,00)
Saldo akhir	690.496.085.182,24	625.854.595.582,89
Akumulasi Penyusutan	(435.291.173.775,24)	(368.160.704.156,38)
Nilai Buku	255.204.911.407,00	257.693.891.426,51

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp77.039.944.094,35 terdiri dari :

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp64.013.604.181,35 dan Belanja Modal BLUD sebesar Rp2.865.942.645,00;
- (2) Penambahan aset dari hibah sebesar Rp1.590.000.000,00 yaitu dari Program CSR PT Bukit Asam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp160.000.000,00 sesuai BAST Nomor BA/Ekst-14500/KL.03/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp1.430.000.000,00 sesuai BAST Nomor 020/T/01000/KL.02/IX/2018 tanggal 26 Desember 2018 ;
- (3) Reklasifikasi dari Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.251.297.298,00;
- (4) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.222.179.960,00;
- (5) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada BPKAD senilai Rp41.105.000,00;
- (6) Reklasifikasi dari Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp4.870.000,00;
- (7) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Kecamatan Muara Enim senilai Rp23.700.000,00;
- (8) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dari Belanja Modal Dana BOS senilai Rp4.944.013.010,00;
- (9) Koreksi tambah pencatatan aset tetap senilai Rp83.232.000,00 yaitu aset alat angkutan yang belum tercatat dalam inventaris BPKAD sesuai BAST Barang Inventaris No. 028/1969/BA-PENY/BPKAD/2018 tanggal 21 November 2018.

Pengurangan Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.398.454.495,00 terdiri dari :

- (1) Penghapusan aset yang dilelang senilai Rp6.898.468.974,00 sesuai Salinan Risalah Lelang KPKNL Lahat Nomor 423/15/2018 tanggal 27 November 2018, Persetujuan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna Nomor 028/1523/BPKAD-5/2018 tanggal 21 Desember 2018, dan SK Penghapusan Nomor 61/KPTS/BPKAD/18 tanggal 21 Desember 2018 (**lampiran 9.f**) ;
- (2) Penghapusan aset yang dihibah senilai Rp2.776.134.400,00 yaitu aset Peralatan dan Mesin Akademi Kebidanan yang dihibahkan kepada Kementerian Kesehatan RI pada Dinas Kesehatan senilai Rp90.390.000,00 dan pada BPKAD-SKPKD senilai Rp2.685.744.400,00 sesuai BAST Nomor 028/02/BPKAD/2018 dan KN 02.07.H.1/524/2018 tanggal 12 Februari 2018 serta SK Penghapusan Nomor 57/KPTS/BPKAD/2018 tanggal 18 Desember 2018 dan SK Penghapusan Nomor 1021/KPTS/BPKAD/2018 tanggal 31 Desember 2018 (**lampiran 9.i**)

- (3) Reklasifikasi aset *extracomptable* senilai Rp1.336.730.031,00 **lampiran 9.j**;
- (4) Koreksi aset dari pembayaran Hutang (Hutang BLUD RSUD.dr.H.M. Rabain karena sudah tercatat pada Tahun 2017 senilai Rp644.311.800,00;
- (5) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp383.197.700,00 yang yaitu pada RSUD dr.HM. Rabain senilai Rp326.107.700,00 dan pada Dinas Perhubungan senilai Rp57.090.000,00 (**lampiran 9.i**);
- (6) Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan senilai Rp155.682.340,00 (**lampiran 9.i**);
- (7) Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud sebesar Rp203.929.250,00 yaitu pada Dinas Perhubungan senilai Rp92.678.000,00 berupa aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor dan RSUD dr. H.M. Rabain senilai Rp111.251.250,00 berupa aplikasi Sistem Antrian Pasien Rumah Sakit.

Tabel 114 Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)
1	Alat-alat Besar	22.953.739.585,00	22.953.739.585,00
2	Alat Angkutan	139.423.816.434,00	138.077.447.955,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.001.408.407,67	4.965.232.007,67
4	Alat Pertanian dan Peternakan	8.657.432.575,00	8.322.788.075,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	249.112.007.360,81	217.611.567.142,81
6	Alat Studio dan komunikasi	17.754.401.912,00	15.919.751.297,00
7	Alat Kedokteran	206.521.905.950,47	183.744.645.940,12
8	Alat Laboratorium	38.794.876.617,29	33.297.834.740,29
9	Alat Keamanan	1.276.496.340,00	961.588.840,00
	Jumlah	690.496.085.182,24	625.854.595.582,89
10	Akumulasi Penyusutan	(435.291.173.775,24)	(368.160.704.156,38)
	Nilai Buku	255.204.911.407,00	257.693.891.426,51

3) Gedung dan Bangunan

Tabel 115 Gedung dan Bangunan Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Gedung dan Bangunan	1.642.269.697.492,67	1.596.191.605.596,85

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp1.642.269.697.492,67 dan Rp1.596.191.605.596,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2018

Uraian	2018	2017
Saldo awal	1.596.191.605.596,85	1.450.875.399.708,43
Penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.871.946.324,18	150.008.159.352,93
Hibah	2.430.009.053,00	5.603.975.031,00
Reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultansi	899.363.920,55	1.498.296.998,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan)	2.010.344.000,00	198.100.000,00

Uraian	2018	2017
Reklasifikasi dari Belanja Barang diserahkan kepada Masyarakat	74.730.000,00	0,00
Koreksi Pencatatan	2.936.843.000,00	0,00
Penambahan dari Belanja Tak Terduga	0,00	112.857.000,00
Reklasifikasi dari Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) TA sebelumnya	0,00	29.721.512.521,03
Reklasifikasi dari Aset Tanah	4.858.750,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	383.197.700,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.850.000,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	605.886.000,00	455.406.000,00
Reklasifikasi dari KDP yang telah selesai	1.424.495.800,00	0,00
Penghapusan	(92.819.647.969,50)	(1.627.478.000,00)
Koreksi Aset dari Pembayaran hutang Tahun 2016 karena sudah tercatat	0,00	(33.459.553.274,93)
Aset <i>Extracomptable</i>	(581.668.725,00)	(2.205.923.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(41.105.000,00)	(240.535.000,00)
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	(2.758.527.455,00)
Kekurangan Volume Pekerjaan (Hasil pemeriksaan BPK)	(151.010.957,41)	(310.107.804,61)
Koreksi Aset Gedung dan Bangunan yang telah tidak ada fisiknya (Hasil Pemeriksaan BPK)	0,00	(1.679.976.480,00)
Saldo akhir	1.642.269.697.492,67	1.596.191.605.596,85
Akumulasi Penyusutan	(472.593.408.181,13)	(407.419.695.547,27)
Nilai Buku	1.169.676.289.311,54	1.188.771.910.049,58

Penambahan Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp139.671.524.547,73 terdiri dari :

- (1) Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp128.871.946.324,18;
- (2) Penambahan aset dari hibah sebesar Rp2.430.009.053,00 yaitu dari Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Perkebunan pada Dinas Dinas Perkebunan senilai Rp370.101.417,00 dan Kecamatan Belimbing senilai Rp450.316.636,00 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 1313/PL.130/E/09/2015 dan Nomor 525/470/Bun/2015 tanggal 29 September 2015 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 1314/PL.230/E/09/2018 Tanggal 29 September 2015 dan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada BPKAD-SKPKD senilai Rp1.589.151.000,00 sesuai NPHD Nomor 028/22/BPKAD/2018 dan BAST Nomor 028/23/BPKAD/2018 tanggal 26 Desember 2018 serta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pembangunan pagar belakang sekolah dari dana CSR PT Kereta Api Indonesia (Persero) DIVRE III Palembang senilai Rp20.440.000,00 sesuai dengan BAST No.06/CSR/DV.III.PG/V/2018 tanggal 18 Mei 2018;
- (3) Reklasifikasi dari Belanja Jasa Pemeliharaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp2.010.344.000,00;

- (4) Reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan senilai Rp899.363.920,55 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (**Lampiran 9.h**);
- (5) Reklasifikasi dari Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat senilai Rp74.730.000,00 pada Kecamatan Lawang Kidul;
- (6) Koreksi tambah pencatatan aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu berupa Aset Gedung Bank Perkreditan Rakyat yang tidak tercatat pada Tahun 2017 (Belanja Jasa Pemeliharaan Tahun 2017) senilai Rp2.936.843.000,00;
- (7) Reklasifikasi dari Aset Tanah senilai Rp4.858.750,00 pada Dinas Perhubungan;
- (8) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp383.197.700,00 yaitu pada RSUD dr. H.M. Rabain (Belanja Modal BLUD) senilai Rp326.107.700,00 dan pada Dinas Perhubungan senilai Rp57.090.000,00 (**Lampiran 9.I**);
- (9) Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp29.850.000,00 yaitu pada Kecamatan Muara Enim (**lampiran 9.I**);
- (10) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp605.886.000,00 yaitu pada Sekretariat Daerah senilai Rp39.486.000,00, Dinas Sosial senilai Rp99.500.000,00, Kecamatan Tanjung Agung senilai Rp337.400.000,00 dan Kecamatan Rambang senilai Rp129.500.000,00 (**Lampiran 9.I**);
- (11) Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2017 senilai Rp1.424.495.800,00 yaitu penambahan nilai DED/Perencanaan Teknis ke nilai Aset Gedung dan Bangunan yang telah selesai dikerjakan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perdagangan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (**Lampiran 9.d**).

Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp93.593.432.651,91 terdiri dari :

- (1) Penghapusan aset yang dihibahkan senilai Rp92.819.647.969,50 yang terdiri dari aset yang dihibahkan ke Desa pada Dinas Perdagangan senilai Rp35.757.116.100,00 sesuai dengan:
 - 1) NPHD Nomor 021/001/Disdag-2/2017 & 207/SEW/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan BAST Nomor 34/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Hibah Pasar Desa Sugih Waras Kecamatan Rambang;
 - 2) NPHD Nomor 028/002/Disdag-2/2017 & 147/1078/IX/2002/2017 dan BAST Nomor 35/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Hibah Pasar Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang;

- 3) NPHD Nomor 028/003/Disdag-2/2017 & 147/07/PB/2017 dan BAST Nomor 36/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Hibah Pasar Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat;
- 4) NPHD Nomor 028/004/Disdag-2/2017 & 147/339/MNT/2017 dan BAST Nomor 37/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Hibah Pasar Desa Menanti Kecamatan Kelekar;
- 5) NPHD Nomor 028/005/Disdag-2/2017 & 140/125/2005/2017 dan BAST Nomor 38/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Hibah Pasar Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku;
- 6) NPHD Nomor 028/006/Disdag-2/2017 & 136/XI/2015/2017 dan BAST Nomor 39/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 01 Oktober 2017 tentang Hibah Pasar Desa Harapan Jaya Kecamatan Muara Enim;
- 7) NPHD Nomor 028/007/Disdag-2/2017 & 140/053/TB/XI/2017 dan BAST Nomor 41/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 02 November 2017 Hibah Pasar Desa Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat;
- 8) NPHD Nomor 028/008/Disdag-2/2017 & 140/1114/CK/II/2017 dan BAST Nomor 40/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Hibah Pasar Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing;
- 9) NPHD Nomor 028/009/Disdag-2/2017 & 140/10/SM/2017 dan BAST Nomor 42/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Hibah Pasar Desa Sumber Mulia Kecamatan Lubai;
- 10) NPHD Nomor 028/010/Disdag-2/2017 & 140/294/2017/XI/2017 dan BAST Nomor 43/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Hibah Pasar Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang;
- 11) NPHD Nomor 028/011/Disdag-2/2017 & 470/1419/UML/2017 dan BAST Nomor 44/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 06 November 2017 tentang Hibah Pasar Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas;
- 12) NPHD Nomor 028/012/Disdag-2/2017 & 140/17/SKR/IV/2017 BAST Nomor 45/BAST/Disdag-2/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Hibah Pasar Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan.

Aset yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp45.360.021.869,50 sesuai dengan NPHD Nomor 028/12/BPKAD-5/2018 dan 037/Hibah/BPKAD/2018, BAST Nomor 028/13/BPKAD-5 dan 028/BA/BPKAD/2018 tanggal 05 September 2018. Aset yang dihibahkan ke Kementerian Kesehatan RI pada Dinas Kesehatan senilai Rp5.004.740.000,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.070.022.000,00 dan BPKAD-SKPD senilai Rp5.627.748.000,00 sesuai dengan BAST 028/02/BPKAD/2018 dan KN.02.07.H.1/524/2018 tanggal 12 Februari 2018

- (2) Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin pada BPKAD senilai Rp41.105.000,00 (**Lampiran 9.l**);
- (3) Reklasifikasi ke Aset *Extracomptable* senilai Rp581.668.725,00. Rincian terdapat pada **Lampiran 9.g**;
- (4) Pengurangan nilai Aset Gedung dan Bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Senilai Rp151.010.957,41.

Rincian per jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tabel berikut:

Tabel 117 Rincian Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.629.671.479.723,67	1.584.786.687.827,85
2	Bangunan Monumen	12.598.217.769,00	11.404.917.769,00
	Jumlah	1.642.269.697.492,67	1.596.191.605.596,85
3	Akumulasi Penyusutan	(472.593.408.181,13)	(407.419.695.547,27)
	Nilai Buku	1.169.676.289.311,54	1.188.771.910.049,58

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 118 Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.482.501.376.650,57	3.152.110.306.052,04

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp3.482.501.376.650,57 dan Rp3.152.110.306.052,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 119 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan 2018

Uraian	2018	2017
Saldo awal	3.152.110.306.052,04	2.943.389.803.633,68
Penambahan dari belanja modal	333.549.719.655,93	253.523.409.300,00
Penambahan dari Aset yang masih terhutang	0,00	2.304.272.000,00
Penambahan dari Belanja Jasa Konsultansi	0,00	132.003.666,00
Hibah	0,00	441.600.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Tak Terduga	1.443.658.000,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	155.682.340,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	0,00	2.758.527.455,00
Reklasifikasi dari Realisasi KDP yang telah selesai	588.582.000,00	178.970.000,00
Koreksi aset dari pembayaran hutang tahun 2017 karena sudah tercatat	(2.304.272.000,00)	(45.059.860.700,00)
Reklasifikasi ke Aset Ekstra komptabel	(3.350.000,00)	(432.006.131,00)
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(29.850.000,00)	
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan mesin	(4.870.000,00)	(3.326.700.000,00)
Kekurangan Volume Pekerjaan Aset Tetap hasil pemeriksaan BPK-RI	(3.004.229.397,40)	(1.764.769.171,64)
Penghapusan	0,00	(34.944.000,00)

Uraian	2018	2017
Saldo akhir	3.482.501.376.650,57	3.152.110.306.052,04
Akumulasi Penyusutan	(991.257.794.860,30)	(829.465.651.909,27)
Nilai Buku	2.491.243.581.790,27	2.322.644.654.142,77

Penambahan saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp335.737.641.995,93 terdiri dari :

- (1) Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2018 senilai Rp333.549.719.655,93;
- (2) Reklasifikasi dari Belanja Tak Terduga atas penanggulangan bencana tanah longsor dengan pekerjaan pembukaan trase Jalan Desa Batu Surau Kecamatan Semende Darat Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.443.658.000,00;
- (3) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp155.682.340,00;
- (4) Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2017 yaitu penambahan Nilai Perencanaan Teknis/DED ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang telah selesai dikerjakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp588.582.000,00.

Pengurangan saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp5.346.571.397,40 terdiri dari :

- (1) Koreksi aset dari pembayaran Utang Tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.304.272.000,00 karena sudah tercatat pada Tahun 2017;
- (2) Reklasifikasi ke aset *extracomptable* senilai Rp.3.350.000,00 (**Lampiran 9.g**);
- (3) Reklasifikasi ke Aset Peralatan Dan Mesin Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp4.870.000,00 (Lampiran 9.l);
- (4) Reklasifikasi ke Aset Gedung Dan Bangunan Kecamatan Muara Enim senilai Rp29.850.000,00 (Lampiran 9.l);
- (5) Pengurangan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kekurangan volume pekerjaan terhadap Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp3.004.229.397,40.

Tabel 120 Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018	Saldo Per 31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
1	Jalan dan Jembatan	2.917.398.372.223,78	2.647.106.766.978,61
2	Bangunan Air (irigasi)	420.492.845.188,49	373.654.098.935,13
3	Instalasi	63.589.493.605,00	62.657.843.605,00
4	Jaringan	81.020.665.633,30	68.691.596.533,30
	Jumlah	3.482.501.376.650,57	3.152.110.306.052,04
5	Akumulasi Penyusutan	(991.257.794.860,30)	(829.465.651.909,27)
	Nilai Buku	2.491.243.581.790,27	2.322.644.654.142,77

5) Aset Tetap Lainnya

Tabel 121 Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	54.816.495.782,58	45.879.471.674,58

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp54.816.495.782,58 dan Rp45.879.471.674,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 2018

Uraian	2018	2017
Saldo awal	45.879.471.674,58	35.618.271.711,08
Penambahan dari belanja modal	2.045.460.000,00	35.901.263.237,00
Belanja Modal BOS	19.282.169.034,00	0,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS	123.369.045,00	237.121.172,00
Reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultan	0,00	1.995.350.000,00
Reklasifikasi ke Aset <i>Extracomptable</i>	(6.883.469.961,00)	(12.751.589.814,50)
Koreksi Aset dari Pembayaran Hutang Tahun 2016 karena Sudah Tercatat	0,0	(2.216.740.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(4.967.713.010,00)	(12.293.873.131,00)
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(605.886.000,00)	(455.406.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	(89.000.000,00)
Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	(56.905.000,00)	(65.925.500,00)
Saldo Akhir	54.816.495.782,58	45.879.471.674,58
Akumulasi Penyusutan	(2.425.742.330,00)	(1.862.826.793,00)
Nilai Buku	52.390.753.452,58	44.016.644.881,58

Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya senilai Rp21.450.998.079,00 terdiri dari:

- (1) Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2018 senilai Rp2.045.460.000,00 dan Belanja Modal BOS senilai Rp19.282.169.034,00;
- (2) Reklasifikasi dari Belanja dan Barang Jasa BOS senilai Rp123.369.045,00.

Pengurangan saldo Aset Tetap lainnya senilai Rp12.513.973.971,00 terdiri dari:

- (1) Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp4.967.713.010,00 yaitu pada Kecamatan Muara Enim senilai Rp23.700.000,00 dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Aset Peralatan Dan Mesin dari Belanja Modal Dana BOS yang tercatat di Aset Tetap Lainnya senilai Rp4.944.013.010,00.
- (2) Reklasifikasi ke aset *extracomptable* senilai Rp6.883.469.961,00 (**lampiran 9.g**);
- (3) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp605.886.000,00 yaitu pada Sekretariat Daerah senilai Rp39.486.000,00, Dinas Sosial senilai Rp99.500.000,00, Kecamatan Tanjung Agung senilai Rp337.400.000,00 dan Kecamatan Rambang senilai Rp129.500.000,00 (**Lampiran 9.I**);

- (4) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa Rp56.905.000,00 yaitu reklasifikasi dari Belanja Modal Dana BOS ke belanja pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp55.500.000,00 dan belanja bahan pakai habis senilai Rp350.000,00 dan perjalanan dinas Rp1.000.000,00

Rincian per jenis Aset Tetap Lainnya pada Tabel berikut:

Tabel 123 Jenis Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Buku dan Perpustakaan	47.982.310.443,00	39.643.726.585,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	3.353.184.839,58	3.252.744.589,58
3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	1.006.679.000,00	508.679.000,00
4	Aset Tetap Renovasi	2.474.321.500,00	2.474.321.500,00
	Jumlah	54.816.495.782,58	45.879.471.674,58
5	Akumulasi Penyusutan	(2.425.742.330,00)	(1.862.826.793,00)
	Nilai Buku	52.390.753.452,58	44.016.644.881,58

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tabel 124 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.574.307.400,00	14.712.104.200,00

Saldo KDP per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp15.574.307.400,00 dan Rp14.712.104.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	2018	2017
Saldo Awal	14.712.104.200,00	43.094.472.721,03
Reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultasi	2.875.281.000,00	1.888.370.000,00
Reklasifikasi dari KDP TA 2017 ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00	(370.256.000,00)
Reklasifikasi dari KDP TA 2017 ke Aset Gedung dan Bangunan	(1.424.495.800,00)	(29.721.512.521,03)
Reklasifikasi dari KDP TA 2017 ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(588.582.000,00)	(178.970.000,00)
Saldo akhir per 31 Desember 2018	15.574.307.400,00	14.712.104.200,00

Penambahan saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.875.281.000,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan berupa Perencanaan Teknis/DED Pembangunan Infrastruktur pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan Dinas Perdagangan.

Pengurangan saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.013.077.800,00 terdiri dari :

- (1) Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2017 ke Aset Gedung dan Bangunan yaitu penambahan nilai Perencanaan Teknis/DED ke

Aset Gedung dan Bangunan yang telah selesai dibangun senilai Rp1.424.495.800,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- (2) Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2017 ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu penambahan nilai Perencanaan Teknis/DED ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang telah selesai dibangun senilai Rp588.582.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian KDP Tahun 2018 dan Reklasifikasi dari KDP tahun 2017 ke Aset Gedung dan Bangunan dan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat pada **Lampiran 9.c dan 9.d.**

Rincian per jenis Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tabel 138 berikut:

Tabel 126 Jenis Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
KDP Gedung dan Bangunan	9.260.234.500,00	7.809.449.300,00
KDP Jalan, Irigasi, Jaringan	6.314.072.900,00	6.902.654.900,00
Jumlah	15.574.307.400,00	14.712.104.200,00

7) Akumulasi Penyusutan

Tabel 127 Akumulasi Penyusutan Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	1.901.568.119.146,67	1.606.908.878.405,92

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp1.901.568.119.146,67 dan Rp1.606.908.878.405,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	2018	2017
Saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.606.908.878.405,92	1.452.960.413.287,32
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya		(142.584.380.604,46)
Beban Penyusutan Aset Tetap	316.561.053.126,86	300.384.134.409,65
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan	27.999.608,74	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset dari Hibah	1.830.258.940,00	
Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan	(68.227.269,85)	0,00
Akumulasi penyusutan Aset yang dilelang	(6.093.103.813,00)	
Akumulasi penyusutan Aset yang dihibahkan	(17.598.739.852,00)	
Akumulasi Penyusutan Aset Ekstra Komptabel yang dikeluarkan dari Aset Tetap	0,00	(1.366.784.653,00)

Uraian	2018	2017
Akumulasi Penyusutan aset yang dihapuskan	0,00	(743.024.881,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang direklasifikasi ke aset lain-lain (aset rusak)	0,00	(931.190.573,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan atas kekurangan volume pekerjaan (hasil pemeriksaan BPK)	0,00	(19.299.653,59)
Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Aset yang telah tidak ada fisiknya (hasil pemeriksaan BPK)	0,00	(790.988.926,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.901.568.119.146,67	1.606.908.878.405,92

Rincian Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 129 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	187.924.550.830,52	0,00	187.924.550.830,52
2	Peralatan dan Mesin	690.496.085.182,24	(435.291.173.775,24)	255.204.911.407,00
3	Gedung dan Bangunan	1.642.269.697.492,67	(472.593.408.181,13)	1.169.676.289.311,54
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.482.501.376.650,57	(991.257.794.860,30)	2.491.243.581.790,27
5	Aset Tetap Lainnya	54.816.495.782,58	(2.425.742.330,00)	52.390.753.452,58
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.574.307.400,00	0,00	15.574.307.400,00
	Jumlah	6.073.582.513.338,58	1.901.568.119.146,67	4.172.014.394.191,91

Rincian Penyusutan Aset Tetap tersaji pada **Lampiran 9.m** sampai dengan **Lampiran 9.o**.

Pada Tahun 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim telah menerima Bantuan Pemerintah yang disalurkan langsung ke sekolah dalam Kabupaten Muara Enim yang kemudian digunakan untuk pembangunan perpustakaan dan renovasi gedung sekolah. Nilai Aset Gedung dan Bangunan tersebut belum dicatat dalam Inventaris Pemerintah Kabupaten Muara Enim karena belum ada Berita Acara Serah Terimanya. Berikut daftar nama sekolah penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2018.

Tabel 130 Daftar Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2018

No	Nama Sekolah	Jenis Bantuan	Dana (Rp)
1	SDN 1 Lawang Kidul	Rehabilitasi Ruang Kelas	186.644.000,00
2	SDN 3 Lembak	Pembangunan Perpustakaan	187.463.000,00
3	SDN 28 Gelumbang	Pembangunan Perpustakaan	123.884.000,00
4	SDN 17 Sungai Rotan	Pembangunan Perpustakaan	123.884.000,00
5	SDN 20 Sungai Rotan	Pembangunan Perpustakaan	123.884.000,00
6	SDN 8 Gunung Megang	Pembangunan Perpustakaan	123.884.000,00
7	SMPN 1 Semende Darat Laut	Rehabilitasi Ruang Kelas	1.000.000.000,00
8	SMPN 1 Tanjung Agung	Rehabilitasi Ruang Kelas	1.000.000.000,00
9	SMPN 1 Muara Enim	Rehabilitasi Ruang Kelas	953.289.000,00
10	SMPN 1 Gunung Megang	Rehabilitasi Ruang Kelas	700.000.000,00
11	SMPN 1 Gelumbang	Rehabilitasi Ruang Kelas	1.000.000.000,00
		TOTAL	5.522.932.000,00

d. Dana Cadangan

Tabel 131 Dana Cadangan 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Dana Cadangan	0,00	80.190.225.826,55

Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 sebesar Rp70.000.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank SumselBabel sebesar Rp50.140.500.000,00 dan pada Bank Mandiri sebesar Rp19.859.500.000,00.

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada per 31 Desember 2017 bersaldo Rp80.190.225.826,55 dan pada tanggal 16 Januari 2018 berdasarkan surat Bupati Muara Enim nomor 900/105/BPKAD-2/2018 dan nomor 900/106/BPKAD-2/2018 perihal pencairan dana cadangan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 ditujukan pada PT Bank Sumsel Babel dan PT Bank Mandiri Cabang Muara Enim, dan telah dicairkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Muara Enim tanggal 17 dan 18 Januari 2018 sebesar Rp80.551.096.189,55 dengan rincian realisasi Rp70.000.000.000,00 dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan pada akun pencairan Dana Cadangan, dan sebesar Rp10.551.096.189,55 dicatat sebagai penerimaan Bunga Deposito pada akun Lain Lain Pendapatan Asli Daerah. Dana Cadangan dimaksud digunakan untuk keperluan Pemilukada dan telah direalisasikan pada belanja hibah kepada KPUD, Panwaslu, Polres, Kodim sebesar Rp69.683.336.500,00 Sisa dana sebesar Rp316.663.500,00 tercatat sebagai Silpa APBD Tahun 2018.

e. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp68.334.278.786,29 dan Rp71.809.250.651,56 merupakan hasil perhitungan dari penjumlahan nilai neraca awal ditambah dan dikurangi dengan mutasi selama Tahun 2018 seperti terdapat pada berikut:

Tabel 132 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lainnya Tahun 2018

No	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2018 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2018 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tagihan Penjualan Angsuran	1.551.540.366,00	0,00	113.323.613,00	1.438.216.753,00
2	Aset Tak Berwujud	17.065.515.564,00	301.037.250,00	0,00	17.366.552.814,00
3	Aset Lain-Lain	67.379.663.734,56	239.486.837,00	3.036.441.288,59	64.582.709.282,97
4	Akumulasi Amortisasi	(13.256.278.440,00)		1.796.921.623,68	(15.053.200.063,68)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(931.190.573,00)	931.190.573,00	0,00	0,00
	Jumlah	71.809.250.651,56	1.471.714.660,00	4.946.686.525,27	68.334.278.786,29

Adapun uraian pembentuk saldo Aset Lainnya sebagai berikut:

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp1.438.216.753,00 dan Rp1.551.540.366,00 dengan rincian berikut:

Tabel 133 Rincian Mutasi Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	2018	2017
Tagihan Penjualan Angsuran	1.438.216.753,00	1.551.540.366,00
Jumlah	1.438.216.753,00	1.551.540.366,00

Piutang angsuran perumahan guru merupakan angsuran sewa beli rumah daerah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebanyak 22 (dua puluh) unit yang terletak di Jalan Budi Utomo dan KH. Dewantara Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Pembelian dilakukan dengan cara sewa beli selama 10 (sepuluh) tahun (Tahun 2016 sampai dengan 2025).

2) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp17.366.552.814,00 dan Rp17.065.515.564,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 134 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Uraian	2018	2017
Saldo awal	17.065.515.564,00	16.912.404.300,00
Reklasifikasi dari belanja Jasa Konsultasi	97.108.000,00	49.500.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.929.250,00	5.500.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	89.000.000,00
Hibah	0,00	9.111.264,00
Saldo akhir	17.366.552.814,00	17.065.515.564,00
Akumulasi Amortisasi	(15.053.200.063,68)	(13.256.278.440,00)
Nilai Buku	2.313.352.750,32	3.809.237.124,00

Penambahan Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp301.037.250,00 terdiri dari :

- (1) Reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultansi senilai Rp97.108.000,00 yaitu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp47.547.500,00 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp49.560.500,00;
- (2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp203.929.250,00 yaitu pada Dinas Perhubungan senilai Rp92.678.000,00 dan RSUD dr. H. M. Rabain senilai Rp111.251.250,00.

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD per 31 Desember 2018 pada **Lampiran 10.a.**

3) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Metode Perhitungan Amortisasi menggunakan metode Garis Lurus. Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp15.053.200.063,68 dan Rp13.256.278.440,00 dengan rincian:

Tabel 135 Rincian Mutasi Amortisasi Aset tak Berwujud

Uraian	2018	2017
Saldo Awal	13.256.278.440,00	11.666.784.393,33
Koreksi Akumulasi Amortisasi TA sebelumnya	0,00	(1.313.347.132,00)
Beban Amortisasi Tahun 2018	1.796.921.623,68	2.902.841.178,67
Saldo Akhir	15.053.200.063,68	13.256.278.440,00

Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud tersaji pada **Lampiran 10.b**.

4) Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp64.582.709.282,97 dan Rp67.379.663.734,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 136 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	2018	2017
Saldo awal	67.379.663.734,56	188.220.083.896,33
Reklasifikasi dari Aset Tetap Rusak Berat, Tidak Memiliki Nilai Ekonomis dan Diusulkan Dihapuskan	0,00	1.273.247.300,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap atas Kekurangan Volume Pekerjaan Aset Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan hasil pemeriksaan BPK-RI	0,00	1.324.742.218,48
Aset dari Hibah	50.800.000,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset tetap tanah	188.686.837,00	
Penghapusan TA 2018	(2.765.609.300,00)	(466.700.000,00)
Pembayaran Temuan hasil Pemeriksaan BPK	(116.626.988,59)	0,00
Hibah	(58.227.500,00)	(121.899.587.386,11)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tetap Gedungdan Bangunan	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstra Komptabel	0,00	(84.183.500,00)
Koreksi Pencatatan	0,00	(45.000.000,00)
Pembayaran Temuan BPK atas Kekurangan volume pekerjaan TA 2016	0,00	(885.289.809,14)
Pembayaran hasil pemeriksaan belanja TA 2016 atas kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru yang tidak memenuhi kriteria	0,00	(32.054.985,00)
Aset Ternak Bergulir yang mati	(95.977.500,00)	(25.594.000,00)
Saldo akhir	64.582.709.282,97	67.379.663.734,56
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	(931.190.573,00)
Nilai Buku	64.582.709.282,97	66.448.473.161,56

Nilai saldo awal Aset Lain-Lain sebesar Rp67.379.663.734,56 terdiri dari aset rusak berat sebesar Rp22.635.480.387,98, aset desa sebesar Rp28.130.273.200,00, aset TGR senilai Rp380.055.815,00, aset lain-lain hasil pemeriksaan BPK RI tahun sebesar Rp1.524.276.832,87, Aset Yang

Dimanfaatkan Pihak Lain sebesar Rp14.351.261.498,71 dan Aset Ternak Bergulir senilai Rp358.316.000,00.

Pada Tahun 2018 nilai Aset Lain-Lain bertambah senilai Rp239.486.837,00 yaitu:

- 1) Penambahan Aset Lain-lain pada Dinas Perkebunan berupa aset tanah hibah dari Dirjen Perkebunan sebesar Rp50.800.000,00 sesuai dengan NPHD Nomor 1313/PL.130/E/09/2015 dan Nomor 545/470/Bun/2015 tanggal 29 September 2015 dan BAST Nomor 1314/PL.230/E/09/2015 tanggal 29 September 2015.
- 2) Reklasifikasi dari Aset tetap tanah sebesar Rp188.686.837,00 pada OPD Sekretariat Daerah dikarenakan Aset tersebut merupakan bagian dari Jalan Nasional/Jalan Negara, Aset Tetap Tanah sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dari APBD Kabupaten Muara Enim melalui pembebasan lahan Aset tersebut belum diserahkan ke Pemerintah Pusat, dikarenakan Pemerintah Pusat belum mau menerima sebelum ada bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Pengurangan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp3.036.441.288,59 terdiri dari :

- (1) Penghapusan Aset Lain-Lain sebesar Rp2.765.609.300,00 yaitu penghapusan aset rusak berat yang dilelang pada opd Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.591.459.300,00, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp185.410.000,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp44.000.000,00, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp336.990.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp589.300.000,00 dan Kecamatan Lawang Kidul sebesar Rp18.450.000,00 berdasarkan salinan risalah lelang KPKNL Lahat Nomor 423/15/2018 tanggal 27 Nopember 2018, persetujuan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Nomor 028/1523/BPKAD-5/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan penghapusan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 61/KPTS/BPKAD/2018 tanggal 21 Desember 2018 ;
- (2) Pembayaran temuan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2017 senilai Rp116.626.988,59 yang terdiri dari :
 - a. Pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp57.056.534,26;
 - b. Pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.000.000,00;
 - c. Pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp47.570.454,33;
 - d. Pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.000.000,00.
- (3) Penghapusan Aset Lain-Lain sebesar Rp58.227.500,00 yaitu pda Dinas Perdagangan berupa aset yang dihibahkan ke desa sesuai dengan SK penghapusan Nomor 59/KPTS/BPKAD/2018 tanggal 2 Juli 2018 berdasarkan NPHD Nomor 028/002/DISDAG-2/2017 dan Nomor

140/1078/XI/2002/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dan BAST Nomor 35/BAST/DISDAG-2/2017 tanggal 27 Oktober 2017;

- (4) Pengurangan nilai Aset Ternak Bergulir pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp95.977.500,00. Nilai saldo awal Aset Ternak Bergulir sebesar Rp358.316.000,00 yang terdiri atas 56 (lima puluh enam) ekor sapi indukan dengan harga satuan Rp6.938.500,00. Pada Tahun 2018 jumlah sapi bergulir yang mati sebanyak 15 (lima belas) ekor atau senilai Rp95.977.500,00 (15 x Rp6.938.500,00), sehingga jumlah sapi bergulir yang tersisa berjumlah 41 (empat puluh satu) ekor atau senilai Rp262.338.500,00 (41 x Rp6.938.500,00).

5) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp931.190.573,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 137 Rincian Mutasi Penyusutan Aset Lain-lain

Uraian	2018	2017
Saldo Awal	931.190.573,00	0,00
Penghapusan	(931.190.573,00)	0,00
Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Aset Lain-lain	0,00	931.190.573,00
Saldo Akhir	0,00	931.190.573,00

Pengurangan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain senilai Rp931.190.573,00 merupakan penghapusan akumulasi penyusutan atas aset lain-lain BPKAD yang telah dilelang sesuai dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 61/KPTS/BPKAD/2018 tanggal 21 Desember 2018.

7.4.3.2 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp118.357.079.966,85 dan Rp119.635.388.861,81 yang terdiri dari:

Tabel 138 Rincian Kewajiban 2018 dan 2017

No.	Uraian	Saldo Per 31 Des 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2017 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	24.347.685.211,37	22.486.736.041,81
2	Kewajiban Jangka Panjang	94.009.394.755,48	97.148.652.820,00
	Jumlah	118.357.079.966,85	119.635.388.861,81

a. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp24.347.685.211,37,37 dan Rp22.486.736.041,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 139 Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
1	Utang PFK	0,00	0,00
2	Utang Bunga	1.575.427.995,33	1.103.451.680,69
3	Pendapatan Diterima Dimuka	351.342.629,51	401.059.230,87
4	Utang Belanja/kepada Pihak Ketiga	7.019.820,00	3.316.088.019,48
5	Utang Pengadaan Aset Tetap/kepada Pihak Ketiga	0,00	2.513.079.595,77
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	22.413.894.766,53	15.153.057.515,00
	Jumlah	24.347.685.211,37	22.486.736.041,81

Uraian atas saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Muara Enim per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

1) Utang PFK

Tabel 140 Utang PFK 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Utang PFK	0,00	0,00

Utang PFK TA 2018 sebesar Rp0,00.

2) Utang Bunga

Tabel 141 Utang Bunga TA 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Utang Bunga	1.575.427.995,33	1.103.451.680,69

Utang Bunga per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.575.427.995,33 (kurang bayar bunga pinjaman tahun 2018 sebesar Rp471.976.314,64 ditambah jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman 1 November 2018 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp1.092.205.007,32) merupakan pengakuan Utang Bunga secara akrual atas tagihan Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor SLA-1225/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009. Pemerintah Kabupaten Muara Enim memperoleh sebagian pinjaman yang diperoleh Pemerintah Pusat dari IBRD dalam jumlah maksimum sebesar Rp97.317.000.000,00 untuk pembiayaan peningkatan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Muara Enim melalui program UWSSP.

Tagihan atas bunga pinjaman Nomor SLA-1225/DSMI/2009 diterima oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui surat pemberitahuan dari Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Perbendaharaan dua kali dalam setahun untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo masing-masing tiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Selama TA 2018, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memperoleh pemberitahuan tagihan bunga sebesar Rp7.271.976.314,64 melalui:

- a) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi Nomor S-362/WPB.12/KP.10/2018 tertanggal 2 April 2018 perihal Tagihan Jumlah Kewajiban Jatuh Tempo untuk Pinjaman Nomor SLA-1225/DSMI/2009 terkait bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2018 sebesar Rp3.394.049.848,58 untuk masa Utang Bunga terhitung dari 1 November 2017 s.d. 1 Mei 2018 atau 6 bulan; dan
- b) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi Nomor S-1365/WPB.07/BD.0403/2017 tertanggal 2 Oktober 2018 perihal Tagihan Jumlah Kewajiban Jatuh Tempo untuk Pinjaman Nomor SLA-1225/DSMI/2009 terkait bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp3.877.926.466,06 untuk masa Utang Bunga terhitung dari 1 Mei 2018 s.d. 1 November 2018 atau 6 bulan.

Dengan periode tahun anggaran yang dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember, Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus mengakui Utang Bunga untuk masa 1 November s.d. 31 Desember atau 2 bulan setiap tahunnya. Perlakuan ini sesuai dengan prinsip pengakuan utang berbasis akrual. Untuk Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengakui Utang Bunga secara akrual untuk masa 1 November 2018 s.d. 31 Desember 2018. Selanjutnya pada TA 2018, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memperoleh tagihan atas Utang Bunga berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi Nomor S-1365/WPB.07/BD.0403/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 perihal Tagihan Jumlah Kewajiban Jatuh Tempo untuk Pinjaman Nomor SLA-1225/DSMI/2009 terkait bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp3.877.926.466,06 untuk masa Utang Bunga terhitung dari 1 Mei 2018 s.d. 1 November 2018 atau 6 bulan.

Dengan mengacu pada Surat Pemberitahuan Utang Bunga Nomor S-1365/WPB.07/BD.0403/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 senilai Rp3.276.615.022,02 untuk masa 6 bulan dapat dilakukan perhitungan atas Utang Bunga yang harus dicatat dan diakui secara akrual oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk masa 1 November 2018 s.d. 31 Desember 2018 atau 2 bulan dengan model perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \mathbf{2 \text{ bulan} \times (3.276.615.022,02/6 \text{ bulan}) = Rp1.092.205.007,34 +} \\
 & \mathbf{Rp471.976.314,64 \text{ kurang bayar tahun 2018} + \mathbf{Rp11.246.673,35 \text{ Denda} } \\
 & \mathbf{keterlambatan = \mathbf{Rp1.575.427.995,33.}
 \end{aligned}$$

Atas nilai sebesar Rp1.575.427.995,33, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengakui Utang Bunga secara akrual Per 31 Desember 2018 yang akan dibayarkan pada Tahun 2018 bersama-sama dengan bunga pinjaman masa 1 Januari 2019 s.d. 1 Mei 2019 sebesar Rp2.184.410.014,68 (Rp3.276.615.022,02 - Rp1.092.205.007,34) dengan nilai total sebesar Rp3.759.838.101,01 (Rp3.276.615.022,02) + Rp471.976.314,64 + Rp11.246.673,35).

3) Pendapatan Diterima Dimuka

Tabel 142 Pendapatan Diterima Dimuka TA 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	351.342.629,51	401.059.230,87

Pendapatan Diterima Dimuka adalah bagian dari kewajiban pelayanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pihak Ketiga yang telah diterima uang namun jasanya belum diberikan dalam Tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Reklame Diterima Dimuka sebesar Rp314.756.328,14 dan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp36.586.301,37.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 tersaji pada **Lampiran 11**.

4) Utang Belanja kepada Pihak Ketiga

Tabel 143 Utang Belanja Pihak Ketiga TA 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Utang Belanja/kepada Pihak Ketiga	7.019.820,00	3.316.088.019,48

Utang Belanja kepada Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 3.316.088.019,48. Tahun 2018 terdapat koreksi penambahan utang kepada Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang sebesar Rp3.351.900,00 berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Nomor /BRA/BI/RSMP/2018 tanggal 13 Februari 2018, koreksi penambahan utang kepada RSUD Kota Prabumulih sebesar Rp35.413.200,00 sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor 900/386/Kes/2018 tanggal 22 Februari 2018, koreksi penambahan utang kepada RSUD Ibnu Sutowo Baturaja sebesar Rp26.650.600,00 sesuai dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 445/651/XVI/4.2/2018 tanggal 9 Maret 2018 dan koreksi pengurangan nilai hutang RSUD Lahat sebesar Rp10.796.191,00 sesuai Berita Acara Data Tagihan RSUD Lahat tanggal 14 Mei 2018 serta koreksi nilai utang kepada RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 0,52, sehingga total nilai utang menjadi sebesar Rp3.370.707.529,00. Semua kewajiban kepada pihak ketiga telah dilakukan pembayaran seluruhnya pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2018, berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, masih terdapat *sharing* pelayanan Jamsoskes Tahun 2018 yang belum dibayar sebesar Rp7.019.820,00, sehingga harus dicatat sebagai utang tahun 2018 bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Rincian utang tersebut tersaji pada **Lampiran 13**.

5) **Utang Pengadaan Aset Tetap/kepada Pihak Ketiga**

Tabel 144 Utang Pengadaan Aset Tetap/kepada Pihak Ketiga TA 2018 dan 2017

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Utang Pengadaan Aset Tetap/kepada Pihak Ketiga	0,00	2.513.079.595,77

Saldo utang Belanja kepada Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 tercatat sebesar Rp2.513.079.595,77 dan telah direalisasikan pembayarannya kepada pihak ketiga sebesar Rp2.304.272.000,00 sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat berdasarkan surat dari Inpektur Kabupaten Muara Enim Nomor 700/1070/Inspektorat-V/2018 tanggal 20 Desember 2018. Sisa hutang sebesar Rp208.807.595,77 dilakukan koreksi sehingga tidak ada kewajiban kepada pihak ketiga.

6) **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Tabel 145 Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	22.413.894.766,53	15.153.057.515,00

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban atas pengadaan dari BLUD RSUD dr. H. M. Raba'in berdasarkan perikatan kontrak/perjanjian yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum dilakukan pembayaran sebesar Rp22.413.894.766,53. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang BLUD tersaji pada **Lampiran 12**.

b. **Kewajiban Jangka Panjang**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp94.009.394.755,48 dan Rp97.148.652.820,00. Kewajiban Jangka Panjang pada Kabupaten Muara Enim berupa Utang Dalam Negeri.

Tabel 146 Utang Jangka Panjang

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2017 (Rp)
Utang Jangka Panjang	94.009.394.755,48	97.148.652.820,00

Berdasarkan perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor SLA-1225/DSMI/2009 jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman 1 November 2018, atas surat tagihan nomor S-1365/WPB.07/BD.0403/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 Perihal Tagihan jumlah kewajiban jatuh tempo untuk pinjaman No SLA-1225/DSMI/2009 sebesar Rp3.139.258.064,52. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan pembayaran dengan SP2D Nomor: 0338/Pembiayaan/BPKAD/2018 tertanggal 9 November 2018 sehingga kewajiban atas pokok utang per 31 Desember 2018 sebesar Rp94.009.394.755,48

Kewajiban Jangka Panjang berupa utang dalam negeri sebesar Rp97.148.652.820,00 merupakan pekerjaan peningkatan sistem pelayanan air minum sebagai penerusan pinjaman antara pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP)*.

Berdasarkan perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor SLA-1225/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memperoleh sebagian pinjaman yang diperoleh Pemerintah Pusat dari IBRD dalam jumlah maksimum sebesar Rp97.317.000.000,00 untuk pembiayaan peningkatan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Muara Enim melalui program UWSSP.

Jangka waktu pengembalian pinjaman penerusan adalah 24,5 tahun termasuk masa tenggang sembilan tahun, terhitung sejak tanggal efektif naskah perjanjian pinjaman luar negeri. Pembayaran kembali pokok pinjaman dilakukan dalam 31 kali angsuran per setengah tahunan secara proporsional ($31 \times \text{Rp}3.139.258.064,52$) setiap tanggal 1 Mei dan 1 November dengan angsuran pertama jatuh pada tanggal 1 November 2018 dan berakhir pada tanggal 1 November 2033.

Atas pinjaman tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim wajib membayar bunga atas jumlah pinjaman penerusan yang telah ditarik dan masih terhutang dari waktu ke waktu, sebesar tingkat bunga NPPLN LIBOR+*variable spread*+ 5,02% per tahun terhitung sejak penarikan pinjaman, termasuk jasa perbankan sebesar 0,15% per tahun.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim wajib membayar *front end fee* sebesar ekuivalen Rp243.292.500,00 ($0,25\% \times \text{Rp}97.317.000.000,00$) selambat-lambatnya 60 hari setelah dilakukannya pembayaran oleh Pemerintah kepada IBRD.

Setiap terjadi keterlambatan/tunggakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan *front end fee*, Pemerintah Kabupaten Muara Enim wajib membayar bunga yang berlaku terhadap tunggakan sebesar 0,5% di atas tingkat suku bunga yang ditetapkan.

Pinjaman dari IBRD ini direncanakan sebagai bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada PDAM Lematang Enim.

Mekanisme pencairan pinjaman adalah melalui pembayaran langsung oleh Sistem Manajemen Investasi (SMI) Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada pihak ketiga pelaksana proyek, sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Jumlah pinjaman yang telah ditarik sampai dengan akhir Tahun 2014 adalah sebesar Rp97.148.652.820,00,00 yang merupakan pembayaran pekerjaan *WTP pelitasari and water distribution network in Muara Enim Work* yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, pekerjaan *WTP Karang Asam and WDN in Tanjung Enim* yang dilaksanakan PT Nindy Karya, *package MWSC 1.4 a-a WDS at Muara Enim* yang dilaksanakan PT Jasuka Bangun Pratama, *package MWSC 1.3-a intakemaking work quality improvement IPA Talang Jawa Muara Enim* yang dilaksanakan oleh PT Citra Murni Abadi.

7.4.3.3 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp4.959.710.804.960,40 dan Rp4.698.139.930.315,98 Saldo tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban. Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan yang unsurnya mencakup Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-Pos Luar Biasa.

7.4.4.1 PENDAPATAN - LO

Jumlah Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp2.314.397.362.385,47 dan Rp2.211.278.054.605,98. Jika dibandingkan dengan Pendapatan – LRA sebesar Rp2.525.583.634.051,30, terdapat perbedaan sebesar (Rp211.186.271.665,83). Rincian Pendapatan – LO per kelompok pendapatan Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 147 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2018

Kelompok Pendapatan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	242.679.694.959,69	232.468.708.584,45	10.210.986.375,24
Pendapatan Transfer	1.918.050.442.160,06	1.931.184.840.783,12	(13.134.398.623,06)
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	153.667.225.265,72	361.930.084.683,73	(208.262.859.418,01)
Jumlah	2.314.397.362.385,47	2.525.583.634.051,30	(211.186.271.665,83)

a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp242.679.694.959,69 dan Rp210.035.020.777,68. Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2018 sebesar Rp242.679.694.959,69 jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah – LRA TA 2018 sebesar Rp232.468.708.584,45 terdapat perbedaan sebesar Rp10.210.986.375,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 148 Realisasi Pendapatan - LO

Jenis PAD	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	71.206.300.400,15	69.037.972.075,62	2.168.328.324,53
Pendapatan Retribusi Daerah	23.783.596.170,78	24.515.827.175,08	(732.231.004,30)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.160.828.134,66	17.160.828.134,66	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.528.970.254,10	121.754.081.199,09	8.774.889.055,01
Jumlah	242.679.694.959,69	232.468.708.584,45	10.210.986.375,24

1) Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp71.206.300.400,15 dan Rp65.826.219.406,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 149 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO

Jenis Pajak Daerah	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Pajak Hotel	1.416.295.916,00	948.498.916,00
Pajak Restoran	7.367.359.015,00	6.054.873.591,00
Pajak Hiburan	242.313.217,00	285.382.896,00
Pajak Reklame	742.064.732,80	718.683.246,17
Pajak Penerangan Jalan	31.934.025.459,00	29.422.161.068,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.457.231.407,00	7.143.565.979,00
Pajak Air Bawah Tanah	259.121.520,00	41.650.499,00
Pajak Sarang Burung Walet	59.412.000,00	62.708.800,00
PBB Perdesaan dan Perkotaan	12.027.128.867,00	12.337.884.140,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.701.348.266,35	8.810.810.271,80
Jumlah	71.206.300.400,15	65.826.219.406,97

Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2018 sebesar Rp71.206.300.400,15 jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Pajak Daerah – LRA TA 2018 sebesar Rp69.037.972.075,62 terdapat perbedaan sebesar Rp2.168.328.324,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 150 Pajak Daerah - LO dan Pajak Daerah LRA

Jenis Pajak Daerah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Pajak Hotel	1.416.295.916,00	1.417.001.166,00	(705.250,00)
Pajak Restoran	7.367.359.015,00	7.371.460.935,00	(4.101.920,00)
Pajak Hiburan	242.313.217,00	242.333.217,00	(20.000,00)
Pajak Reklame	742.064.732,80	753.526.602,00	(11.461.869,20)
Pajak Penerangan Jalan	31.934.025.459,00	32.390.419.189,00	(456.393.730,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.457.231.407,00	12.457.231.407,00	0,00
Pajak Air Bawah Tanah	259.121.520,00	243.706.068,00	15.415.452,00
Pajak Sarang Burung Walet	59.412.000,00	59.412.000,00	0,00
PBB Perdesaan dan Perkotaan	12.027.128.867,00	9.346.051.075,00	2.681.077.792,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.701.348.266,35	4.756.830.416,62	(55.482.150,27)
Jumlah	71.206.300.400,15	69.037.972.075,62	2.168.328.324,53

Perbedaan sebesar Rp2.168.328.324,53 antara Pendapatan Pajak Daerah yang tersaji dengan LO sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perbedaan atas Pajak Hotel sebesar (Rp705.250,00) merupakan realisasi pembayaran piutang pajak hotel TA 2017 atas nama Hud Soleh sebesar Rp105.000,00, Rumah Kos Permai sebesar Rp280.000,00 dan Rumah Kos Permana sebesar Rp320.250,00;

- b) Perbedaan atas Pajak Restoran sebesar (Rp4.101.920,00) merupakan realisasi pembayaran Piutang Pajak Restoran Tahun 2017 atas nama Pondok Kita Katering sebesar (Rp4.102.000,00) dan penerimaan Pajak Restoran yang diterima di Tahun 2018 oleh bendahara penerima namun kurang setor ke RKUD sebesar Rp80,00;
- c) Perbedaan Pajak Hiburan sebesar (Rp20.000,00) merupakan penerimaan pajak hiburan yang diterima pada Tahun 2017 oleh bendahara penerimaan namun disetorkan ke RKUD pada Tahun 2018;
- d) Perbedaan Pajak Reklame sebesar (Rp11.461.869,20) merupakan Piutang Pajak Reklame Tahun 2018 sebesar Rp7.759.038 dan realisasi penerimaan Piutang Pajak Reklame Tahun 2017 sebesar (Rp29.273.125,00) serta saldo pendapatan diterima dimuka Tahun 2017 sebesar Rp324.808.545,94 dan pendapatan diterima dimuka Tahun 2018 sebesar (Rp314.756.328,14);
- e) Perbedaan Pajak Penerangan Jalan sebesar (Rp456.393.730,00) merupakan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018 sebesar Rp160.471.424,00 atas nama PT Satria Artha Niaga sebesar Rp1.262,00 dan PT Medco E&P Indonesia sebesar Rp160.470.162,00. Realisasi pembayaran piutang TA 2017 (Rp616.865.154,00) yang terdiri dari piutang PT Medco Energi Oil dan Gas sebesar Rp505.548.000,00, PT Pertamina EP Asset II Prabumulih sebesar Rp370.188,00, PT TEL sebesar Rp103.069.080,00, PT. PGN (Persero) sebesar Rp6.552.000,00, PT Bumi Sawindo Permai sebesar Rp228.160,00, PT Satria Artha Niaga sebesar Rp9.086,00 dan PT Pama Persada Nusantara sebesar Rp1.088.640,00;
- f) Perbedaan Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp15.415.452,00 merupakan piutang pajak air bawah tanah Tahun 2018 atas nama PT. Bumi Sawit Permai sebesar Rp15.431.733,00 dan PT Pacific Global Utama sebesar Rp10.824,00 serta realisasi pembayaran piutang Tahun 2017 sebesar (Rp27.105,00) atas nama PT PGN (Persero);
- g) Perbedaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) sebesar Rp2.681.077.792,00 merupakan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan TA 2018 sebesar Rp3.234.300.194,00, dan realisasi pembayaran Piutang PBB P2 sebesar (Rp553.222.402,00) yang terdiri atas Piutang Tahun 2017 sebesar Rp225.498.260,00, Tahun 2016 sebesar Rp114.977.147,00, Tahun 2015 sebesar Rp101.181.796,00, Tahun 2014 sebesar Rp108.803.855,00 dan Tahun 2009 s.d. 2013 sebesar Rp2.761.344,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 151 Penerimaan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018

Uraian	Nominal (Rp)
Kecamatan Semende Darat Laut	997.196,00
Kecamatan Tanjung Agung	2.681.456,00
Kecamatan Lawang Kidul	164.558.657,00
Kecamatan Muara Enim	214.607.997,00
Kecamatan Ujan Mas	3.536.704,00
Kecamatan Benakat	170.077,00
Kecamatan Gunung Megang	20.166.480,00
Kecamatan Rambang Dangku	27.343.372,00

Uraian	Nominal (Rp)
Kecamatan Lubai	6.602.698,00
Kecamatan Rambang	4.281.817,00
Kecamatan Lembak	3.529.168,00
Kecamatan Gelumbang	43.258.088,00
Kecamatan Muara Belida	3.272.621,00
Kecamatan Kelekar	1.502.077,00
Kecamatan Sungai Rotan	4.399.170,00
Kecamatan Belimbing	3.782.364,00
Kecamatan Lubai Ulu	40.972.710,00
Kecamatan Belida Darat	175.000,00
Perkotaan - Tower	7.384.750,00
Jumlah	553.222.402,00

- h) Perbedaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar (Rp55.482.150,27) merupakan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp40.000,00, realisasi pembayaran piutang Tahun 2017 sebesar (Rp55.522.150,00) dan penerimaan Pajak BPHTB yang diterima di Tahun 2017 oleh bendahara penerima namun kurang setor ke RKUD sebesar Rp0,27 dan disetor ke RKUD pada Tahun 2018.

2) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp23.783.596.170,78 dan Rp9.999.338.704,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 152 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	3.335.095.154,78	2.250.704.400,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.846.491.716,00	1.604.962.304,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	18.602.009.300,00	6.143.672.000,00
	Jumlah	23.783.596.170,78	9.999.338.704,00

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2018 sebesar Rp23.783.596.170,78 jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Tahun 2018 sebesar Rp24.515.827.175,08 terdapat perbedaan sebesar (Rp732.231.004,30) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 153 Pendapatan Retribusi Daerah LO - LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	3.335.095.154,78	4.061.959.459,08	(726.864.304,30)
2	Retribusi Jasa Usaha	1.846.491.716,00	1.851.858.416,00	(5.366.700,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	18.602.009.300,00	18.602.009.300,00	0,00
	Jumlah	23.783.596.170,78	24.515.827.175,08	(732.231.004,30)

Berikut rincian perbedaan per jenis Pendapatan Retribusi:

Retribusi Jasa Umum

Tabel 154 Retribusi Jasa Umum LO – LRA

Jenis Retribusi Jasa Umum	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	456.532.000,00	464.102.000,00	(7.570.000,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	217.170.000,00	217.170.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	723.371.000,00	723.371.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	851.608.000,00	801.968.000,00	49.640.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	505.126.000,00	505.126.000,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi	581.288.154,78	1.350.222.459,08	(768.934.304,30)
Jumlah	3.335.095.154,78	4.061.959.459,08	(726.864.304,30)

Perbedaan sebesar (Rp726.864.304,30) sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perbedaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar (Rp7.570.000,00) merupakan penerimaan Tahun 2017 yang belum disetor ke kas daerah oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetor ke RKUD pada Tahun 2018;
- Perbedaan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp49.640.000,00 merupakan piutang retribusi pelayanan pasar Tahun 2018 sebesar Rp92.900.000,00 yang terdiri dari UPTD Pasar Muara Enim sebesarRp30.180.000,00, UPTD Pasar Tanjung Enim sebesar Rp62.720.000,00. Realisasi pembayaran Piutang Tahun 2017 sebesar (Rp45.010.000,00) yang terdiri dari UPTD Pasar Muara Enim sebesar Rp23.680.000,00 dan UPTD Pasar Tanjung Enim sebesar Rp21.330.000,00 dan penerimaan Tahun 2018 yang belum disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.750.000,00;
- Perbedaan Retribusi Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi sebesar (Rp768.934.304,30) merupakan Piutang Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi Tahun 2018 sebesar Rp56,70 dan realisasi pembayaran Piutang Tahun 2014 atas nama PT Telkomsel sebesar (Rp768.934.361,00).

Retribusi Jasa Usaha

Tabel 155 Realisasi Retribusi Jasa Usaha LO - LRA

Jenis Retribusi Jasa Usaha	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1.032.480.560,00	1.042.780.060,00	(10.299.500,00)
Retribusi Terminal	58.625.666,00	61.347.666,00	(2.722.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan	22.662.000,00	22.662.000,00	0,00
Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan	207.251.500,00	199.596.700,00	7.654.800,00
Retribusi Tempat Rekreasi	129.051.000,00	129.051.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	205.570.000,00	205.570.000,00	0,00

Jenis Retribusi Jasa Usaha	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00
Retribusi Benih ikan	122.150.990,00	122.150.990,00	0,00
Retribusi Sewa Bus	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
Jumlah	1.846.491.716,00	1.851.858.416,00	(5.366.700,00)

Perbedaan sebesar (Rp5.366.700,00) sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perbedaan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar (Rp10.299.500,00) merupakan realisasi pembayaran Piutang Tahun 2017 sebesar (Rp10.300.000,00) dan penerimaan Tahun 2018 yang belum disetor Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah sebesar Rp500,00;
- Perbedaan Retribusi Terminal sebesar (Rp2.722.000,00) merupakan penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2017 yang disetor ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan pada Tahun 2018.
- Perbedaan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebesar Rp7.654.800,00 merupakan penerimaan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Tahun 2018 yang belum disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO sebesar Rp18.602.009.300,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LRA sebesar Rp18.602.009.300,00 menunjukkan tidak ada perbedaan nilai.

Tabel 156 Realisasi Retribusi Perizinan tertentu LO-LRA

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	17.853.881.700,00	17.853.881.700,00	0,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga Kerja Asing	748.127.600,00	748.127.600,00	0,00
Jumlah	18.602.009.300,00	18.602.009.300,00	0,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp17.160.828.134,66 dan Rp8.390.341.277,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 157 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.928.866.279,77	6.270.961.729,77
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	11.231.961.854,89	2.119.379.548,05
	Jumlah	17.160.828.134,66	8.390.341.277,82

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO sebesar Rp17.160.828.134,66 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Rp17.160.828.134,66 menunjukkan tidak terdapat perbedaan nilai.

Tabel 158 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO - LRA

Jenis Retribusi Jasa Umum	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.928.866.279,77	5.928.866.279,77	0,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	11.231.961.854,89	11.231.961.854,89	0,00
Jumlah	17.160.828.134,66	17.160.828.134,66	0,00

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp130.528.970.254,10 dan Rp125.819.121.388,89. Rincian sebagai berikut:

Tabel 159 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2018 dan 2017

Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	930.114.450,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	3.709.112.879,66	3.305.961.389,40
Pendapatan Bunga Deposito	22.198.685.230,55	7.073.089.945,92
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.398.358.924,28	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	25.519.292,00	1.091.000,00
Pendapatan Denda Pajak	413.094.323,00	236.576.573,00
Pendapatan dari Pengembalian	233.755.558,00	637.616.893,48
Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Rumah	289.556.355,00	255.572.063,00
Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa	39.664.383,56	51.082.986,30
Pendapatan BLUD	84.342.240.903,05	88.453.517.325,79
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	55.959.600,00	40.321.775,00
Denda atas Pelanggaran Perda	0,00	8.650.000,00
Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama	14.892.908.355,00	14.584.548.250,00
Dana BOS	0,00	11.171.093.187,00
Jumlah	130.528.970.254,10	125.819.121.388,89

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2018 sebesar Rp130.528.970.254,10 jika dibandingkan dengan jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Tahun 2018 sebesar Rp121.754.081.199,09 terdapat perbedaan sebesar Rp8.774.889.055,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO - LRA 2018

Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	930.114.450,00	930.114.450,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	3.709.112.879,66	3.709.112.879,66	0,00
Pendapatan Bunga Deposito	22.198.685.230,55	22.198.685.230,55	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	3.398.358.924,28	0,00	3.398.358.924,28
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	25.519.292,00	25.519.292,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	413.094.323,00	413.094.493,00	(170,00)
Pendapatan dari Pengembalian	233.755.558,00	233.755.558,00	0,00
Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Rumah	289.556.355,00	256.915.578,00	32.640.777,00
Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa	39.664.383,56	0,00	39.664.383,56
Pendapatan BLUD	84.342.240.903,05	79.038.015.762,88	5.304.225.140,17
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	55.959.600,00	55.959.600,00	0,00
Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama	14.892.908.355,00	14.892.908.355,00	0,00
Jumlah	130.528.970.254,00	121.754.081.199,09	8.774.889.055,01

Perbedaan sebesar Rp8.774.889.055,01 sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Perbedaan Tuntutan Ganti Kerugian daerah (TGR) sebesar Rp3.398.358.924,28 merupakan piutang kekurangan volume pekerjaan atas hasil temuan BPK Tahun 2018 pada Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b) Perbedaan denda pajak sebesar (Rp170,00) merupakan penerimaan denda pajak TA 2017 dan telah disetor ke RKUD pada Tahun 2018;
- c) Perbedaan pendapatan dari angsuran/cicilan rumah sebesar Rp32.640.777,00 merupakan Piutang Angsuran Perumahan Guru Tahun 2018 sebesar Rp289.556.355,00 dan penerimaan atas Piutang Angsuran Perumahan Guru Tahun 2017 sebesar (Rp256.915.578,00);
- d) Perbedaan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah berupa sewa sebesar Rp39.664.383,56 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2017 sebesar Rp76.250.684,93 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2018 sebesar (Rp36.586.301,37) dengan rincian sewa kantor Bank SumselBabel sebesar Rp30.750.684,93 dan sewa ATM Bank Mandiri sebesar Rp5.835.616,44 pada Gedung Kantor BPKAD Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- e) Perbedaan Pendapatan BLUD sebesar Rp5.304.225.140,17 merupakan tambahan piutang BLUD Tahun 2018 sebesar Rp18.337.419.612,00 dan realisasi penerimaan Piutang tahun pada Tahun 2017 sebesar (Rp13.033.194.471,83).

b. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.918.050.442.160,06 dan Rp1.877.210.874.950,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 161 Pendapatan Transfer Tahun 2018 dan 2017

Pendapatan Tranfer	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.792.510.139.858,00	1.749.209.635.325,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	0,00
Transfer Pemerintah Provinsi	124.890.246.882,26	88.362.900.741,35
Bantuan Keuangan	650.055.419,80	39.638.338.884,15
Jumlah	1.918.050.442.160,06	1.877.210.874.950,50

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2018 sebesar Rp1.918.050.442.160,06 jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Transfer – LRA Tahun 2018 sebesar Rp1.931.184.840.783,12 terdapat perbedaan sebesar (Rp13.134.398.623,06) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 162 Realisasi Pendapatan Transfer – LO - LRA

Pendapatan Tranfer	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.792.510.139.858,00	1.792.510.139.858,00	0,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0	0,00
Transfer Pemerintah Provinsi	124.890.246.882,26	121.397.360.626,12	3.492.886.256,14
Bantuan Keuangan	650.055.419,80	17.277.340.299,00	(16.627.284.879,20)
Jumlah	1.918.050.442.160,06	1.931.184.840.783,12	(13.134.398.623,06)

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2017 sebesar Rp1.884.412.102.571,20 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO pada Tahun 2018 sebesar Rp1.792.510.139.858,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 163 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO

Uraian	Pendapatan – LO (Rp)	Pendapatan – LRA (Rp)	Selisih
Dana Bagi Hasil Pajak	470.035.153.625,00	470.035.153.625,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari PBB	419.232.756.380,00	419.232.756.380,00	0,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi	35.931.347.151,00	35.931.347.151,00	0,00
Bagi Hasil dari Sektor Perkebunan	7.652.870.486,00	7.652.870.486,00	0,00
Bagi Hasil dari Sektor Perhutanan	3.982.921.748,00	3.982.921.748,00	0,00
Bagi Hasil dari Bea Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari PBB Bagi Rata	3.235.257.860,00	3.235.257.860,00	0,00

Uraian	Pendapatan – LO (Rp)	Pendapatan – LRA (Rp)	Selisih
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	425.449.223.197,00	425.449.223.197,00	0,00
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1.565.914.971,00	1.565.914.971,00	0,00
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap/ <i>Land Rent</i>	4.081.383.958,00	4.081.383.958,00	0,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksploitasi/Royalti	291.973.413.216,00	291.973.413.216,00	0,00
Penerimaan Pungutan hasil Perikanan	701.234.591,00	701.234.591,00	0,00
Penerimaan dari Pertambangan Minyak Bumi	18.413.015.321,00	18.413.015.321,00	0,00
Penerimaan dari Pertambangan Gas Bumi	108.501.891.548,00	108.501.891.548,00	0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	212.369.592,00	212.369.592,00	0,00
Dana Alokasi Umum	661.337.068.000,00	661.337.068.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	235.688.695.036,00	235.688.695.036,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Reguler	42.713.449.156,00	42.713.449.156,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	149.301.918.961,00	149.301.918.961,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan	43.673.326.919,00	43.673.326.919,00	0,00
Jumlah	1.792.510.139.858,00	1.792.510.139.858,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan antara yang tersaji pada LRA dengan LO.

2) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Tabel 164 Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Pendapatan Transfer	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	124.890.246.882,26	121.397.360.626,12	3.492.886.256,14

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp3.492.886.256,14 merupakan penerimaan piutang Tahun 2016 sebesar Rp29.495.397.912,92 dan tambahan piutang Tahun 2018 sebesar Rp32.988.284.169,06.

3) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan – LO sebesar Rp650.055.419,80 jika dibandingkan dengan Bantuan Keuangan – LRA sebesar Rp17.277.340.299,00 menunjukkan perbedaan sebesar (Rp16.627.284.879,20) yang merupakan pembayaran Piutang Jamsoskes Tahun 2017 sebesar Rp17.277.340.299,00 dan tambahan piutang tahun 2018 sebesar Rp650.055.419,80.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp153.667.225.265,72 dan Rp124.032.158.877,80. Jika dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sebesar Rp361.930.084.683,73 terdapat perbedaan sebesar (Rp208.262.859.418,01) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 165 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Jenis Pendapatan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.798.374.113,00	6.840.000.000,00	958.374.113,00
Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dalam negeri	24.100.056.535,00	22.489.616.535,00	1.610.440.000,00
Hibah Dana BOS	77.257.400.000,00	77.257.400.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	0,00
Dana Desa	0,00	208.161.174.000,00	(208.161.174.000,00)
Pendapatan Lainnya	1.011.394.617,72	3.681.894.148,73	(2.670.499.531,01)
Jumlah	153.667.225.265,72	361.930.084.683,73	(208.262.859.418,01)

Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar (Rp208.262.859.418,01) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp958.374.113,00 terdiri dari:
 - a) Perolehan hibah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia – Dirjen Perkebunan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim berupa Tanah, Gedung Dan Bangunan sebesar Rp86.297.725,00. Atas perolehan hibah tersebut diperuntukkan pada:
 1. Dinas Perkebunan perolehan hibah berupa Tanah, Gedung Dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp31.697.725,00;
 2. Kecamatan Belimbing perolehan hibah berupa Tanah, Gedung Dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp3.800.000,00;
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perolehan hibah berupa Aset Lain-Lain dengan nilai sebesar Rp50.800.000,00;
 - b) Perolehan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim berupa Tanah, Gedung Dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp872.076.388,00;
- 2) Perbedaan Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta dalam negeri sebesar Rp1.610.440.000,00 terdiri dari:
 - a) Perolehan hibah dari CSR PT Bukit Asam kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim berupa Peralatan dan Mesin. Atas perolehan hibah tersebut diperuntukkan pada:
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp160.000.000,00;

2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp1.430.000.000,00;
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bangunan dengan nilai sebesar Rp20.440.000,00.
- 3) Perbedaan Pendapatan Dana Desa yang tersaji pada LRA sebesar Rp208.161.174.000,00 dengan Pendapatan Dana Desa yang tersaji pada LO sebesar Rp0,00 disebabkan penerimaan Dana Desa dari APBN tidak dicatat sebagai pendapatan LO melainkan dicatat sebagai Utang selanjutnya pada saat realisasi pencairan Dana Desa kepada masing-masing desa penerima dicatat sebagai transaksi pelunasan Utang. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.
- 4) Perbedaan Pendapatan Lainnya sebesar (Rp2.670.499.531,01) terdiri dari:
- a) Penerimaan Piutang atas Piutang Lainnya yaitu piutang hasil temuan pemeriksaan BPK RI Tahun 2017 sebesar (Rp2.565.448.357,77) dengan rincian:
 - (1) Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp750.134.757,77;
 - (2) Kelebihan pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp70.214.000,00;
 - (3) Kelebihan pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp17.736.000,00;
 - (4) Kelebihan pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak pada Sekretariat Daerah sebesar Rp481.600,00;
 - (5) Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.724.768.100,00;
 - (6) Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.113.900,00.
 - b) Penerimaan atas pengembalian hasil temuan BPK RI Tahun 2017 sebesar (Rp116.626.988,59). Penerimaan tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan LO sebab atas penerimaan tersebut mengurangi Aset Lain-Lain dengan rincian:
 - (1) Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp57.056.534,26;
 - (2) Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.000.000,00;
 - (3) Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp47.570.454,33;
 - (4) Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.000.000,00.
 - c) Piutang Lainnya atas kekurangan volume pekerjaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat hasil temuan pemeriksaan BPK RI Tahun 2018 sebesar Rp11.575.815,35.

7.4.4.2 BEBAN

Beban atas kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp2.038.815.531.566,99 dan Rp1.793.094.055.874,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 166 Beban Tahun 2018 dan 2017

Jenis Beban	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Beban Pegawai	737.219.555.413,45	686.255.571.108,00
Beban Jasa	258.332.966.961,13	275.684.282.706,20
Beban Persediaan	122.343.471.741,96	200.821.023.500,81
Beban Pemeliharaan	16.657.338.777,00	9.804.404.288,00
Beban Perjalanan Dinas	142.850.693.454,85	94.583.856.903,36
Beban Bunga	7.271.976.314,64	6.496.789.171,60
Beban Subsidi	4.816.417.265,00	2.742.602.740,00
Beban Hibah	200.509.946.069,31	54.018.227.182,00
Beban Penyisihan Piutang	3.240.910.150,02	3.413.375.393,06
Beban Penyusutan	316.561.053.126,86	300.280.835.932,06
Beban Amortisasi	1.796.921.623,68	2.902.841.178,67
Beban Lain-lain	25.908.026.848,96	30.785.987.428,33
Beban Tak Terduga	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	189.234.729.451,13	124.246.504.614,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	1.516.848.228,00	1.057.753.728,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa	9.538.208.308,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Pemerintah Desa	1.016.467.833,00	0,00
Jumlah	2.038.815.531.566,99	1.793.094.055.874,09

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp737.219.555.413,45 dan Rp686.255.571.108,00. Beban Pegawai-LO sebesar Rp737.219.555.413,45 jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp739.817.484.303,45 terdapat perbedaan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 167 Realisasi Beban Pegawai - LO

Jenis Belanja Pegawai	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan Rp)
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	334.759.447.031,00	334.759.447.031,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga	32.820.813.447,00	32.820.813.447,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan	10.987.419.500,00	10.991.449.500,00	(4.030.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional	23.877.436.000,00	23.878.836.000,00	(1.400.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional Umum	4.067.700.000,00	4.067.700.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras	17.708.862.600,00	17.708.862.600,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	732.839.534,00	732.839.534,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji	4.640.181,00	4.640.181,00	0,00

Jenis Belanja Pegawai	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan Rp)
Beban luran Jaminan Kesehatan	9.502.395.092,00	9.502.395.092,00	0,00
Beban Uang Paket	84.483.000,00	84.483.000,00	0,00
Beban Tunjangan Badan Musyawarah	26.400.150,00	26.400.150,00	0,00
Beban Tunjangan Komisi	54.749.100,00	54.749.100,00	0,00
Beban Tunjangan Badan Anggaran	34.073.550,00	34.073.550,00	0,00
Beban Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	11.692.800,00	11.692.800,00	0,00
Beban Tunjangan Perumahan	7.582.500.000,00	7.582.500.000,00	0,00
Beban Uang Jasa Pengabdian	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
Beban Tunjangan Kesehatan Kerja	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00
Beban luran Asuransi Ketenagakerjaan	3.360.571.773,00	3.360.571.773,00	0,00
Beban Tunjangan Reses	1.940.400.000,00	1.940.400.000,00	0,00
Beban Tunjangan Transportasi	7.410.000.000,00	7.410.000.000,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	32.985.842.505,00	32.985.842.505,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD	114.291.528.140,00	114.291.528.140,00	0,00
Beban Tunjangan Kinerja	114.205.289.214,00	114.205.289.214,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.791.000.000,00	7.791.000.000,00	0,00
Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	475.750.000,00	475.750.000,00	0,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.343.953.584,45	2.343.953.584,45	0,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	347.556.335,00	347.556.335,00	0,00
Beban Uang Lembur PNS	3.940.581.750,00	3.158.759.850,00	781.821.900,00
Beban Pegawai BOS	5.416.704.027,00	8.791.024.817,00	(3.374.320.790,00)
Jumlah	737.219.555.413,45	739.817.484.303,45	(2.597.928.890,00)

Perbedaan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA sebesar (Rp2.597.298.890,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada sub akun Beban Pegawai-LO terdapat perbedaan sebesar (Rp2.597.298.890,00) merupakan pengurangan dari Beban Pegawai BOS-LO yang direklasifikasi ke Beban Jasa Upah Tenaga Kerja Lainnya-LO sebesar Rp3.372.500.790,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pada sub akun Beban Pegawai-LO terdapat perbedaan sebesar Rp1.820.000,00 merupakan pengurangan dari Beban Pegawai BOS-LO yang direklasifikasi ke Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp1.820.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- c. Pada sub akun beban Pegawai-LO terdapat reklasifikasi penambahan dari Barang dan Jasa BOS APBD sebesar Rp781.821.900,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rincian Beban Pegawai-LO per masing-masing OPD per 31 Desember 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 168 Beban Pegawai - LO per OPD

No.	Satuan Kerja	Beban Pegawai -LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	390.558.082.603,00
2	Dinas Kesehatan	76.129.033.179,00
3	RSUD dr. H. M. Rabain	34.857.200.510,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.400.826.572,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.863.052.849,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.891.429.303,00
7	Dinas Perhubungan	3.745.012.264,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.326.274.704,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.488.321.229,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.101.721.839,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.967.310.979,00
12	Dinas Sosial	3.072.094.067,00
13	Dinas Ketenagakerjaan	3.958.640.210,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2.810.470.026,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.898.338.205,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.194.499.025,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.235.599.246,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	3.717.398.296,00
19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.671.678.374,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.516.789.829,00
21	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27.653.247.076,00
22	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	616.851.664,00
23	Sekretariat Daerah	12.789.405.088,00
24	Sekretariat DPRD	3.616.659.282,00
25	Inspektorat Daerah Kabupaten	7.176.359.947,00
26	Badan Pendapatan Daerah	10.699.955.880,45
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.575.523.523,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	18.998.803.157,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	0,00
29	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.395.552.456,00
30	Kecamatan Semende Darat Ulu	1.780.891.982,00
31	Kecamatan Semende Darat Tengah	1.603.313.399,00

No.	Satuan Kerja	Beban Pegawai -LO (Rp)
32	Kecamatan Semende Darat Laut	1.555.459.443,00
33	Kecamatan Tanjung Agung	2.067.066.606,00
34	Kecamatan Lawang Kidul	3.764.315.963,00
35	Kecamatan Muara Enim	5.819.288.311,00
36	Kecamatan Ujan Mas	1.705.386.952,00
37	Kecamatan Benakat	1.792.487.234,00
38	Kecamatan Gunung Megang	1.645.939.365,00
39	Kecamatan Rambang Dangku	2.601.458.620,00
40	Kecamatan Lubai	1.524.632.512,00
41	Kecamatan Rambang	1.579.258.498,00
42	Kecamatan Lembak	1.829.550.882,00
43	Kecamatan Kelekar	1.285.141.509,00
44	Kecamatan Gelumbang	2.587.600.008,00
45	Kecamatan Sungai Rotan	1.890.690.237,00
46	Kecamatan Muara Belida	1.315.101.511,00
47	Kecamatan Belimbing	1.567.898.115,00
48	Kecamatan Belida Darat	1.541.680.398,00
49	Kecamatan Lubai Ulu	1.164.629.919,00
50	Dinas Ketahanan Pangan	2.943.396.461,00
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.267.676.894,00
52	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.160.656.688,00
53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.752.144.919,00
54	Dinas Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Peternakan	16.912.981.952,00
55	Dinas Perkebunan	7.104.017.653,00
56	Dinas Perikanan	3.740.331.460,00
57	Dinas Perdagangan	4.790.426.540,00
Jumlah		737.219.555.413,45

Rekapitulasi perhitungan Beban Pegawai per OPD disajikan dalam **Lampiran 15.a**

b. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp258.332.966.961,13 dan Rp275.684.282.706,20. Perbedaan nilai yang tersaji antara akun-akun pada Beban Jasa – LO dengan akun terkait di Belanja Barang dan Jasa – LRA dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 169 Realisasi Beban Jasa – LO

Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Jasa telepon	415.256.066,00	319.929.542,00	95.326.524,00
Beban Jasa air	1.521.442.773,00	1.295.793.693,00	225.649.080,00
Beban Jasa listrik	24.371.891.388,25	23.513.214.949,00	858.676.439,25
Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.314.393.130,00	1.038.209.500,00	276.183.630,00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	2.935.984.582,00	1.901.032.085,00	1.034.952.497,00
Beban Jasa Paket/Pengiriman	19.280.150,00	19.280.150,00	0,00
Beban Jasa Sertifikasi	126.750.000,00	126.750.000,00	0,00
Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan	1.312.428.891,00	531.212.000,00	781.216.891,00
Belanja Jasa Laboratorium	367.055.600,00	367.055.600,00	0,00
Belanja Jasa Publikasi / Promosi	9.284.169.800,00	9.284.169.800,00	0,00
Belanja Jasa/Upah Tenaga Kerja Lainnya	90.327.010.614,00	72.827.296.565,00	17.499.714.049,00
Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahli / Instruktur	16.034.572.171,00	13.905.510.000,00	2.129.062.171,00
Belanja Uang Transpor / Uang Saku Peserta	6.104.201.965,00	6.066.631.965,00	37.570.000,00
Belanja Jasa Binatu/Laundry Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	65.891.500,00	65.891.500,00	0,00
Belanja Jasa Pelayanan/Dukungan Pelayanan	2.238.805.100,00	2.238.805.100,00	0,00
Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	789.822.200,00	789.822.200,00	0,00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	1.422.685.720,00	4.786.373.429,00	(3.363.687.709,00)
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.450.923.763,54	1.604.087.439,00	(153.163.675,46)
Beban Premi Asuransi Jiwa	212.284.312,33	204.941.600,00	7.342.712,33
Beban Jasa KIR	1.135.400,00	1.135.400,00	0,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	358.820.967,00	358.820.967,00	0,00
Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.392.650,00	4.392.650,00	0,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	197.911.575,00	197.911.575,00	0,00
Beban Penggandaan	10.003.086.857,00	2.695.281.750,00	7.307.805.107,00
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	713.506.678,08	713.487.500,00	19.178,08
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	657.850.000,00	657.850.000,00	0,00
Belanja sewa penginapan	4.506.593.091,00	4.506.593.091,00	0,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.870.523.750,00	2.556.836.750,00	313.687.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	53.814.000,00	53.214.000,00	600.000,00
Beban Sewa Meja Kursi	432.235.000,00	429.335.000,00	2.900.000,00
Beban Sewa Proyektor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
Beban Sewa Generator	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
Beban Sewa Tenda	757.465.600,00	757.465.600,00	0,00
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	51.066.650,00	29.450.000,00	21.616.650,00
Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan Audio/Video	457.950.000,00	452.150.000,00	5.800.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	128.047.500,00	100.950.000,00	27.097.500,00
Beban Jasa Konsultasi Penelitian	735.735.000,00	735.735.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	4.889.161.445,07	7.290.048.100,00	(2.400.886.654,93)

Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	153.370.234,38	782.313.000,00	(628.942.765,62)
Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan/Pengembangan	911.749.267,50	1.753.672.767,50	(841.923.500,00)
Belanja Jasa Konsultansi Pelasanaan dan Pengelolaan	79.095.500,00	79.095.500,00	0,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	104.300.000,00	104.300.000,00	0,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	1.094.130.000,00	1.094.130.000,00	0,00
Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	1.287.385.000,00	1.287.385.000,00	0,00
Beban Sosialisasi	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00
Beban Bimbingan Teknis	277.600.000,00	277.600.000,00	0,00
Belanja Kontribusi PNS	1.010.507.719,00	791.419.000,00	219.088.719,00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	4.204.814.000,00	4.204.814.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	55.850.000,00	55.850.000,00	0,00
Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	185.500.000,00	185.500.000,00	0,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	247.500.000,00	247.500.000,00	0,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	1.728.697.403,00	1.531.600.000,00	197.097.403,00
Beban Barang Dana BOS	108.940.276,00	62.543.083.311,00	(62.434.143.035,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	8.873.806.528,00	8.873.806.528,00	0,00
Beban Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah	54.151.662,00	7.883.328.224,00	(7.829.176.562,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD -LO	50.680.805.981,98	73.525.113.145,00	(22.844.307.163,02)
Beban Kontribusi NON PNS	64.317.500,00	0,00	64.317.500,00
JUMLAH	258.332.966.961,13	327.723.474.975,50	(69.390.508.014,37)

Perbedaan sebesar (Rp69.390.508.014,37) sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan Beban Jasa Telepon - LO dengan Belanja Jasa Telepon - LRA sebesar Rp95.326.524,00 dikarenakan adanya penambahan reklasifikasis Beban Jasa Telepon - LO dari Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp95.326.524,00;
2. Perbedaan Beban Jasa Air - LO dengan Belanja Jasa Air - LRA sebesar Rp225.649.080,00 dikarenakan adanya penambahan reklasifikasi Beban Jasa Air dari Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp225.649.080,00;
3. Perbedaan Beban Jasa Listrik - LO dengan Belanja Jasa Listrik - LRA sebesar Rp858.676.439,25 dikarenakan adanya penambahan Reklasifikasi Beban Jasa Barang Dana BOS - LO SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp842.408.712,25 dan penambahan reklasifikasi Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah OPD Dinas Kesehatan sebesar Rp16.267.727,00;
4. Perbedaan Beban Jasa Surat Kabar - LO dengan Belanja Jasa Surat Kabar - LRA sebesar Rp276.183.630,00 dikarenakan adanya penambahan reklasifikasi Beban Jasa Surat Kabar - LO dari Beban Jasa Barang BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp276.183.630,00;

5. Perbedaan Beban Jasa Kawat/Faxsimili/Internet - LO dengan Belanja Jasa Kawat/Faxsimili/Internet-LRA sebesar Rp1.034.952.497,00 dikarenakan adanya penambahan reklasifikasi Beban Jasa Kawat/Faxsimili/Internet - LO dari Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp948.747.444,00 dan penambahan reklasifikasi dari Beban Jasa Kawat /Faxsimili/Internet - LO OPD Dinas Kesehatan sebesar Rp86.205.053,00;
6. Perbedaan Beban Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan - LO dengan Belanja Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan - LRA sebesar Rp781.216.891,00 dikarenakan adanya penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp779.956.891 dan penambahan reklasifikasi dari Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO OPD Dinas Kesehatan sebesar Rp1.260.000,00;
7. Perbedaan Beban Jasa Upah Tenaga Kerja Lainnya - LO dengan Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Lainnya - LRA sebesar Rp17.499.714.049,00 dikarenakan adanya penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Barang Dana BOS - LO sebesar Rp13.996.485.511,00 dan penambahan reklasifikasi dari Beban Pegawai BOS - LO sebesar Rp3.372.500.790,00 OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta penambahan reklas dari Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah - LO OPD Dinas Kesehatan sebesar Rp130.727.748,00;
8. Perbedaan Beban Jasa Narasumber /Tenaga Ahli /Instruktur-LO dengan Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur - LRA sebesar Rp2.129.062.171,00 dikarenakan adanya penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.128.428.171,00 dan penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO OPD Dinas Kesehatan sebesar Rp634.000,00;
9. Perbedaan Beban Jasa Uang Transport / Uang Saku Peserta - LO dengan Belanja Jasa Uang Transport / Uang Saku Peserta - LRA sebesar Rp37.570.000,00 dikarenakan adanya penambahan dari reklasifikasi Beban Barang dan Jasa Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp20.170.000,00 dan Penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO OPD Dinas Kesehatan sebesar Rp17.400.000,00;
10. Perbedaan Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan - LO sebesar Rp(3.363.687.709,00) merupakan pembayaran Utang Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan dengan rincian:
 - a) Sebesar Rp485.773.500,00 untuk pembayaran klaim Jamsoskes Sumsel Semesta Puskesmas – puskesmas dalam Lingkup Kabupaten Muara Enim bulan November dan Desember 2017 dengan SP2D Nomor 0115/BL/GU/BPKAD/2018;
 - b) Sebesar Rp125.928.900,00 untuk pembayaran klaim Jamsoskes Sumsel Semesta RSUD Kota Prabumulih bulan Oktober, November

- dan Desember 2017 dengan SP2D Nomor 0371/BL/LS/BPKAD/2018;
- c) Sebesar Rp33.089.000,00 untuk pembayaran klaim Jamsoskes Sumsel Semesta Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Bulan November dan Desember 2017 dengan SP2D 0372/BL/LS/BPKAD/2018;
 - d) Sebesar Rp11.471.400,00 untuk pembayaran klaim Jamsoskes Sumsel Semesta RS Islam Siti Khadijah Palembang Tahun 2015 dan 2017 Biaya RJTL, RITL, IGD Klaim Bulan Juli 2015 dan Februari 2017 dengan SP2D 0390/BL/LS/BPKAD/2018;
 - e) Sebesar Rp132.030.400,00 untuk pembayaran klaim Jamsoskes Sumsel Semesta RSUD dr H Ibnu Suwoto Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Bulan Oktober 2017 s.d Desember 2017 dengan SP2D 0642/BL/LS/BPKAD/2018;
 - f) Sebesar Rp16.243.800,00 untuk pembayaran klaim Jamsoskes Sumsel Semesta RSUD Lahat Bulan April 2015, Maret 2016 dan Mei 2016 dengan SP2D 0710/BL/LS/BPKAD/2018;
 - g) Sebesar Rp2.494.269.000,00 untuk pembayaran klaim Jamsoskes Sumsel Semesta RSUD dr H.M Rabain Muara Enim Bulan November 2017 s.d. Desember 2017 dengan SP2D 1808/BL/LS/BPKAD/2018;
 - h) Pembayaran Klaim Jamsoskes Sumsel Semesta RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Bulan September 2011 s.d. Desember 2011, Desember 2014 dan Juli 2015 s.d. September 2015 sebesar Rp.71.901.529,00 dengan SP2D Nomor 0974/BL/LS/BPKAD/2018
 - i) Beban jasa premi asuransi kesehatan atas *sharing* pelayanan Jamsoskes tahun 2018 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang belum dibayar sebesar Rp7.019.820,00
11. Perbedaan Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar (Rp153.163.675,46) merupakan selisih antara saldo Beban Dibayar Dimuka Tahun 2017 sebesar Rp805.402.340,91 dan saldo Beban Dibayar Dimuka Tahun 2018 sebesar Rp958.566.016,37. Daftar tersebut tersaji dalam **Lampiran 6.a**;
 12. Perbedaan Beban Jasa Premi Asuransi Jiwa-LO sebesar Rp7.342.712,33 merupakan selisih antara saldo Beban Dibayar Dimuka Tahun 2017 sebesar Rp15.360.684,93 dan saldo Beban Dibayar Dimuka Tahun 2018 sebesar Rp8.017.972,60. Daftar tersebut tersaji dalam **Lampiran 6.b**;
 13. Perbedaan Beban Jasa Penggandaan-LO dengan Belanja Jasa Penggandaan-LRA sebesar Rp7.307.805.107,00 dikarenakan adanya penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.259.260.007,00 dan Penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO OPD Dinas Kesehatan sebesar Rp48.545.100,00;
 14. Perbedaan Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat-LO sebesar Rp19.178,08 merupakan selisih antara saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2017 sebesar Rp3.000.000,00 dan saldo Beban Dibayar Dimuka Tahun 2018

sebesar Rp2.980.821,92 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Daftar tersebut tersaji dalam **Lampiran 6.c**;

15. Perbedaan Beban Jasa Mobilitas Darat - LO dengan Belanja Jasa Mobilitas Darat-LRA sebesar Rp313.687.000,00 dikarenakan adanya penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp313.687.000,00;
16. Perbedaan Beban Jasa Mobilitas Air - LO dengan Belanja Jasa Mobilitas Air - LRA sebesar Rp600.000,00 dikarenakan adanya penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp600.000,00;
17. Perbedaan Beban Jasa Sewa Meja Kursi - LO dengan Belanja Jasa Sewa Meja Kursi - LRA sebesar Rp2.900.000,00 dikarenakan adanya penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.900.000,00;
18. Perbedaan Beban Jasa Sewa Pakaian Adat - LO dengan Belanja Jasa Sewa Pakaian Adat - LRA sebesar Rp21.616.650,00 dikarenakan adanya penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp21.616.650,00;
19. Perbedaan Beban Jasa Sewa Perlengkapan / Peralatan Audio / Video - LO dengan Belanja Jasa Sewa Perlengkapan / Peralatan Audio / Video - LRA sebesar Rp5.800.000,00 dikarenakan adanya penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.800.000,00 ;
20. Perbedaan Beban Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya - LO dengan Belanja Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor lainnya - LRA sebesar Rp27.097.500,00 dikarenakan adanya penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Barang Dana BOS - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp27.097.500,00;
21. Perbedaan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan - LO dengan Belanja Jasa Perencanaan - LRA sebesar (Rp2.400.886.654,93) dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan - LO ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp199.000.000,00;
 - b. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Kosultasi Perencanaan - LO ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp84.580.554,93 OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan - LO ke Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja sebesar Rp185.840.600,00 OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan - LO ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp196.730.000,00;

- e. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan - LO ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp789.855.000,00;
 - f. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan - LO ke Aset Tak Berwujud OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp49.560.500,00;
 - g. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan - LO ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan OPD Dinas Perhubungan sebesar Rp39.850.000,00;
 - h. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan - LO ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan OPD Dinas Kesehatan sebesar Rp755.810.000,00.
 - i. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan - LO ke Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp99.660.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
22. Perbedaan Beban Jasa Konsultasi Pengawasan - LO dengan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan - LRA sebesar (Rp628.942.765,62) dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Pengawasan - LO OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja sebesar Rp230.800.765,62;
 - b. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Pengawasan - LO ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Gedung Kantor OPD Dinas Kesehatan sebesar Rp398.142.000,00;
23. Perbedaan Beban Jasa Konsultasi Penyusunan / Pengembangan - LO dengan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan / Pengembangan - LRA sebesar (Rp841.923.500,00) dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Penyusunan / Pengembangan - LO ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp47.547.500,00 OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Konsultasi Penyusunan / Pengembangan - LO ke Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp794.376.000,00 OPD Dinas Perdagangan.
24. Perbedaan Beban Jasa Kontribusi PNS - LO dengan Belanja Kontribusi PNS - LRA sebesar Rp219.088.719,00 dikarenakan Reklasifikasi Penambahan dari Beban Jasa Barang Dana BOS - LO sebesar Rp170.703.719,00 OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan reklasifikasi penambahan dari Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO sebesar Rp48.385.000,00 OPD Dinas Kesehatan;
25. Perbedaan Beban Jasa Uang yang diserahkan kepada Pihak Masyarakat - LO dengan Belanja Jasa Uang yang Diserahkan Kepada Pihak Masyarakat - LRA sebesar Rp197.097.403,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi penambahan dari Beban Jasa Barang Dana BOS - LO sebesar Rp164.097.403,00 OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Reklasifikasi penambahan dari Beban Persediaan Barang yang diserahkan ke masyarakat - LO sebesar Rp11.000.000,00 OPD Kecamatan Lubai;
 - c. Reklasifikasi penambahan dari Beban Persediaan Barang yang diserahkan ke Masyarakat - LO sebesar Rp22.000.000,00 OPD Kecamatan Kelekar.
26. Perbedaan Beban Jasa Barang Dana BOS - LO dengan Belanja Jasa Barang Dana BOS - LRA sebesar (Rp62.434.143.035,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Barang Dana BOS - LO ke Beban Perjalanan Dinas - LO sebesar Rp3.633.154.746,00 OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Barang Dana BOS - LO ke Beban Lain-lain - LO sebesar Rp1.429.229.991,00 OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Reklasifikasi pengurangan Beban Barang Dana BOS - LO ke Beban Pemeliharaan - LO sebesar Rp7.774.885.911,00;
 - d. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Barang Dana BOS - LO ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp1.222.179.960,00 dan Reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Barang Dana BOS - LO ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp123.369.045,00;
 - e. Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Barang Dana BOS-LO ke Beban Jasa Kantor-LO sebesar Rp19.313.355.963.25, reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Dana BOS-LO ke Beban Jasa Penggandaan-LO sebesar Rp7.259.260.007,00, reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Barang Dana BOS-LO ke Beban Jasa Mobilitas Darat-LO sebesar Rp314.287.000,00, Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Barang Dana BOS-LO ke Beban Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-LO sebesar Rp57.414.150,00, pengurangan Beban Jasa Barang Dana BOS-LO ke Beban Jasa Uang Yang diserahkan ke Masyarakat-LO sebesar Rp164.097.403,00 Reklasifikasi Pengurangan Beban Jasa Barang Dana BOS-LO ke Beban Jasa Kontribusi PNS-LO sebesar Rp170.703.719,00 Reklas Beban Jasa Barang Dana BOS-LO ke Beban Jasa Kontribusi Non PNS-LO sebesar Rp64.317.500,00.
 - f. Reklasifikasi Pengurangan Beban Barang Dana BOS-LO ke Beban Persediaan-LO sebesar Rp20.126.065.739,75
27. Perbedaan Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah - LO dengan Belanja Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LRA sebesar (Rp7.829.176.562,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO ke Beban Jasa Kantor - LO sebesar Rp349.424.628,00;

- b. Reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO ke Beban Persediaan - LO sebesar Rp2.897.022.940,00;
 - c. Reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO ke Beban Perjalanan Dinas - LO sebesar Rp1.679.353.828,00;
 - d. Reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO ke Beban Pemeliharaan - LO sebesar Rp274.782.552,00;
 - e. Reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO ke Beban Lain-lain - LO sebesar Rp377.295.316,00;
 - f. Reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp2.251.297.298,00.
28. Perbedaan Beban Jasa Barang dan Jasa BLUD – LO dengan Belanja Jasa Barang dan Jasa BLUD - LRA sebesar (Rp22.844.307.163,02) dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Pembayaran Utang BLUD Tahun 2017 sebesar Rp14.508.745.715,00;
 - b. Penambahan Utang Tahun 2018 sebesar Rp22.413.894.766,53;
 - c. Reklasifikasi pengurangan Beban Jasa Barang dan Jasa BLUD – LO ke Beban Persediaan - LO sebesar Rp30.749.456.241,55.
29. Perbedaan Beban Jasa Kontribusi Non PNS - LO dengan Belanja Kontribusi Non PNS - LRA sebesar Rp64.317.500,00 dikarenakan Reklasifikasi penambahan dari Beban Jasa Barang Dana BOS - LO sebesar Rp64.317.500,00 OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rincian Beban Jasa – LO per masing-masing OPD per 31 Desember 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 170 Beban Jasa – LO 2018

No.	OPD	Beban Jasa LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58.610.538.340,95
2	Dinas Kesehatan	27.941.193.125,00
3	RSUD DR.H.M.Rabain	53.360.096.063,98
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.842.710.372,78
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.943.488.119,04
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.900.083.253,38
7	Dinas Perhubungan	2.242.023.607,75
8	Dinas Lingkungan Hidup	5.659.657.069,92
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	758.947.925,93
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	853.324.278,78
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.774.624.850,00
12	Dinas Sosial	3.024.749.177,80
13	Dinas Ketenagakerjaan	678.324.731,70
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	946.982.600,73
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.608.850.381,60
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.996.113.805,50

No.	OPD	Beban Jasa LO (Rp)
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	865.239.909,70
18	Satuan Polisi Pamong Praja	4.845.802.068,07
19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.216.868.840,11
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	898.586.250,00
21	Sekretariat Daerah	19.091.311.099,41
22	Sekretariat DPRD	2.232.798.244,14
23	Inspektorat Daerah Kabupaten	665.619.393,73
24	Badan Pendapatan Daerah	2.060.915.131,09
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.383.224.269,81
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	3.766.489.621,94
27	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.546.034.244,41
28	Kec. Semende Darat Ulu	315.151.072,60
29	Kec. Semende Darat Tengah	432.589.753,51
30	Kec. Semende Darat Laut	384.915.886,51
31	Kec. Tanjung Agung	614.737.624,25
32	Kec. Lawang Kidul	1.587.448.849,25
33	Kec. Muara Enim	2.028.507.754,88
34	Kec. Ujan Mas	383.014.825,64
35	Kec. Benakat	269.754.454,37
36	Kec. Gunung Megang	486.481.062,25
37	Kec. Rambang Dangku	475.179.184,25
38	Kec. Lubai	430.803.145,00
39	Kec. Rambang	389.566.892,00
40	Kec. Lembak	341.222.575,00
41	Kec. Kelekar	302.325.925,00
42	Kec. Gelumbang	836.097.168,00
43	Kec. Sungai Rotan	473.923.514,25
44	Kec. Muara Belida	334.516.675,00
44	Kec. Belimbing	488.473.409,71
45	Kec. Belida Darat	432.127.274,00
46	Kec. Lubai Ulu	370.972.339,65
47	Dinas Ketahanan Pangan	939.837.485,63
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.907.656.058,88
49	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.099.883.461,36
50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	583.241.447,88
51	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	4.237.957.345,84
52	Dinas Perkebunan	1.138.937.112,50
53	Dinas Perikanan	1.369.837.061,00
54	Dinas Perdagangan	16.963.210.825,67
	Jumlah	258.332.966.961,13

Rekapitulasi perhitungan Beban Jasa per OPD disajikan dalam **Lampiran 15.b.**

c. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp122.343.471.741,96. Perbedaan nilai antara yang tersaji pada LO dengan realisasi anggaran terkait atas Belanja Persediaan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 171 Realisasi Beban Persediaan - LO

Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Alat Tulis Kantor	20.653.064.565,75	10.450.968.581,00	10.202.095.984,75
Beban Dokumen/Administrasi Tender	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
Beban Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.790.425.767,00	2.133.030.250,00	657.395.517,00

Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	537.585.977,00	192.867.600,00	344.718.377,00
Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.278.837.663,00	1.383.790.125,00	2.895.047.538,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	3.381.206.923,00	3.271.177.286,00	110.029.637,00
Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	49.800.000,00	5.750.000,00	44.050.000,00
Beban Pengisian Tabung Gas	114.717.500,00	49.520.000,00	65.195.500,00
Beban Pengisian Pendingin AC	34.365.000,00	31.805.000,00	2.560.000,00
Beban Alat Kesehatan Habis Pakai	10.120.398.042,52	4.376.881.701,50	5.743.516.341,02
Beban Dekorasi	171.954.346,00	17.000.000,00	154.954.346,00
Beban Bahan Baku Bangunan	349.478.400,00	342.821.900,00	6.656.500,00
Beban Bahan/Bibit Tanaman	567.848.911,00	412.486.000,00	155.362.911,00
Beban Bibit Ternak	80.712.850,00	109.280.000,00	(28.567.150,00)
Beban Bahan Obat-Obatan	20.560.730.876,49	11.293.193.432,00	9.267.537.444,49
Beban Bahan Kimia dan Pupuk	773.383.238,00	718.934.350,00	54.448.888,00
Beban Persediaan Makanan Pokok / Bahan Pangan	113.901.409,20	328.855.000,00	(214.953.590,80)
Beban Bahan Praktek / Keterampilan / Peraga / Penolong	2.735.948.314,00	1.950.031.273,00	785.917.041,00
Beban Bahan Material / Uji / Sampel	8.235.000,00	8.235.000,00	0,00
Beban Bahan Laboratorium	5.453.499.020,00	525.387.000,00	4.928.112.020,00
Beban Bahan/Alat Pakan	1.302.375.150,00	1.301.002.150,00	1.373.000,00
Beban Bahan/Alat Pembantu	421.168.470,00	421.168.470,00	0,00
Beban Penggantian Suku Cadang	3.707.476.940,00	3.573.089.387,00	134.387.553,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.518.473.588,00	1.446.055.041,00	72.418.547,00
Beban Cetak	13.069.866.440,00	11.583.339.501,00	1.486.526.939,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.732.699.359,00	2.187.200.000,00	1.545.499.359,00
Beban Makanan dan Minuman Tamu	1.334.377.000,00	1.334.377.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan (Diklat/Bimtek/Kursus/Workshop)	3.635.226.360,00	3.343.013.700,00	292.212.660,00
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan (Sosialisasi/Seminar/Penyuluhan/Audiensi)	14.645.177.849,00	11.446.864.550,00	3.198.313.299,00
Beban Makanan dan Minuman Pasien	2.113.175.100,00	0,00	2.113.175.100,00
Beban Makanan dan Minuman Dokter Residen/Supervisor/Tenaga Berisiko Tinggi (RSUD)	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Gizi Balita	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00

Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Bahan Makanan dan Minuman RumahTangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	401.909.500,00	401.909.500,00	0,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	185.672.000,00	185.672.000,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	363.000.000,00	363.000.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
Beban Atribut Pakaian	103.075.000,00	103.075.000,00	0,00
Beban Pakaian Kerja Lapangan	800.274.975,00	800.274.975,00	0,00
Beban Kelengkapan Pakaian Kerja	386.967.300,00	386.967.300,00	0,00
Beban Pakaian Adat Daerah	120.875.000,00	120.875.000,00	0,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Beban Pakaian Olahraga	440.185.000,00	424.335.000,00	15.850.000,00
Beban Pakaian Seragam Kegiatan	1.168.902.908,00	1.036.199.000,00	132.703.908,00
Beban Barang/Jasa yg akan Diserahkan kpd Masyarakat	0,00	65.606.427.150,00	(65.606.427.150)
Beban Barang/Jasa yg akan Diserahkan kpd Pihak Ketiga	0,00	8.949.284.000,00	(8.949.284.000,00)
Jumlah	122.343.471.741,96	152.732.643.222,50	(30.389.171.480,54)

Perbedaan sebesar (Rp30.389.171.480,54) sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perbedaan Beban Alat Tulis Kantor sebesar Rp10.202.095.984,75, merupakan saldo awal Persediaan Rp269.965.347,00 ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BLUD Rp254.558.500,00, reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp9.179.006.446,75 dan reklasifikasi dari Belanja JKN untuk pembelian Alat Tulis Kantor Rp876.925.927,00 dikurangi saldo akhir Persediaan Tahun 2018 Rp378.360.236,00.
- 2) Perbedaan Beban Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, *battery* kering) Rp657.395.517,00 merupakan saldo awal Persediaan Rp264.823.404,00 ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BLUD Rp16.561.500,00, reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp579.322.277,00 dan reklasifikasi dari Belanja JKN Rp38.029.500,00 dikurangi saldo akhir Persediaan Tahun 2018 Rp241.341.164,00.
- 3) Perbedaan Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp344.718.377,00 merupakan Persediaan awal sebesar Rp4.041.000,00 ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS sebesar Rp330.597.877,00 dan reklasifikasi dari Belanja JKN Rp20.184.500,00 dikurangi Persediaan akhir Tahun 2018 sebesar Rp10.105.000,00.
- 4) Perbedaan Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp2.895.047.538,00 merupakan Persediaan awal sebesar Rp183.989.338,00

- ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BLUD Rp393.092.590,00, reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp2.026.054.305,00 dan reklasifikasi dari Belanja JKN Rp356.012.205,00 dan dikurangi saldo akhir Persediaan Tahun 2018 Rp64.100.900,00.
- 5) Perbedaan Beban Bahan Bakar Minyak / Gas sebesar Rp110.029.637,00,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp77.518.624,00 ditambah reklasifikasi dari Belanja JKN Rp32.511.013,00.
 - 6) Perbedaan Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran sebesar Rp44.050.000,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp44.050.000,00.
 - 7) Perbedaan Beban Pengisian Tabung Gas sebesar Rp65.197.500,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp65.197.500,00.
 - 8) Perbedaan Beban Pengisian Pendingin AC sebesar Rp2.560.000,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja JKN Rp2.560.000,00.
 - 9) Perbedaan Beban Alat Kesehatan Habis Pakai Rp5.743.516.341,02 merupakan Persediaan awal Rp5.184.463.407,08 ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BLUD Rp7.525.056.830,86, reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp103.571.412,00, reklasifikasi dari Belanja JKN Rp907.586.880,00 dikurangi saldo akhir Persediaan Tahun 2018 Rp7.977.162.188,92.
 - 10) Perbedaan Beban Dekorasi sebesar Rp154.954.346,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp154.954.346,00.
 - 11) Perbedaan Beban Bahan Baku Bangunan sebesar Rp6.656.500,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp4.736.500,00 ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa JKN Rp1.920.000,00.
 - 12) Perbedaan Beban Bahan/Bibit Tanaman Rp155.362.911,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp155.362.911,00.
 - 13) Perbedaan Beban Bibit Ternak (Rp28.567.150,00) merupakan Persediaan awal Rp162.229.350,00 dikurangi saldo akhir 2018 Rp190.796.500,00.
 - 14) Perbedaan Beban Bahan Obat-obatan Rp9.267.537.444,49 merupakan persediaan awal Rp13.078.581.833,70 ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BLUD 14.744.948.873,69, reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp484.536.168,00, reklasifikasi dari Belanja JKN Rp57.567.677,00 dan ditambah subsidi obat dari Dinkes Rp9.470.470,00 dikurangi subsidi obat ke RSUD dr. H. M. Rabain Rp9.470.470,00 dan saldo akhir Persediaan Tahun 2018 Rp19.098.097.107,90.
 - 15) Perbedaan Beban Bahan Kimia dan Pupuk Rp54.448.888,00 merupakan persediaan awal Rp169.360.400,00 ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp28.948.000,00 dan reklasifikasi dari Belanja JKN Rp536.000,00 dikurangi saldo akhir Persediaan Tahun 2018 Rp144.395.512,00.
 - 16) Perbedaan Beban Makanan Pokok / Bahan Pangan (Rp214.953.590,80) merupakan Persediaan awal Rp476.339.128,00 ditambah koreksi saldo awal Rp25.445.922,00 dikurangi saldo akhir Persediaan 2018 Rp716.738.640,80.
 - 17) Perbedaan Beban Bahan Praktek/Keterampilan/Peraga/Penolong sebesar Rp785.917.041,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Modal BOS

Rp350.000,00 ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp785.567.041,00.

- 18) Perbedaan Beban Bahan Laboratorium Rp4.928.112.020,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BLUD Rp4.846.018.520,00 ditambah reklasifikasi dari Belanja JKN Rp82.093.500,00
- 19) Perbedaan Beban Bahan/Alat Pakan Rp1.373.000,00 merupakan Persediaan awal Rp2.673.000,00 dikurangi saldo akhir Persediaan 2018 Rp1.300.000,00.
- 20) Perbedaan Beban Penggantian Suku Cadang Rp134.387.553,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja JKN Rp134.387.553,00.
- 21) Perbedaan Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp72.418.547,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja JKN Rp72.418.547,00.
- 22) Perbedaan Beban Cetakan Rp1.486.526.939,00 merupakan Persediaan awal Rp806.856.150,00 ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BLUD Rp829.532.950,00, reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp753.875.016,00 dan reklasifikasi dari Belanja JKN Rp236.903.273,00 dikurangi saldo akhir Persediaan Tahun 2018 Rp1.140.640.450,00.
- 23) Perbedaan Beban Makanan dan Minuman Rapat Rp1.545.499.359,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS sebesar Rp1.490.414.194,00 dan reklasifikasi dari Belanja JKN Rp34.936.365,00.
- 24) Perbedaan Beban Makanan dan Minuman Pelatihan Rp292.212.660,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS sebesar Rp292.212.660,00.
- 25) Perbedaan Beban Makanan dan Minuman Kegiatan (Sosialisasi/Seminar/Penyuluhan/Audiensi) Rp3.198.313.299,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS sebesar Rp3.155.863.299,00 dan reklasifikasi dari Belanja JKN Rp42.450.000,00.
- 26) Perbedaan Beban Makanan dan Minuman Pasien sebesar Rp2.113.175.100,00 merupakan persediaan awal Rp34.600.530,00 ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BLUD sebesar Rp2.139.686.450,00 dikurangi dengan Persediaan akhir tahun 2018 sebesar Rp61.111.880,00.
- 27) Perbedaan Beban Pakaian Olahraga Rp15.850.000,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja barang/jasa BOS Rp15.850.000,00.
- 28) Perbedaan Beban Pakaian Seragam Kegiatan Rp132.703.908,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp132.703.908,00.
- 29) Perbedaan Beban Barang/Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat sebesar (Rp65.606.427.150,00) terdiri dari persediaan awal Rp6.507.288.611,05 ditambah reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa BOS Rp245.574.455,00 dikurangi koreksi saldo awal sebesar Rp1.061.781.111,05 dikurangi reklasifikasi ke Belanja Jasa Rp33.000.000,00, reklasifikasi ke Aset Tetap Rp74.730.000,00 dan saldo akhir 2018 sebesar Rp48.505.637.961,16, dikurangi saldo akhir Persediaan Rp44.751.990.145,81, dan dikurangi reklasifikasi ke Beban Hibah sebesar Rp26.437.788.959,19. Rincian Beban Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang direklasifikasi ke Beban Hibah ada pada **Lampiran 7.d**;

- 30) Perbedaan Beban Barang/Jasa yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar (Rp.8.949.284.000,00) terdiri dari persediaan awal sebesar Rp910.026.000,00 dikurangi saldo akhir 2018 sebesar Rp8.325.222.969,38 dan dikurangi reklasifikasi ke beban hibah senilai Rp1.534.087.030,62. Rincian Beban Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang direklasifikasi ke Beban Hibah ada pada **Lampiran 7.d**.

Beban Persediaan per SKPD disajikan dalam **Lampiran 7b**.

Tabel 172 Rincian Perbedaan Beban Bahan Obat-obatan LRA dengan LO

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal persediaan	13.078.581.833,70
Bahan obat-obatan yang dibeli dengan belanja BLUD	14.744.948.873,69
Bahan obat-obatan yang dibeli dengan belanja BOS	484.536.168,00
Bahan obat-obatan yang dibeli dengan belanja JKN	57.567.677,00
Persediaan obat-obatan akhir tahun 2018	(19.098.097.107,90)

d. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp16.657.338.777,00 dan Rp9.804.404.288,00. Beban Pemeliharaan-LO jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp10.560.639.314,00 terdapat perbedaan sebesar Rp6.106.724.763,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 173 Realisasi Beban Pemeliharaan – LO

Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.307.303.691,00	1.558.785.600,00	748.518.091,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.740.763.979,00	7.229.622.600,00	4.511.141.379,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.224.535.623,00	444.820.739,00	779.714.884,00
Beban Pembuatan Marka Jalan dan Garis Kejut/Parkir	196.150.000,00	194.950.000,00	1.200.000,00
Beban Jasa Service	1.186.585.484,00	1.132.460.375,00	54.125.109,00
Jumlah	16.657.338.777,00	10.560.639.314,00	6.096.699.463,00

Perbedaan sebesar Rp6.069.699.463,00 sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp748.518.091,00. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada penambahan reklasifikasi dari Beban Jasa BOS sebesar Rp653.281.500,00, dan penambahan reklasifikasi dari beban JKN sebesar Rp46.441.591,00, pada Dinas Kesehatan serta ada reklasifikasi penambahan dari Belanja Modal BOS sebesar Rp48.795.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Perbedaan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.511.141.379,00. Pada Dinas Pendidikan ada penambahan reklasifikasi dari Beban Jasa BOS sebesar Rp6.359.351.924,00, pada Dinas Kesehatan ada

- penambahan reklasifikasi dari Beban Jasa JKN sebesar Rp160.313.455,00, pada Dinas Pendidikan ada penambahan reklasifikasi dari Belanja Pegawai BOS sebesar Rp1.820.000,00. Pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil ada pengurangan reklasifikasi ke Aset Gedung sebesar Rp2.010.344.000,00;
- 3) Perbedaan Beban Pemeliharaan Jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.000.000,00 penambahan reklasifikasi Beban Jasa BOS pada Dinas Pendidikan;
 - 4) Perbedaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp779.714.884,00. Pada Dinas Pendidikan ada penambahan reklasifikasi dari Beban Jasa BOS sebesar Rp760.252.487,00 dan pada Dinas Kesehatan ada penambahan reklasifikasi dari Beban Jasa JKN sebesar Rp12.702.397,00; Pada Dinas Pendidikan ada penambahan reklasifikasi dari Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.760.000,00; pada Dinas Pendidikan.
 - 5) Perbedaan Beban Pembuatan Marka Jalan dan Garis Kejut/Parkir sebesar Rp1.200.000,00 penambahan reklasifikasi Beban Jasa JKN Dinas Kesehatan.
 - 6) Perbedaan Beban Pemeliharaan Jasa Service sebesar Rp54.125.109,00 penambahan reklasifikasi Beban Jasa JKN Dinas Kesehatan.

Rincian beban pemeliharaan per masing-masing OPD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 174 Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2018

No	SKPD	Beban Pemeliharaan – LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.852.480.911,00
2	Dinas Kesehatan	338.278.588,00
3	RSUD dr. H. M. Rabain	2.709.008.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.171.274.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	289.409.500,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	658.433.230,00
7	Dinas Perhubungan	312.121.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	164.308.283,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.565.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29.750.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.860.000,00
12	Dinas Sosial	24.500.000,00
13	Dinas Ketenagakerjaan	7.682.500,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	190.901.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.516.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	150.360.000,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.625.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	73.535.000,00
19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	45.986.614,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.167.500,00
21	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00

No	SKPD	Beban Pemeliharaan – LO (Rp)
22	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0,00
23	Sekretariat Daerah	383.531.300,00
24	Sekretariat DPRD	122.526.000,00
25	Inspektorat Daerah Kabupaten	152.950.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	193.896.113,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79.790.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	441.968.990,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	0,00
29	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	177.298.253,00
30	Kecamatan Semende Darat Ulu	16.740.000,00
31	Kecamatan Semende Darat Tengah	165.975.000,00
32	Kecamatan Semende Darat Laut	2.000.000,00
33	Kecamatan Tanjung Agung	6.000.000,00
34	Kecamatan Lawang Kidul	20.270.000,00
35	Kecamatan Muara Enim	40.775.000,00
36	Kecamatan Ujan Mas	7.975.000,00
37	Kecamatan Benakat	5.000.000,00
38	Kecamatan Gunung Megang	2.400.000,00
39	Kecamatan Rambang Dangku	15.915.000,00
40	Kecamatan Lubai	12.600.000,00
41	Kecamatan Rambang	19.205.000,00
42	Kecamatan Lembak	21.535.000,00
43	Kecamatan Kelekar	500.000,00
44	Kecamatan Gelumbang	71.197.000,00
45	Kecamatan Sungai Rotan	12.750.000,00
46	Kecamatan Muara Belida	12.100.000,00
47	Kecamatan Belimbing	11.245.000,00
48	Kecamatan Belida Darat	10.215.000,00
49	Kecamatan Lubai Ulu	21.625.000,00
50	Dinas Ketahanan Pangan	11.744.000,00
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47.971.595,00
52	Dinas Komunikasi Dan Informatika	67.615.000,00
53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.200.000,00
54	Dinas Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Peternakan	65.385.000,00
55	Dinas Perkebunan	93.704.150,00
56	Dinas Perikanan	46.274.250,00
57	Dinas Perdagangan	109.700.000,00
	Jumlah	16.657.338.777,00

Rekapitulasi perhitungan Beban Pemeliharaan per OPD disajikan dalam **Lampiran 15.c**

e. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp142.850.693.454,85 dan Rp94.583.856.903,36 ada perbedaan antara Beban LO dan Belanja LRA Perjalanan Dinas sebesar Rp5.311.458.574,00.

Tabel 175 Realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO

Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.715.386.837,00	33.267.390.237,00	4.447.996.600,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.476.005.966,85	103.612.543.992,85	863.461.974,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	659.300.651,00	659.300.651,00	0,00
Jumlah	142.850.693.454,85	137.539.234.880,85	5.311.458.574,00

Perbedaan Beban Perjalanan Dinas - LO dengan Belanja Perjalanan Dinas - LRA sebesar Rp5.311.458.574,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada sub akun Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah - LO terdapat perbedaan sebesar Rp4.447.996.600,00 merupakan penambahan dari reklasifikasi dari Beban Jasa Barang Dana BOS - LO dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.393.174.746,00 dan penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah - LO dari Dinas Kesehatan sebesar Rp1.056.826.854,00, dan adanya reklas penambahan dari aset BOS sebesar Rp1.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pada sub akun Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah - LO terdapat perbedaan sebesar Rp863.641.974,00,00 merupakan adanya reklasifikasi penambahan dari Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp240.885.000,00, dan reklasifikasi penambahan dari Beban Jasa Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah - LO dari Dinas Kesehatan sebesar Rp624.626.974,00 dan adanya pengurangan setor pengembalian ke Kas Daerah sebesar 2.050.000,00 terdapat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Rincian Beban Perjalanan dinas per masing-masing OPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 176 Realisasi Beban Perjalanan Dinas–LO Tahun 2018 Per OPD

No	SKPD	Beban Perjalanan Dinas –LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.967.935.186,00
2	Dinas Kesehatan	11.202.713.526,00
3	RSUD dr. H. M. Rabain	276.179.670,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.678.269.759,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	788.595.870,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.120.296.699,00
7	Dinas Perhubungan	928.384.230,00

No	SKPD	Beban Perjalanan Dinas –LO (Rp)
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.918.554.528,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.877.837.140,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	571.332.685,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	690.825.767,00
12	Dinas Sosial	1.613.367.025,00
13	Dinas Ketenagakerjaan	1.366.081.212,0
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	2.000.470.045,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.462.706.007,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.444.208.043,85
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.860.383.359,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	1.229.319.198,00
19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.075.488.996,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	898.967.517,00
21	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
22	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0,00
23	Sekretariat Daerah	12.753.909.164,00
24	Sekretariat DPRD	58.126.344.955,00
25	Inspektorat Daerah Kabupaten	4.396.520.041,00
26	Badan Pendapatan Daerah	2.528.774.895,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.609.829.580,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	3.030.461.132,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	0,00
29	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.249.360.008,00
30	Kecamatan Semende Darat Ulu	219.121.387,00
31	Kecamatan Semende Darat Tengah	166.273.171,00
32	Kecamatan Semende Darat Laut	138.810.500,00
33	Kecamatan Tanjung Agung	336.150.601,00
34	Kecamatan Lawang Kidul	463.322.119,00
35	Kecamatan Muara Enim	263.339.519,00
36	Kecamatan Ujan Mas	162.811.647,00
37	Kecamatan Benakat	144.751.729,00
38	Kecamatan Gunung Megang	170.908.750,00
39	Kecamatan Rambang Dangku	215.636.349,00
40	Kecamatan Lubai	120.684.835,00
41	Kecamatan Rambang	181.423.600,00
42	Kecamatan Lembak	166.140.050,00
43	Kecamatan Kelekar	122.687.000,00
44	Kecamatan Gelumbang	146.597.500,00
45	Kecamatan Sungai Rotan	173.312.000,00

No	SKPD	Beban Perjalanan Dinas –LO (Rp)
46	Kecamatan Muara Belida	196.954.033,00
47	Kecamatan Belimbing	101.557.615,00
48	Kecamatan Belida Darat	153.691.100,00
49	Kecamatan Lubai Ulu	133.338.700,00
50	Dinas Ketahanan Pangan	1.633.603.370,00
51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.328.436.664,00
52	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.296.968.726,00
53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	783.606.169,00
54	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	1.255.112.000,00
55	Dinas Perkebunan	1.546.172.246,00
56	Dinas Perikanan	828.910.989,00
57	Dinas Perdagangan	1.735.304.848,00
Jumlah		142.850.693.454,85

f. Beban Bunga

Jumlah Beban Bunga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp7.271.976.314,64 dan Rp6.496.789.171,60. Beban Bunga-LO jika dibandingkan dengan Belanja Bunga-LRA sebesar Rp6.800.000.000,00 terdapat perbedaan sebesar Rp471.976.314,64. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Utang Bunga Tahun 2017 sebesar Rp1.103.451.680,69;
- 2) Kurang bayar atas bunga pinjaman jatuh tempo 1 Mei 2018 s.d. 1 November 2018 sebesar Rp471.976.314,64;
- 3) Beban Bunga Tahun 2018 yang belum dibayar sebesar Rp1.575.427.995,33.

Untuk penjelasan Beban Bunga dapat dilihat pada penjelasan Belanja Bunga.

g. Beban Subsidi

Jumlah Beban Subsidi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp4.816.417.265,00 dan Rp2.742.602.740,00. Tidak terdapat perbedaan nilai antara Beban Subsidi-LO dengan Belanja Subsidi-LRA. Untuk penjelasan Beban Subsidi dapat dilihat pada penjelasan Belanja Subsidi.

h. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp200.509.946.069,31 dan Rp54.018.227.182,00. Beban Hibah - LO jika dibandingkan dengan Belanja Hibah - LRA terdapat perbedaan sebesar Rp114.247.912.262,31. Perbedaan tersebut terdiri dari :

- (1) Beban Hibah atas Aset Tanah yang serahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senilai Rp354.066.255,00;
- (2) Beban Hibah senilai Rp30.162.678.179,00 yaitu atas Aset Gedung Dan Bangunan yang diserahkan ke Desa (Pasar Desa) dengan nilai perolehan senilai Rp35.757.116.100,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan senilai

Rp6.024.665.421,00. Aset tanah senilai Rp372.000.000,00 dan Aset Lain-Lain sebesar Rp58.227.500,00;

- (3) Beban Hibah sebesar Rp42.859.020.502,50 atas aset yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Aset Tanah sebesar Rp334.000.000,00 dan Aset Gedung sebesar Rp45.360.021.869,50 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.835.001.367,00;
- (4) Beban Hibah sebesar Rp12.900.271.336,00 atas aset yang diserahkan kepada Kementerian Kesehatan RI yaitu Aset Tanah sebesar Rp7.160.700.000,00 yaitu aset tanah Dinas Kesehatan sebesar Rp6.099.000.000,00 dan Aset Tanah BPKAD-SKPKD sebesar Rp1.061.700.000,00, Aset Peralatan Dan Mesin dengan nilai perolehan Rp2.685.744.400,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.225.892.727,00 dan Aset Gedung dengan nilai perolehan Rp11.702.510.000,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp6.422.790.337,00 yaitu Aset Gedung Dinas Kesehatan sebesar Rp5.004.740.000,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp3.272.292.012,00, Aset Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.070.022.000,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp129.294.325,00 dan Aset Gedung BPKAD-SKPKD sebesar Rp5.627.748.000,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp3.021.204.000,00.
- (5) Beban hibah dari reklasifikasi beban persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga senilai Rp27.971.875.989,81

i. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang digunakan untuk mencatat beban cadangan yang harus dibentuk berdasarkan persentase tertentu data akun piutang terkait ketertagihan piutang. Jumlah Beban Penyisihan Piutang tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp3.240.910.150,02 dan Rp3.413.375.393,06. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 5.t** sampai dengan **Lampiran 5.v**.

j. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan digunakan untuk mencatat Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban tahun berjalan. Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat tanpa nilai residu dengan pendekatan bulanan.

Jumlah beban penyusutan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp316.561.053.126,86 dan Rp300.280.835.932,06. Rincian Beban Penyusutan per OPD tersaji dalam **Lampiran 9.o**

k. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat amortisasi Aset Tak Berwujud berupa software computer, lisensi, *franchise*, hak cipta/paten, hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban tahun berjalan.

Jumlah Beban Amortisasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan

2017 sebesar Rp1.796.921.623,68 dan Rp2.902.841.178,67. Rincian Beban Amortisasi per OPD tersaji dalam **Lampiran 10.b**.

l. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban tersebut di atas.

Jumlah Beban Lain-Lain tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp25.908.026.848,96 dan Rp30.785.987.428,33. Beban lain-lain tahun 2018 terdiri dari:

- 1) Beban Lain-lain dari Belanja Barang Non Kapitalisasi sebesar Rp568.266.800,00;
- 2) Reklasifikasi penambahan dari Aset Tetap sebesar Rp8.772.584.992,00
- 3) Reklasifikasi penambahan dari Aset Hibah sebesar Rp32.633.725,00;
- 4) Reklasifikasi penambahan dari Belanja Jasa BOS sebesar Rp1.429.229.991,00;
- 5) Reklasifikasi penambahan dari Belanja Jasa JKN sebesar Rp377.295.316,00;
- 6) Porsi rugi dari Penyertaan Modal sebesar Rp14.728.016.024,96.

m. Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Tak Terduga-LO jika dibandingkan dengan Belanja Tak Terduga-LRA terdapat perbedaan sebesar Rp1.443.658.000,00 yaitu nilai Belanja Tak Terduga yang direklasifikasi ke Aset Tetap yang dicatat sebagai penambahan inventaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

n. Beban Transfer

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp201.306.253.820,13 dan Rp160.906.095.342,00.

Rincian Belanja Transfer-LRA dengan yang tersaji pada Beban Transfer-LO dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 177 Rincian Belanja Tranfer - LRA Disajikan pada Beban Transfer - LO

Pendapatan Tranfer	LO (Rp)	LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	208.161.174.000,00	(208.161.174.000,00)
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	189.234.729.451,13	189.234.729.451,13	0,00
Bantuan kepada Partai Politik	1.516.848.228,00	1.516.848.228,00	0,00
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	9.538.208.308,00	9.538.208.308,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	1.016.467.833,00	1.016.467.833,00	0,00
Jumlah	201.306.253.820,13	409.467.427.820,13	(208.161.174.000,00)

Perbedaan sebesar Rp208.161.174.000,00 antara Beban Transfer-LO dan Belanja Transfer-LRA disebabkan penerimaan Dana Desa dari APBN tidak dicatat sebagai pendapatan LO melainkan dicatat sebagai Utang selanjutnya pada saat realisasi pencairan Dana Desa kepada masing-masing desa penerima dicatat sebagai transaksi pelunasan Utang. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.

7.4.4.3 SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 memperoleh Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp275.581.830.818,48 dan Rp418.183.998.731,89.

7.4.4.4 SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional yaitu sebesar Rp5.891.001.742,81 dan Rp124.982.256.161,11.

Defisit Non Operasional sebesar Rp5.891.001.742,81 terdiri dari :

- a) Sebesar Rp1.709.669.438,00 merupakan defisit atas penjualan aset yang dilelang;
- b) Sebesar Rp930.114.450,00 merupakan defisit dari penghapusan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain yang dilelang;
- c) Defisit atas berkurangnya Aset Lain-Lain berupa sapi yang mati di Desa Kayu Ara senilai Rp95.977.500,00.
- d) Defisit atas berkurangnya nilai Aset Tetap atas kekurangan volume pekerjaan hasil pemeriksaan BPK RI yaitu aset gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp151.010.957,41 dan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.004.229.397,40.

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional tersaji pada **Lampiran 9.p**

7.4.4.5 SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus / (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp269.690.829.075,67 dan Rp293.201.742.570,78.

7.4.4.6 POS LUAR BIASA - LO

Jumlah Pos Luar Biasa - LO tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.4.4.7 SURPLUS / DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus / (Defisit) Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Muara Enim per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp269.690.829.075,67 dan Rp293.201.742.570,78.

7.4.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- 1) Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari penerimaan:
 - a) Pendapatan Pajak Daerah;
 - b) Pendapatan Retribusi Daerah;
 - c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - e) Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - f) Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - g) Pendapatan Dana Alokasi Umum;
 - h) Pendapatan Dana Alokasi Khusus;
 - i) Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
 - j) Bantuan Keuangan dari Provinsi;
 - k) Dana Tunjangan Profesi Guru.
- 2) Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari pengeluaran:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Bunga;
 - d) Belanja Subsidi;
 - e) Belanja Hibah;
 - f) Belanja Bantuan Sosial;
 - g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Parpol;
 - h) Belanja Tak Terduga;
 - i) Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa;
 - j) Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya – Partai Politik.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan aset tetap dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan arus keluar kas diperoleh dari pembelian aset tetap.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, Taperum dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Rincian Arus Kas Bersih dari masing-masing Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2018 dan 2017 dirinci sebagai berikut:

Tabel 178 Rincian Arus Kas bersih

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	646.922.239.212,87	680.341.249.549,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(555.698.719.214,46)	(578.134.075.503,08)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(66.860.741.935,48)	(2.904.549.786,92)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(1.100,00)

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp646.922.239.212,87 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Rincian arus kas dari aktivitas operasi tahun 2018 dan 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 179 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	69.037.972.075,62	62.718.458.634,80
Retribusi Daerah	24.515.827.175,08	10.501.028.759,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.160.828.134,66	8.390.341.277,82
Lain-lain PAD yang sah	120.823.966.749,09	143.493.181.822,19
Dana Bagi Hasil Pajak	470.035.153.625,00	427.807.488.786,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	425.449.223.197,00	405.687.098.246,00
Dana Alokasi Umum	661.337.068.000,00	661.337.068.000,00
Dana Alokasi Khusus	86.386.776.075,00	125.874.702.200,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	149.301.918.961,00	128.503.278.093,00
Bagi Hasil Pajak Daerah	121.397.360.626,12	101.576.244.368,82
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	17.277.340.299,00	18.348.880.116,96
Hibah	106.587.016.535,00	104.066.419.202,00
Lainnya	255.343.068.148,73	202.219.848.229,94
Jumlah Arus Kas Masuk	2.524.653.519.601,30	2.400.524.037.736,53
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	739.817.484.303,45	719.354.367.608,00
Belanja Barang & Jasa	629.124.259.192,85	580.568.643.314,90
Belanja Bunga	6.800.000.000,00	6.450.000.000,00
Belanja Subsidi	4.816.417.265,00	2.742.602.740,00
Belanja Hibah	86.262.033.807,00	54.018.227.182,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	1.443.658.000,00	3.603.298.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (DD APBN)	208.161.174.000,00	192.539.554.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD APBD)	199.789.405.592,13	159.848.341.614,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- Partai Politik	1.516.848.228,00	1.057.753.728,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.877.731.280.388,43	1.720.182.788.186,90
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	646.922.239.212,87	680.341.249.549,63

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.524.653.519.601,30 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran yang diterima melalui Kas Daerah. Apabila dikomparasikan pendapatan yang tersaji pada Laporan Realisasi Anggaran dengan arus kas masuk dari aktivitas operasi akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 180 Komparasi Pendapatan yang Tersaji Pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	LRA (Rp)	LAK (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Daerah	69.037.972.075,62	69.037.972.075,62	0,00
Retribusi Daerah	24.515.827.175,08	24.515.827.175,08	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	17.160.828.134,66	17.160.828.134,66	0,00

Uraian	LRA (Rp)	LAK (Rp)	Selisih (Rp)
yang Dipisahkan			
Lain-lain PAD yang Sah	120.823.966.749,09	120.823.966.749,09	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak	470.035.153.625,00	470.035.153.625,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	425.449.223.197,00	425.449.223.197,00	0,00
Dana Alokasi Umum	661.337.068.000,00	661.337.068.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	86.386.776.075,00	86.386.776.075,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	149.301.918.961,00	149.301.918.961,00	0,00
Bagi Hasil Pajak Daerah	121.397.360.626,12	121.397.360.626,12	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemprov.	17.277.340.299,00	17.277.340.299,00	0,00
Hibah	106.587.016.535,00	106.587.016.535,00	0,00
Lainnya	255.343.068.148,73	255.343.068.148,73	0,00
Total	2.524.653.519.601,30	2.524.653.519.601,30	0,00

Tidak terdapat selisih antara yang tersaji pada LRA dengan LAK.

Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.877.731.280.388,43 merupakan Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran yang dikeluarkan dari Kas Daerah. Apabila dikomparasikan Belanja yang tersaji pada Laporan Realisasi Anggaran dengan arus kas Keluar dari aktivitas operasi akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 181 Komparasi Belanja yang Tersaji pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	LRA (Rp)	LAK (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Pegawai	739.817.484.303,45	739.817.484.303,45	0,00
Belanja Barang & Jasa	629.124.259.192,85	629.124.259.192,85	0,00
Belanja Bunga	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00
Belanja Subsidi	4.816.417.265,00	4.816.417.265,00	0,00
Belanja Hibah	86.262.033.807,00	86.262.033.807,00	0,00
Belanja Tak Terduga	1.443.658.000,00	1.443.658.000,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (DD APBN)	208.161.174.000,00	208.161.174.000,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD APBD)	199.789.405.592,13	199.789.405.592,13	0,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- Partai Politik	1.516.848.228,00	1.516.848.228,00	0,00
Total	1.877.731.280.388,43	1.877.731.280.388,43	0,00

Tidak terdapat selisih antara yang tersaji pada LRA dengan LAK.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2018 defisit sebesar (Rp555.698.719.214,46). Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung

pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Rincian arus kas dari aktivitas investasi tahun 2018 dan 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 182 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	930.114.450,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	930.114.450,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	31.880.500.000,00
Belanja Tanah	5.999.991.824,00	1.377.900.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	66.879.546.826,35	89.535.843.613,15
Belanja Gedung dan Bangunan	128.871.946.324,18	150.008.159.352,93
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	333.549.719.655,93	253.523.409.300,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	21.327.629.034,00	35.901.263.237,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	15.907.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	556.628.833.664,46	578.134.075.503,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(555.698.719.214,46)	(578.134.075.503,08)

Arus masuk kas dari aktivitas investasi sebesar Rp930.114.450,46 merupakan hasil Penjualan atas Peralatan dan Mesin. Apabila dikomparasikan yang tersaji pada LRA dengan LAK akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 183 Komparasi Nilai Penjualan atas Peralatan dan Mesin yang Tersaji pada LRA dengan LAK

Uraian	LRA (Rp)	LAK (Rp)	Selisih (Rp)
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	930.114.450,00	930.114.450,00	0,00
Total	930.114.450,00	.930.114.450,00	0,00

Tidak terdapat selisih nilai penjualan atas peralatan dan mesin antara LRA dan LAK.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp556.628.833.664,46 merupakan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran dan penyertaan modal yang dikeluarkan melalui kas daerah (pengeluaran pembiayaan) pada LRA. Apabila dikomparasikan yang tersaji pada LRA dengan LAK akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 184 Komparasi Nilai Belanja Modal dan Penyertaan Modal yang Tersaji pada LRA dengan LAK

Uraian	LRA (Rp)	LAK (Rp)	Selisih (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tanah	5.999.991.824,00	5.999.991.824,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	66.879.546.826,35	66.879.546.826,35	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	128.871.946.324,18	128.871.946.324,18	0,00
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	333.549.719.655,93	333.549.719.655,93	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	21.327.629.034,00	21.327.629.034,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Total	556.628.833.664,46	556.628.833.664,46	0,00

Tidak terdapat selisih nilai Belanja Modal dan Penyertaan Modal antara LRA dan LAK.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan per 31 Desember 2018 sebesar (Rp66.860.741.935,48)

Tabel 185 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	70.000.000.000,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	70.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Utang Kepada Pihak ketiga	3.139.258.064,52	2.904.549.786,92
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	3.139.258.064,52	2.904.549.786,92
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	66.860.741.935,48	(2.904.549.786,92)

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang tersaji pada LAK sebesar Rp70.000.000.000,00 dan tidak terdapat perbedaan dengan nilai yang tersaji di LRA.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang tersaji pada LAK sebesar Rp3.139.258.064,52 dan tidak terdapat perbedaan dengan nilai yang tersaji di LRA.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tabel 186 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	32.724.269.946,00	33.472.872.793,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017	0,00	423.900,00
Penerimaan Kembali Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	32.724.269.946,00	33.473.296.693,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	32.724.269.946,00	33.473.297.793,00
Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	32.724.269.946,00	33.473.297.793,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	0,00	(1.100,00)

e. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp283.257.160.695,47 dan Rp125.183.210.931,85 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 187 Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	646.922.239.212,87	680.341.249.559,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(555.698.719.214,46)	(578.134.075.503,08)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	66.860.741.935,48	(2.904.549.786,92)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(1.100,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas selama TA Berjalan	158.084.261.933,89	99.302.623.169,63
Saldo Awal Kas (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran)	125.172.898.761,58	25.880.587.762,22
Saldo Akhir Kas (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran)	283.257.160.695,47	125.172.898.761,58
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	9.405.380,00	10.312.170,27
Saldo Akhir Kas	283.266.566.075,47	125.183.210.931,85
Saldo Akhir Kas (BUD) ini terdiri dari:		
RKUD SSBB 147-30-00001	245.372.471.103,96	90.266.485.915,31
Setara Kas BRI 0128-01-000131-30-8	6.424.735.078,00	3.577.462.054,00
Setara Kas BTN 00000601-01-30-000011-4	6.175.786,14	6.237.285,78
Setara Kas BNI 229694352	3.671.595,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.291.602,00	19.104.214,00
Kas di Bendahara Penerimaan	9.405.380,00	10.312.170,27
Kas di BLUD	23.613.649.690,37	20.838.116.520,49
Kas di Rekening JKN	5.262.669.917,00	7.009.169.519,00
Kas di Bendahara Dana BOS	2.569.495.923,00	3.456.323.253,00
TOTAL	283.266.566.075,47	125.183.210.931,85
SELISIH	0,00	0,00

7.4.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Muara Enim per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp4.959.710.804.960,40 dan Rp4.698.139.930.315,98. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 188 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	4.698.139.930.315,98	4.262.648.137.936,39
2	SURPLUS DEFISIT-LO	269.690.829.075,67	293.201.742.570,78
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(8.119.954.431,25)	142.290.049.808,81
a	Koreksi nilai Akun Kas di Dana BOS		(1.890.627.686,00)
b	Koreksi Nilai Piutang	5.439.449,99	16.198.000,00
c	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	0,00	708.000,00
d	Koreksi Nilai Persediaan	(1.036.335.189,05)	0,00
e	Koreksi Nilai Beban dibayar Dimuka	0,00	0,00
f	Koreksi Nilai Investasi Non Permanen- Dana Bergulir	0,00	0,00
g	Koreksi Nilai Investasi Permanen	0,00	279,12
h	Koreksi Nilai Aset Tetap	3.020.075.000,00	150.000.000,00
i	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	40.227.661,11	142.584.380.604,46
j	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetao	0,00	622.991.278,00
k	Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	1.313.347.132,00
l	Koreksi Nilai Dana Cadangan	(10.190.225.826,55)	0,00
m	Koreksi Nilai Aset Lainnya	(113.323.613,00)	(298.140.205,00)
n	Koreksi Nilai Utang Belanja	154.188.086,25	(208.807.593,77)
o	Koreksi Nilai Utang Bunga	0,00	0,00
p	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
q	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
r	Koreksi Lain-lain	0,00	0,00
4	EKUITAS AKHIR	4.959.710.804.960,40	4.698.139.930.315,98

Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp4.959.710.804.960,40. Adapun pengaruh kumulatif perubahan kebijakan atas penerapan basis akuntansi akrual dan kesalahan mendasar atas transaksi dengan rincian sebagai berikut.

- a. Koreksi nilai Piutang sebesar Rp5.439.449,99 merupakan koreksi dari:
 - 1) Penambahan Piutang BPHTB sebesar Rp1.021.950,00 yang belum tercatat pada Tahun 2017 dan koreksi pengurangan Piutang BPHTB tahun 2017 sebesar Rp1.142.500,00;
 - 2) Pengurangan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2017 sebesar Rp440.000,00;
 - 3) Penambahan Piutang Jasa Layanan RSUD dr. Mohamad Rabain yang belum dicatat pada Tahun 2017 sebesar Rp6.000.000,00;
 - 4) Pengurangan Piutang DBH Pajak Provinsi Tahun 2015 sebesar Rp0,01.
- b. Koreksi nilai Persediaan sebesar (Rp1.036.335.189,05) merupakan koreksi dari:

- 1) Koreksi nilai Persediaan sebesar Rp25.445.922,00 merupakan koreksi nilai saldo awal Persediaan Beras pada Dinas Ketahanan Pangan yang disesuaikan dengan harga perolehan terakhir, semula sebesar Rp476.339.128,00 menjadi Rp501.785.050,00;
 - 2) Koreksi saldo awal Persediaan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp1.075.621.111,05) karena berita acara serah terima barang Tahun 2017;
 - 3) Koreksi saldo awal Persediaan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Sosial sebesar Rp13.840.000,00, karena masih ada sisa persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (sembako) yang belum tercatat pada akhir Tahun 2017.
- c. Koreksi nilai Aset Tetap sebesar Rp3.020.075.000,00 merupakan penambahan nilai Aset Tetap Alat Angkutan yang sebelumnya belum tercatat pada inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp83.232.000,00 dan penambahan nilai Aset Tetap Gedung Dan Bangunan yang belum tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.936.843.000,00
 - d. Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp40.227.661,11 merupakan koreksi saldo awal penyusutan *audited* karena terdapat perbedaan dengan saldo awal penyusutan pada aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah yaitu koreksi Penyusutan saldo awal Penyusutan Aset Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai (Rp0,51), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai (Rp0,23) Sekretariat Daerah senilai (Rp27.999.608,00), koreksi Penyusutan Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.927.095,97 dan sebesar Rp64.300.173,49 pada Penyusutan Aset Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta senilai Rp0,39 koreksi Penyusutan Aset Gedung pada Dinas Kesehatan;
 - e. Koreksi nilai Aset Lainnya sebesar (Rp113.323.613,00) merupakan pengurangan atas Tagihan Penjualan Angsuran tahun 2017 sebesar (Rp1.551.540.366,00) dan penambahan Tagihan Penjualan Angsuran tahun 2018 sebesar Rp1.438.216.753,00.
 - f. Koreksi nilai Dana Cadangan sebesar (Rp10.190.225.826,55) merupakan koreksi atas Bunga Deposito Dana Cadangan tahun 2014 sd 2017.
 - g. Koreksi kurang nilai Utang Belanja sebesar Rp154.188.086,25 yaitu koreksi Utang Belanja sebesar Rp208.807.595,77 merupakan koreksi nilai Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas pekerjaan peningkatan jalan Hidup Baru-Baung Selatan berdasarkan hasil pemeriksaan Inpektorat Kabupaten Muara Enim dan koreksi Utang Belanja Jaminan Sosial Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp54.619.509,52).

7.4.7 PENJELASAN ATAS DANA-DANA NON APBD KABUPATEN MUARA ENIM

Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan otonomi daerah, selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kabupaten Muara Enim juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Aloaksi dana APBN Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, dan Kewenangan Pusat yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan dan kesehatan lingkungan masyarakat, dan infrastruktur pemukiman.

a. Tugas Pembantuan yang diterima

1) Dasar Hukum

Dasar hukum terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3) Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui APBN Tugas Pembantuan (TP), Urusan Bersama (UB), dan Kewenangan Pusat (KP) di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018 dapat dijalankan dengan baik. Alokasi dana Tugas Pembantuan kepada Kabupaten Muara Enim telah mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dan mengurangi beban APBD dalam melaksanakan pendanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim, khususnya di bidang sanitasi dan air minum.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapatkan alokasi APBN Kantor Pusat (KP) melalui Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Muara Enim. Jumlah alokasi anggaran yang diterima pada tahun 2018 sebesar Rp3.185.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp3.185.000.000,- atau 100 persen.

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerima alokasi dana APBN untuk pelaksanaan program kegiatan Kantor Pusat (KP). Pada tahun 2018, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim.

Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh alokasi APBN untuk Kantor Pusat (KP) melalui Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Muara Enim dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.185.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.185.000.000,- atau 100 persen.

Alokasi dana APBN TP/UB/KP yang dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk melaksanakan Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).

Tabel 189 Target dan Realisasi Dana APBN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Tahun	No. DIPA	Kinerja Keuangan			Jumlah Program
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Kantor Pusat (KP)					
2018	033.05.1.502093	3.185.000.000,00	3.185.000.000,00	100	1
2018		2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	100	1
Jumlah		5.735.000.000,00	5.735.000.000,00	100	2

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Pelaksanaan program PAMSIMAS Kabupaten Muara Enim tahun 2018 dilaksanakan di 4 kecamatan lingkup Kabupaten Muara Enim dan berada di 13 lokasi dengan anggaran sebesar Rp3.185.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.185.000.000,- atau 100 persen.

Tabel 190 Lokasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS Dana APBN Kabupaten Muara Enim Tahun 2018

NO	DESA	TAHUN	KECAMATAN	APBN (RP)
1	Paya Angus	2018	Sungai Rotan	259.000.000,00
2	Sungai Rotan	2018	Sungai Rotan	269.500.000,00
3	Penandingan	2018	Sungai Rotan	297.500.000,00
4	Suka Maju	2018	Sungai Rotan	259.000.000,00
5	Bitis	2018	Gelumbang	262.500.000,00
6	Karang Sari	2018	Lubai Ulu	280.000.000,00
7	Karang Mulia	2018	Lubai Ulu	280.000.000,00
8	Pagar Jati	2018	Tanjung Agung	168.000.000,00
9	Pandan Dulang	2018	Tanjung Agung	168.000.000,00
10	Muara Emil	2018	Tanjung Agung	252.000.000,00
11	Padu Raksa	2018	Tanjung Agung	245.000.000,00
12	Lambur	2018	Tanjung Agung	252.000.000,00
13	Tanjung Baru	2018	Tanjung Agung	192.500.000,00
TOTAL				3.185.000.000,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 191 Lokasi Kegiatan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum Desa Dana APBN Kabupaten Muara Enim Tahun 2018

NO	LOKASI / DESA	KKM	KEGIATAN
1	Desa Paya Angus Kecamatan Sungai Rotan Rp 259.000.000,-	KKM Sehati	Sumur Bor 1 unit Kedalaman 60 M, Menara 1 Unit 11,5 M & Bak (3 x 3 x 2,5) 1 Unit, Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 1.752 M
2	Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan Rp 269.500.000,-	KKM Maju Bersama	Sumur Bor 1 unit Kedalaman 60 M, Menara 1 Unit 11,5 M & Bak (3,5 x 3,5 x 2,5) 1 Unit, Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 1.980 M
3	Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan Rp 297.500.000,-	KKM Usaha Bersama	Sumur Bor 2 unit Kedalaman 60 M, Menara 2 Unit 9 M & Bak (3 x 3 x 2) 2 Unit, Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 1.070 M
4	Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Rotan Rp 259.000.000,-	KKM Mekar Sari	Sumur Bor 1 unit Kedalaman 60 M, Menara 1 Unit 11,5 M & Bak (3 x 3 x 2,5) 1 Unit, Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 1.752 M
5	Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Rp 262.500.000,-	KKM Belida Jaya	Sumur Bor 1 unit Kedalaman 60 M, Menara 1 Unit 11,5 M & Bak (3,4 x 3,4 x 2,5) 1 Unit, Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 1.800 M

NO	LOKASI / DESA	KKM	KEGIATAN
6	Desa Karang Sari Kecamatan Lubai Ulu Rp 280.000.000,-	KKM Sumber Bahagia	Sumur Bor 1 unit Kedalaman 60 M, Menara 1 Unit 12 M & Bak (3,5 x 3,5 x 3) 1 Unit, Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 2.526 M
7	Desa Karang Mulia Kecamatan Lubai Ulu Rp 280.000.000,-	KKM Sehat Mulia	Sumur Bor 1 unit Kedalaman 60 M, Menara 1 Unit 12 M & Bak (3 x 3 x 2,5) 1 Unit, Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 2.790 M
8	Desa Pagar Jati Kecamatan Tanjung Agung Rp 168.000.000,-	KKM Jati Raya	Reservoir 1 Unit (2,5 x 2,5 x 2), Intake 1 Unit (7 x 0,5 x 1), Pemasangan Pipa Distribusi 2.472 M
9	Desa Pandan Dulang Kecamatan Tanjung Agung Rp 168.000.000,-	KKM Bunga Tanjung	Reservoir 1 Unit (3 x 3 x 2,5), Intake 1 Unit (4 x 0,5 x 1), Pemasangan Pipa Distribusi 2.820 M
10	Desa Muara Emil Kecamatan Tanjung Agung Rp 252.000.000,-	KKM Maju Bersama	Menara Air 1 Unit (3,2 x 3,2 x 9,5), Intake 1 Unit (4 x 3 x 4) Pemasangan Pipa Distribusi 2.808 M
11	Desa Padu Raksa Kecamatan Tanjung Agung Rp 245.000.000,-	KKM Hanggung Jaya	Reservoir 1 Unit (3 x 3 x 2,5), Intake 1 Unit (6 x 0,5 x 1) Pemasangan Pipa Distribusi 4.044 M
12	Desa Lambur Kecamatan Tanjung Agung Rp 252.000.000,-	KKM Sehat Sejahtera	Reservoir 1 Unit (3,3 x 3,3 x 3), Pemasangan Pipa Distribusi 3.906M
13	Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Agung Rp 192.500.000,-	KKM Limbun	Reservoir 1 Unit (3 x 3 x 2,5), Intake 1 Unit (7 x 0,3 x 1) Pemasangan Pipa Distribusi 2.892 M

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS-IDB)

Pada Tahun 2018 Kabupaten Muara Enim menerima pendanaan program Sanimas sebanyak 6 lokasi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul, dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.550.000.000,00 atau 100 persen.

Tabel 192 Lokasi Pelaksanaan Program Sanimas-IDB Dana APBN Tahun 2018

NO	DESA / KELURAHAN	TAHUN	KECAMATAN	APBN (RP)
1	Kelurahan Muara Enim RT. 01 RW. 06	2018	Muara Enim	425.000.000,00
2	Kelurahan Muara Enim RT. 01 RW. 07	2018	Muara Enim	425.000.000,00
3	Desa Muara Lawai Dusun 1 RT. 04	2018	Muara Enim	425.000.000,00
4	Kelurahan Tanjung Enim RT. 03 RW. 03	2018	Lawang Kidul	425.000.000,00
5	Desa Tegal Rejo RT. 04 Dusun 02	2018	Lawang Kidul	425.000.000,00
6	Desa Tegal Rejo RT. 09 Dusun 04	2018	Lawang Kidul	425.000.000,00
Total				2.550.000.000,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan kegiatan fisik Program Sanimas pada tahun 2018 dilaksanakan di Kelurahan Muara Enim RT. 01 RW. 06, Kelurahan Muara Enim RT.01 RW. 07, Desa Muara Lawai Dusun 1 RT. 04, Kelurahan Tanjung Enim RT. 03 RW. 03, Desa Tegal Rejo RT. 04 Dusun 2 dan Desa Tegal Rejo RT. 09 Dusun 4 berupa pembangunan IPAL Komunal dan sambungan perpipaan.

Tabel 193 Lokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sanimas-IDB Dana APBN Tahun 2018

No	LOKASI / DANA	KSM	KEGIATAN
1	Kelurahan Muara Enim	KSM TUNAS HARAPAN	Pembangunan IPAL Komunal dan Sambungan Perpipaan
	RT. 01 RW. 06		
	Rp. 425.000.000,00		
2	Desa Muara Lawai	KSM HARAPAN BARU	Pembangunan IPAL Komunal dan Sambungan Perpipaan
	Dusun 1 RT. 04		
	Rp. 425.000.000,00		
3	Kelurahan Tanjung Enim	KSM MABAH	Pembangunan IPAL Komunal dan Sambungan Perpipaan
	RT. 03 RW. 03 /		
	Rp. 425.000.000,00		
4	Desa Tegal Rejo	KSM AMANAH	Pembangunan IPAL Komunal dan Sambungan Perpipaan
	RT. 04 Dusun 02 /		
	Rp. 425.000.000,00		
5	Desa Tegal Rejo	KSM MANDIRI	Pembangunan IPAL Komunal dan Sambungan Perpipaan
	RT. 09 Dusun 04 /		
	Rp. 425.000.000,00		
6	Kelurahan Muara Enim	KSM MAWAR	Pembangunan IPAL Komunal dan Sambungan Perpipaan
	RT. 01 RW. 07 /		
	Rp. 425.000.000,00		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4) Permasalahan dan Solusi

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan (TP)/Urusan Bersama (UB)/Kantor Pusat (KP) dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum sepenuhnya diterima pada awal tahun oleh perangkat daerah pelaksana.

Diharapkan, DIPA APBN yang merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan, dapat diterima oleh perangkat daerah sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dapat dilaksanakan mulai dari awal tahun anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

b. Tugas Pembantuan yang Diberikan

1) Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim.
6. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang Optimalisasi Pembangunan Perdesaan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 966/KPTS/DPMD/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2018.
11. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 707/KPTS/DPMD/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Muara Enim.
12. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 797/KPTS/DPMD/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 963/KPTS/DPMD/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa tahun 2018.

2) Dana Bantuan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sebagai upaya peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa dan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, yang diarahkan untuk membiayai program / kegiatan sebagai berikut :

- a. Menunjang kegiatan administrasi dan operasional Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Membangun Sarana dan Prasarana yang diperlukan oleh Desa dan Kelurahan.
- c. Menunjang penyelenggaraan peningkatan SDM bagi Aparatur Lembaga Desa, BPD dan Masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan PKK termasuk kegiatan anak dan remaja.
- e. Menunjang penyelenggaraan kesejahteraan bagi Aparat Desa dan BPD.
- f. Menunjang peningkatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

- g. Menunjang penyelenggaraan usaha ekonomi produktif Desa dan Kelurahan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 966/KPTS/DPMD/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2018, Alokasi Dana Desa diarahkan untuk membiayai program / kegiatan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Tunjangan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. Honor anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- e. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

3) Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim telah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp150.788.107.023,70 dengan realisasi sebesar Rp150.788.107.023,70 atau 100 persen. Alokasi Dana Desa tersebut telah disalurkan kepada 245 Desa dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan operasional desa dan pemberdayaan masyarakat, yang dianggarkan melalui Belanja Bantuan kepada Desa pada Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Muara Enim dengan penanggung jawab teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Alokasi Dana Desa tersebut telah disalurkan untuk kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim.

**Tabel 194 Target dan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD)
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	150.788.107.023,70	150.788.107.023,70	100

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Muara Enim

c. Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1) Dasar Hukum

Berita Acara Kesepakatan Rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selaku Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dengan Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim selaku Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta Tingkat Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Februari 2018.

2) Jumlah Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2018, dana bantuan keuangan Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp17.277.340.299,00 yang dialokasikan untuk pembayaran piutang program Jamsoskes Sumsel Semesta.

7.5 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.5.1 CATATAN PENTING LAINNYA

Pengakuan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada TA 2018 Pemerintah Kabupaten Muara telah merealisasikan SP2D untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Dana Desa) sebesar Rp208.161.174.000,00 dan Realisasi SP2D untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (ADD) sebesar Rp189.223.801.936,23. Sedangkan realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2018 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Pendapatan sebesar Rp410.342.924.227,11;
- 2) Belanja Desa sebesar Rp402.859.039.431,82;
- 3) Pembiayaan Netto sebesar Rp1.078.592.792,54; dan
- 4) Sisa Dana sebesar Rp8.562.477.592,83.

7.5.2 INFORMASI TAMBAHAN

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400) tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, efektif sejak tanggal 11 Januari 2013 Wilayah Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab dan Kecamatan Tanah Abang menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang membawahi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab dan Kecamatan Tanah Abang.

Pusat Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkedudukan di Kecamatan Talang Ubi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400) tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, sejak tanggal 11 Januari 2013, Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab dan Kecamatan Tanah Abang dalam wilayah Kabupaten Muara Enim dihapus.

Dengan terbentuknya Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2013 maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim berkurang enam OPD yang masuk wilayah PALI yaitu OPD Kecamatan Talang Ubi, OPD Kecamatan Penukal, OPD Kecamatan Penukal Utara, OPD Kecamatan Abab, OPD Kecamatan Tanah Abang dan OPD RSUD Talang Ubi.

a. Pengungkapan Penting Lainnya

Kabupaten Muara Enim, yang terkenal dengan sebutan Daerah Serasan Sekundang (yang berarti “bersama-sama dan setuju”), merupakan wilayah strategis di Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis terletak pada posisi antara 4° - 6° Lintang Selatan dan 104° - 106° Bujur Timur.

Ibukota Kabupaten Muara Enim berkedudukan di Muara Enim yang berjarak 180 km dari Kota Palembang, Ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 7.300,50 km² dan mempunyai batas-batas sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Ilirdan Kota Prabumulih; dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam.

Secara administrasi, Kabupaten Muara Enim terdiri atas 20 kecamatan (Tahun 2012 sebanyak 25 kecamatan) dengan 245 desa (Tahun 2012 sebanyak 341 desa), serta 10 kelurahan (Tahun 2012 sebanyak 16 kelurahan). Rincian kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Semende Darat Laut;
- 2) Kecamatan Semende Darat Tengah;
- 3) Kecamatan Semende Darat Ulu;
- 4) Kecamatan Tanjung Agung;
- 5) Kecamatan Lawang Kidul;
- 6) Kecamatan Muara Enim;
- 7) Kecamatan Ujan Mas;
- 8) Kecamatan Gunung Megang;
- 9) Kecamatan Rambang Dangku;
- 10) Kecamatan Lubai;
- 11) Kecamatan Rambang;
- 12) Kecamatan Gelumbang;
- 13) Kecamatan Sungai Rotan;
- 14) Kecamatan Lembak;
- 15) Kecamatan Benakat;
- 16) Kecamatan Kelekar;
- 17) Kecamatan Muara Belida;
- 18) Kecamatan Belimbing;
- 19) Kecamatan Belida Darat; dan
- 20) Kecamatan Lubai Ulu;

Pada Tahun 2012, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim, telah dibentuk tiga kecamatan baru, yaitu Kecamatan Belimbing, Kecamatan Belida Darat dan Kecamatan Lubai Ulu.

Kecamatan Belimbing semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gunung Megang yang terdiri atas Desa Tanjung, Desa Cinta Kasih, Desa Teluk Lubuk, Desa Berugo, Desa Belimbing, Desa Bulang, Desa Belimbing Jaya, Desa Darmo Kasih dan Desa Dalam. Kecamatan Belida Darat semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lembak yang terdiri atas Desa Tanjung Bunut, Desa Babat, Desa Lubuk Semantung, Desa Lubuk Getam, Desa Talang Balai, Desa Talang Beliung, Desa Sialingan, Desa Tanjung Tiga, Desa Ibul dan Desa Gaung Asam. Kecamatan Lubai Ulu semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lubai yang terdiri atas Desa Karang Agung, Desa Karang Sari, Desa Karang Mulya, Desa Sumber Mulya, Desa Sumber Asri, Desa Pagar Dewa, Desa Prabumenang, Desa Lecah, Desa Mekar Jaya, Desa Lubai Persada dan Desa Lubai Makmur.

Di wilayah Kabupaten Muara Enim terdapat delapan aliran sungai, yaitu Sungai Lematang, Sungai Enim, Sungai Penukal, Sungai Belido, Sungai Lubai, Sungai Rambang, Sungai Lengie dan Sungai Niru. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Enim adalah 85.000 hektar.

b. Sejarah Singkat Kabupaten Muara Enim

Pada masa pendudukan Hindia Belanda, marga-marga di sepanjang Sungai Enim, mulai dari Marga Semendo Darat sampai ke Marga Tamblang Patang Puluh Bubung, dan marga-marga di sepanjang Sungai Lematang mulai dari Marga Tamblang Ujan Mas sampai dengan Marga Sungai Rotan digabung menjadi satu Wilayah Administratif dengan nama “Onder Afdeling Lematang Ilir” yang tunduk pada Afdeling Palembangische Boven Landen dengan Asisten Residen yang berkedudukan di Lahat.

Asisten Residen tersebut membawahi wilayah Onder Afdeling Lematang Ilir dengan Ibukota Muara Enim, Onder Afdeling Lematang Ulu dengan Ibukota Lahat, Onder Afdeling Tebing Tinggi dengan Ibukota Tebing Tinggi dan Onder Afdeling Pasemah dengan Ibukota Pagaram.

Pada masa pendudukan Jepang, wilayah yang tadinya dikenal dengan Lematang Ilir diubah namanya menjadi Lematang Sijo (Seco), dan dibentuk wilayah administratif baru, yaitu Lematang Ogan Tengah, yang selanjutnya dikenal dengan nama Kawedanan Lematang Ogan Tengah.

Wilayah Kawedanan Lematang Ogan Tengah meliputi Marga Rambang Niru, Marga Empat Petulai Curup, Marga Empat Petulai Dangku, Marga Sungai Rotan (sebelumnya marga-marga tersebut termasuk dalam wilayah Lematang Ilir), Marga Rambang Kapak Tengah, Marga Lubai Suku Satu, Marga Lubai Suku Dua (sebelumnya termasuk dalam wilayah Ogan Ulu), Marga Alai, Marga Lembak, Marga Kartamulya, Marga Gelumbang, Marga Tambangan Kelekar (sebelumnya termasuk dalam wilayah Ogan Ilir), Marga Abab, dan Marga Penukal (sebelumnya termasuk dalam wilayah Sekayu).

Wilayah Administrasi Lematang Ilir meliputi Marga Semendo Darat, Marga Panang Sangang Puluh, Marga Panang Selawi, Marga Panang Ulung Puluh, Marga Lawang Kidul, Marga Tamblang Karang Raja, Marga Tamblang Patang Puluh Bubung, dan Marga Tamblang Ujan Mas.

Pada masa kemerdekaan, sesuai dengan hasil sidang Dewan Karesidenan Palembang pada tanggal 20 November 1946, wilayah Kawedanan Lematang Ilir dan Lematang Ogan Tengah digabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, atau disingkat dengan nama “LIOT”.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 47/Deshuk/1972 tanggal 14 Juni 1972, telah ditetapkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Muara Enim tanggal 20 November 1946.

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 2642/2/B/1980 tanggal 6 Maret 1980, terhitung tanggal 1 April 1980 nama Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT) dikembalikan pada nama semula, yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tersebut di atas sebagai Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tersebut di atas, Muara Enim dibentuk menjadi Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dengan nama Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 Nomor Gb/100/1950. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 121 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) tentang Pemerintahan Daerah, sebutan “Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim” berubah menjadi Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1990 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 1990 tanggal 26 November 1990 telah dibentuk dua Wilayah Kerja Pembantu Bupati, meliputi.

- 1) Wilayah Tanjung Enim dengan pusat kedudukan di Tanjung Enim, mencakup:
 - a) Kecamatan Muara Enim;
 - b) Kecamatan Tanjung Agung;
 - c) Kecamatan Semende; dan
 - d) Kecamatan Gunung Megang.
- 2) Wilayah Gelumbang dengan pusat kedudukan di Gelumbang, mencakup:
 - a) Kecamatan Gelumbang;
 - b) Kecamatan Rambang Lubai;
 - c) Kecamatan Rambang Dangku; dan
 - d) Kecamatan Talang Ubi.

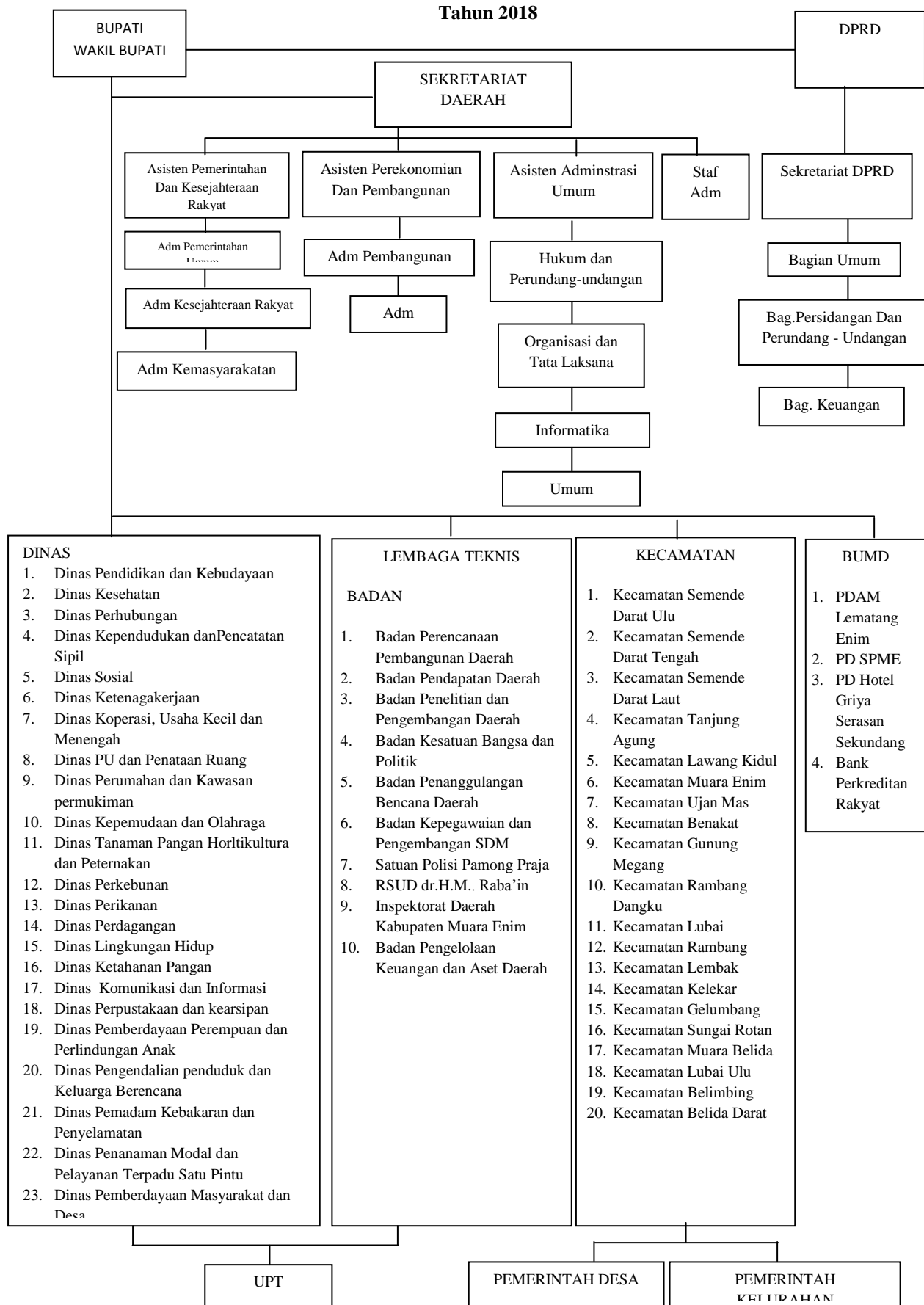
Pada Tahun 1999, berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) tentang Pemerintahan Daerah, Wilayah Kerja/Lembaga Pembantu Bupati dihapus.

c. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 tanggal 24 Maret 1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga, DPR Marga dan Perangkat Marga Lainnya, Pemberhentian Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Perangkat Marga Lainnya, serta Penunjukan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) tentang Pemerintahan Desa, Pemerintahan Marga dihapuskan dan digantikan dengan Pemerintahan Desa.

Sampai dengan akhir tahun 2018, wilayah Kabupaten Muara Enim terbagi ke dalam 20 kecamatan yang terdiri dari 245 desa dan 10 kelurahan. Jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan maka jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Tanjung Agung dan Rambang Dangku sebanyak 26 desa. Sedangkan kecamatan Benakat merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu 6 desa.

**Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018**



Sejak berdirinya Kabupaten Muara Enim sampai dengan Tahun 2018, telah 18 orang putra daerah memimpin kabupaten, masing-masing adalah:

Tabel 195 Daftar Pemimpin Kabupaten Muara Enim

No.	Nama	Masa Bakti
1.	M. Bakir	1947 - 1950
2.	Amaluddin	1950 - 1954
3.	Mustafa	1954 - 1955
4.	RH Najamuddin	1955 - 1957
5.	Aziz	1957 - 1958
6.	Abbas AR	1958 - 1959
7.	A. Wani	1959 - 1964
8.	A. Rachman	1964 - 1966
9.	A. Kasim Zaki	1966 - 1973
10.	A. Kasim Zaki	1973 - 1974
11.	Asnawi Mangku Alam	1974 - 1975
12.	H. M Sai Sohar	1975 - 1986
13.	H. Nang Ali Solihin, SH	1986 - 1990
14.	H. Hasan Zen, SH	1990 - 1998
15.	H. Ramli Hasan Basri	1998 - 1998
16.	Drs. H. A Sofyan Effendie	1998 - 2003
17.	H. Kalamudin Djinap, SH,MH	2003 - 2008
18.	H. Kalamudin Djinap, SH,MH	2008 - 2009
19.	Ir. H. Muzakir Sai Sohar	2009 – 2013
20.	Ir. H. Muzakir Sai Sohar	2013 – 2018
21.	Ir. H. Ahmad Yani, MM	2018 - 2023

Pada tanggal 18 September 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16 – 5829 Tahun 2018 dan Nomor 131.16 – 5830 Tahun 2018, Ir. H. Ahmad Yani, MM dan H. Juarsah, SH masing-masing dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Bupati dan Wakil Muara Enim, untuk masa jabatan Tahun 2018 – 2023.

7.6 PENUTUP

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Neraca; (d) laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan Arus Kas; (g) Catatan atas Laporan Keuangan TA 2018.